



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS SEKTOR PEREKONOMIAN
DI KABUPATEN BOGOR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Magister Perencanaan
dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

RUBIDIYANTI DOMINICA

NPM: 0806430506

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH**

**JAKARTA
JANUARI 2010**

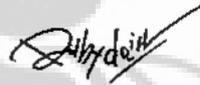
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RUBIDIYANTI DOMINICA

NPM : 080630506

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : RUBIDIYANTI DOMINICA
NPM : 0806430506
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : ANALISIS SEKTOR PEREKONOMIAN DI
KABUPATEN BOGOR

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing : Dr. Sonny Harry B. Harmadi (.....)

Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D (.....)

Penguji : Hera Susanti, SE., MSc (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Sonny Harry B. Harmadi selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini
- (2) Bapak B. Raksaka Mahi, Ph.D, mantan Ketua Program Studi MPKP FEUI dan Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D, Ketua Program Studi MPKP FEUI beserta staf dan karyawan baik langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran studi saya di MPKP FEUI ini
- (3) Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D. dan Ibu Hera Susanti, SE., M.Sc. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi masukan bagi perbaikan tesis ini
- (4) Pusat Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan dan Perencanan (Pusbindiklatren) Bappenas beserta karyawannya yang telah menyelenggarakan program beasiswa untuk seluruh PNS di Indonesia sehingga saya bisa menempuh pendidikan di universitas ini
- (5) Pemerintah Kabupaten Bogor beserta jajarannya yang telah banyak membantu baik motivasi, dana serta dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan
- (6) Bapak Ir. Zairin, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Bapak Ir. Dedi Supriadi, MSc, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Bogor, Ibu Ir. Emy Sriwahyuni, MSi, Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Bapak Maryono, SE, Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Mansur M. Ilyas, SH, (Sekretaris), Bapak Sabeni Endik, SH, Kusaheri, SE dan Susetyo Hadi, AMd dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor, Bapak Didit Okta Pribadi, SP, MSi, Peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah LPPM-IPB dan Ibu Rina Oktaviani, Ph.D, FEM Institut Pertanian Bogor yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta pemikirannya sebagai responden ahli pada penelitian ini

- (7) Kedua orang tua saya Bapak Rochijadi (Almarhum) dan Ibu Ch. M. Madoewireni, kakak-kakak tercinta: Mas Andri dan Mbak Atik, Mbak Nana dan Mas Yono, Mbak Yaya dan Mas Ranu beserta keluarga. Juga keluarga besar Bapak Agoes Pawarto. Teristimewa kepada suami tercinta Mas Sandi atas dorongan dan motivasi serta kerelaannya untuk membantu dan mendampingi selama menempuh studi ini
- (8) Rekan-rekan di MPKP Angkatan XIX Pagi Bappenas Pak Anton, Da Andri, Dea, Mbak Dessy, Dian, Mbak Dyah, Pak Elyis, Da Firman, Mbak Ila, Om Ito, Mbak Irma, Mbak Ivon, Pak Jun, Pak Legi, Pak Nata, Nova, Da Ronny, Sidik Kurik dan Pak Sofyan Cik Gu serta pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan kemajuan daerah.

Jakarta, 11 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rubidiyanti Dominica
NPM : 0806430506
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

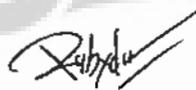
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BOGOR

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2010
Yang menyatakan



(RUBIDIYANTI DOMINICA)

ABSTRAK

Nama : Rubidiyanti Dominica
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Sektor Perekonomian di Kabupaten Bogor

Analisis sektor perekonomian di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang memiliki keunggulan dan mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang perlu dilakukan dan diharapkan dalam upaya mengembangkan sektor perekonomian. Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang memiliki keunggulan adalah analisis *Location Quotient*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen dan untuk menangkap persepsi ahli dalam mengetahui arah pengembangan sektor perekonomian digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai tambah dan penduduk yang bekerja dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor baik terhadap Provinsi Jawa Barat dan terhadap Nasional adalah sektor industri pengolahan. Namun bila didasarkan persepsi ahli secara kumulatif dengan metode AHP, sektor yang menjadi prioritas pengembangan adalah pertanian. Jika dilihat secara individu, maka beberapa ahli mengutamakan prioritas pada sektor industri atau jasa, sedangkan sisanya mengutamakan pada sektor pertanian. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menjamin agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor telah mendapat informasi yang cukup tentang aktivitas perekonomian yang ada. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Bogor adalah infrastruktur yang belum memadai, rendahnya produktivitas, input yang terbatas dan kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung. Dalam menanggulangi kendala tersebut kebijakan prioritas yang diperlukan adalah kebijakan investasi dan penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan penataan tata guna lahan, peningkatan kualitas SDM dan kemitraan pemerintah dan swasta. Prioritas kebijakan ini berdasarkan analisis sensitivitas adalah konsisten baik untuk pengembangan industri maupun pengembangan pertanian. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mensosialisasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keunggulan, dan mengingat persepsi ahli prioritas pengembangan sektor perekonomian adalah pertanian maka industri pengolahan yang menjadi prioritas adalah industri yang mengolah bahan baku pertanian seperti industri pengolahan makanan dan minuman.

Kata kunci: Sektor Unggulan, Pertanian, Industri, Jasa, Infrastruktur, Investasi, Sumberdaya manusia, Kemitraan

ABSTRACT

Name : Rubidiyanti Dominica
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Analysis of Economic Sector in Bogor Regency

Analysis of Economic Sector in Bogor Regency aims to identify the economic sectors in Bogor Regency which has competitive advantages and to find out the needed and the expected policies to develop the economic sectors in Bogor Regency. The research methodology used in this thesis is based on a quantitative approaches such as Location Quotient, Shift Share, Typology Klassen and to capture the perceptions of experts in knowing the direction of development of economic sectors by using Analytical Hierarchy Process method (AHP). Based on the analysis of value added and employment, it can be concluded that the sector has competitive advantages in Bogor Regency, for the West Java Province as well as the country is the manufacturing industry. However, if it is based on expert perceptions in cumulative using AHP method, the priority sector is agriculture. Individually, some experts put the priority on manufacturing industry or service sectors, while others put the priority on the agricultural sector. Local Government needs to ensure that all communities have been well informed about the existing economic activity. Further constraints faced in developing the economic sectors in Bogor Regency are inadequate infrastructure, low productivity, limited input and government policies that are less supportive. In handling these constraints the policy needed to be prioritized are investment policy and institutional strengthening, improved infrastructure and land arrangements, improvement of the quality of human resources and public private partnerships. This policy priorities based on sensitivity analysis is consistent for the development of both industrial and agricultural. Based on the analysis and conclusions, it can be suggested that the local government needs to socialize that the manufacturing industry is a sector which has the competitive advantages, and considering the perception of expert, that the priority in the development of economic sectors is agriculture, the prioritized manufacturing industry is the industry that process agricultural raw material such as food and beverage industry.

Keywords: Competitive Sector, Agriculture, Industry, Services, Infrastructure, Investment, Human resources, Partnership

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Hipotesis Penelitian	7
1.5. Manfaat penelitian	7
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.7. Metodologi	8
1.8. Sistematika Penulisan	10
1.9. Kerangka Penelitian	11
2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah	12
2.2. Penentuan Sektor Unggulan	14
2.1.1. <i>Location Quotient</i> (LQ)	15
2.1.2. Analisis <i>Shift Share</i>	16
2.1.3. Analisis Tipologi Klassen	18
2.3. Penentuan Prioritas Kebijakan	21
2.3.1. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	21
2.4. Referensi Penelitian Sebelumnya.....	23
3. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	25
3.1. Gambaran Umum Demografis	26
3.2. Kondisi Perekonomian	28
3.3. Kebijakan daerah Kabupaten Bogor	31
4. ANALISA DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Ekonomi Basis	36
4.1.1. Analisis Ekonomi Basis dengan <i>Location Quotient</i> (LQ) Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat	37
4.1.2. Analisis Ekonomi Basis dengan <i>Location Quotient</i> (LQ) Kabupaten Bogor terhadap Indonesia	40
4.2. <i>Shift Share</i> Nilai Tambah	42
4.2.1. Analisis <i>Shift Share</i> Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat.....	43
4.2.2. Analisis <i>Shift Share</i> Nilai Tambah Kabupaten Bogor	

terhadap Indonesia.....	45
4.3. Kontribusi/Proporsi dan Pertumbuhan PDRB dengan Analisis Tipologi Klassen	47
4.3.1. Analisis Tipologi Klassen Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat	47
4.3.2. Analisis Tipologi Klassen Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Indonesia	51
4.4. Pemetaan Potensi Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Terhadap Provinsi Jawa Barat	54
4.5. Pemetaan Potensi Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Terhadap Indonesia	58
4.6. Ekonomi Basis Penduduk Bekerja	62
4.6.1. Analisis Ekonomi Basis Penduduk Bekerja dengan LQ Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat.....	62
4.6.2. Analisis Ekonomi Basis Penduduk Bekerja dengan LQ Kabupaten Bogor terhadap Indonesia	63
4.7. Analisis <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja	64
4.7.1. Analisis <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat.....	64
4.7.2. Analisis <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Indonesia	65
4.8. Pemetaan Potensi Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Berdasarkan Penduduk yang Bekerja	67
4.9. Hasil Analisis Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Berdasarkan Nilai Tambah dan Penduduk yang Bekerja	69
4.10. Perencanaan Kebijakan Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor	73
5. KESIMPULAN DAN SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.3.	Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral	19
Tabel 3.2.1.	PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga konstan 2000 Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah)..	29
Tabel 3.2.2.	Laju Pertumbuhan PDRB kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007	29
Tabel 3.2.3.	Distribusi Persentase Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2003-2007	30
Tabel 3.2.4.	Distribusi Persentase Kelompok Sektor terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2003-2007	30
Tabel 4.1.1.	Nilai <i>Location Quotient</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2007	38
Tabel 4.1.2.	Nilai <i>Location Quotient</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDB Nasional Tahun 1996-2007	40
Tabel 4.2.1.	Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007	43
Tabel 4.2.2.	Nilai Shift Share PDRB terhadap PDB Nasional Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007	45
Tabel 4.3.1.1	Klasifikasi Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Bogor Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1996-2007	48
Tabel 4.3.1.2.	Klasifikasi Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Terhadap Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Barat	50
Tabel 4.3.2.1.	Klasifikasi Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDB Nasional Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1996-2007	51
Tabel 4.3.2.2.	Klasifikasi Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Terhadap Sektor Perekonomian Nasional ..	53
Tahun 4.4.1.	Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2007	55
Tabel 4.4.2.	Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2007 (Prioritas)....	56
Tabel 4.5.1.	Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor terhadap Nasional Tahun 1996-2007	59
Tabel 4.5.2.	Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor Terhadap Nasional Tahun 1996-2007 (Prioritas)	60
Tabel 4.6.1.1.	Nilai LQ Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2007	63
Tabel 4.6.2.	Nilai LQ Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terhadap Nasional Tahun 1996-2007	64
Tabel 4.7.1.	Nilai <i>Shift Share</i> Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terhadap Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007	65
Tabel 4.7.2.	Nilai <i>Shift Share</i> Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terhadap Tenaga Kerja Nasional Tahun 1996-2000	

	dan Tahun 2001-2007	66
Tabel 4.8.1.	Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat.....	67
Tabel 4.8.2.	Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Nasional.....	68
Tabel 4.8.3.	Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat.....	68
Tabel 4.8.4.	Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Nasional.....	69
Tabel 4.9.1.	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2007	71
Tabel 4.9.2.	Data Jumlah Industri Menengah dan Besar dan Industri Kecil Kabupaten Bogor Tahun 2007	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bogor	3
Gambar 1.2.	Kerangka Pikir Penelitian	11
Gambar 3.1.1.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Bogor.....	26
Gambar 3.1.2.	Jumlah Penduduk yang Berumur 15 tahun Keatas Menurut Jenjang pendidikan	27
Gambar 4.	Hirarki AHP	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuesioner AHP	87
Lampiran 2.	Tabel Hasil Pengisian Kuesioner AHP oleh Responden Ahli..	111
Lampiran 3.	Tabel Hasil Output Expert Choice.....	116
Lampiran 4.	Grafik Hasil Sensitivitas	120
Lampiran 5.	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2001-2007	121
Lampiran 6.	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000	123
Lampiran 7.	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 2001-2007	125
Lampiran 8.	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> PDRB Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 1996-2000	127
Lampiran 9.	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000.....	129
	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2001-2007.....	129
Lampiran 10.	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 1996-2000.....	130
	Tabel Nilai <i>Shift Share</i> Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 2001-2007.....	130

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 membawa semangat otonomi daerah. Undang-Undang tersebut memberi wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini bertujuan agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan daerahnya dengan baik karena dianggap lebih mengetahui situasi dan kondisi daerahnya sehingga solusi bagi permasalahan daerah yang diambil diharapkan lebih baik. Untuk itu otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk menentukan pengembangan daerahnya sesuai karakteristik daerahnya masing-masing.

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini mengakibatkan pengembangan suatu daerah perlu memperhatikan karakteristik daerah dan potensi ekonomi yang dimiliki. Pengetahuan akan potensi ekonomi ini penting untuk diketahui agar perencanaan daerah dapat dirumuskan dengan baik. Pada era otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk melihat potensi ekonomi bagi pengembangan daerah seperti sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan memiliki prospek yang baik perlu dikembangkan dan diharapkan sektor tersebut dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang sehingga dapat mendorong perekonomian yang tumbuh dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pengembangan suatu daerah membutuhkan pengetahuan mengenai kondisi perekonomian dan potensi ekonomi suatu daerah sehingga dapat ditentukan sektor mana yang menjadi sektor unggulan bagi pengembangan daerah tersebut.

Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah perlu mengetahui kondisi dan potensi perekonomian agar dapat merancang suatu perencanaan pembangunan yang baik bagi daerahnya. Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan berlokasi strategis karena berdekatan dengan ibukota Negara yang merupakan pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan. Lokasi yang strategis ini dapat memberikan keuntungan karena memberikan peluang untuk menyediakan kebutuhan daerah sekitarnya baik berupa produk maupun tenaga kerja dan juga dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh daerah sekitarnya, namun juga dapat menjadi ancaman jika tidak dapat mengembangkan produk dan tenaga kerjanya maka Kabupaten Bogor akan dibanjiri oleh produk dan tenaga kerja daerah sekitarnya (Sriwahyuni, 2002). Oleh karena itu perlu diketahui sektor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor yang memiliki daya saing dibandingkan daerah sekitarnya.

Secara administrasi seperti terlihat dalam Gambar 1.1, Kabupaten Bogor berdekatan dengan ibukota negara yaitu Jakarta/Provinsi DKI Jakarta dan berbatasan dengan Provinsi Banten dan serta kabupaten dan kota disekitarnya. Kabupaten Bogor berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten), sebelah timur dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 428 desa/kelurahan. Walaupun berdekatan dengan ibu kota negara, Kabupaten Bogor masih didominasi daerah pedesaan (332 desa pedesaan) dibandingkan perkotaan (96 desa perkotaan). Lokasi Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan ibu kota negara yang merupakan pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan cukup tinggi, dapat menyebabkan fenomena terjadinya perkembangan kota yang meluas secara horizontal atau suatu proses peluberan kegiatan perkotaan ke wilayah pinggiran, dengan kata lain terjadi proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar atau yang dikenal dengan *urban sprawl*. Menurut Harmadi dan Yudhistira (2008), aktivitas ekonomi yang

PETA ADMINISTRASI Administration Map



Secara administrasi, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan, yaitu:

In terms of government administration, Bogor Regency consist of 40 sub-districts, as follows:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Kecamatan/Sub-district Nanggung | 21. Kecamatan/Sub-district Tanjungsari |
| 2. Kecamatan/Sub-district Leuwiliang | 22. Kecamatan/Sub-district Jonggol |
| 3. Kecamatan/Sub-district Leuwisadeng | 23. Kecamatan/Sub-district Cileungsi |
| 4. Kecamatan/Sub-district Pamijahan | 24. Kecamatan/Sub-district Klapanunggal |
| 5. Kecamatan/Sub-district Cibungbulang | 25. Kecamatan/Sub-district Gunung Putri |
| 6. Kecamatan/Sub-district Ciampea | 26. Kecamatan/Sub-district Citeureup |
| 7. Kecamatan/Sub-district Tenjokaya | 27. Kecamatan/Sub-district Cibinong |
| 8. Kecamatan/Sub-district Dramaga | 28. Kecamatan/Sub-district Bojong Gede |
| 9. Kecamatan/Sub-district Ciomas | 29. Kecamatan/Sub-district Tajurhalang |
| 10. Kecamatan/Sub-district Tamansari | 30. Kecamatan/Sub-district Kemuning |
| 11. Kecamatan/Sub-district Cijeruk | 31. Kecamatan/Sub-district Rancabungur |
| 12. Kecamatan/Sub-district Cigombong | 32. Kecamatan/Sub-district Parung |
| 13. Kecamatan/Sub-district Caringin | 33. Kecamatan/Sub-district Ciseeng |
| 14. Kecamatan/Sub-district Ciawi | 34. Kecamatan/Sub-district Gunung Sindur |
| 15. Kecamatan/Sub-district Cisarua | 35. Kecamatan/Sub-district Rumpin |
| 16. Kecamatan/Sub-district Megamendung | 36. Kecamatan/Sub-district Cigudeg |
| 17. Kecamatan/Sub-district Sukaraja | 37. Kecamatan/Sub-district Sukajaya |
| 18. Kecamatan/Sub-district Babakan Madang | 38. Kecamatan/Sub-district Jasinga |
| 19. Kecamatan/Sub-district Sukamakmur | 39. Kecamatan/Sub-district Tenjo |
| 20. Kecamatan/Sub-district Cariu | 40. Kecamatan/Sub-district Parungpanjang |

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bogor

terjadi kuat di pusat kota pasti tidak hanya berlaku terbatas dalam wilayah kota tersebut. Cepat atau lambat aktivitas ini akan meluas dan akan memberikan pengaruh terhadap daerah sekitarnya. Efek limpahan (*spillover effect*) ini akan mengubah wilayah sekitarnya dan mendorong daerah itu untuk berintegrasi secara ekonomi dengan pusat kota. Integrasi ekonomi kota dengan daerah sekitarnya

yang semakin kuat ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mengubah daerah sekitar yang pada awalnya lebih menunjukkan karakteristik pedesaan menjadi perkotaan. Daerah yang sebelumnya lebih banyak diisi oleh wilayah pertanian atau wilayah hijau perlahan bergeser menjadi kawasan perkantoran, industri atau perumahan. Pada tahap ini dikatakan bahwa aktivitas kota terdispersi ke daerah-daerah di sekitarnya dan memunculkan apa yang dinamakan dengan *urban sprawl*. Fenomena ini mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja sektor perekonomian di Kabupaten Bogor.

Dalam perekonomian suatu daerah dikenal sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang hasilnya dapat diekspor ke daerah lain, sedangkan sektor non basis adalah sektor yang melayani sektor lain dalam daerah. Analisis mengenai sektor basis ini diharapkan dapat membantu menentukan sektor yang memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Bogor. Selain itu untuk mengetahui daya saing daerah perlu diketahui apakah sektor yang berkembang di Kabupaten Bogor disebabkan karena pengaruh daerah di atasnya (Provinsi atau Nasional) atau sektor tersebut memiliki keunggulan karena memiliki daya saing di daerahnya sendiri. Sektor perekonomian yang memiliki laju pertumbuhan yang positif dan tinggi serta memiliki kontribusi yang besar bagi pembentukan output perekonomian di daerah juga perlu menjadi pertimbangan bagi pengembangan sektor perekonomian tersebut di daerah. Analisis mengenai sektor ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan sektor yang memiliki keunggulan di daerah khususnya di Kabupaten Bogor.

Perekonomian di Kabupaten Bogor secara umum pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2003 – 2007 dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor menurut lapangan usaha atau sektoral berdasarkan harga konstan tahun 2000. PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2003-2007 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peningkatan output yang dihasilkan Kabupaten Bogor setiap tahunnya dalam periode tersebut. Pertumbuhan tiap – tiap lapangan usaha dari tahun ke tahun juga menunjukkan laju yang berbeda-beda. Secara umum semua lapangan usaha memperlihatkan pertumbuhan yang positif kecuali sektor pertanian, peternakan

dan kehutanan pada tahun 2003 dan 2006 dan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2004 dan 2005. Bila dilihat dari distribusi persentase PDRB tiap lapangan usaha terhadap total PDRB dimana distribusi terbesar diperlihatkan oleh sektor industri dan pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sementara yang paling kecil persentasenya adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pengelompokan sektor dalam sektor primer, sekunder dan tersier PDRB Kabupaten Bogor menunjukkan sektor sekunder memberikan prosentase yang paling besar diikuti sektor tersier dan yang paling kecil adalah sektor primer. Perkembangan dari tahun ke tahun antara tahun 2003 – 2007 menunjukkan bahwa sektor primer cenderung menurun sedangkan sektor sekunder cenderung meningkat diikuti sektor tersier.

Sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor memperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi yang berbeda selama periode tersebut. Kontribusi sektor sekunder yang diikuti sektor tersier yang makin meningkat dan sektor primer yang cenderung menurun dapat disebabkan adanya perubahan struktur produksi di Kabupaten Bogor. Susanti, Ikhsan dan Widyanti (2007) menjelaskan bahwa perubahan struktur produksi yang terjadi pada saat perekonomian tumbuh biasanya ditunjukkan semakin tingginya peran sektor lain di luar sektor pertanian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriwahyuni, 2002 dengan menggunakan data sampai dengan tahun 2000 menemukan bahwa sektor strategis yang mempunyai memiliki keunggulan dibandingkan sektor lain dalam lingkup Nasional dan lingkup Provinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan dan subsektor restoran. Pada periode selanjutnya sektor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor juga perlu diketahui.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat (2008) mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi pada tahun 2007. Namun bila dilihat dari PDRB per kapita maka Kabupaten Bogor termasuk ke dalam Kabupaten yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah. Hal ini menunjukkan walaupun nilai PDRB Kabupaten Bogor cukup besar, namun bila

dibagi jumlah penduduknya maka output per kapita Kabupaten Bogor masih rendah, sehingga tingkat kemakmurannya pun masih rendah. Oleh karena itu analisis mengenai sektor ekonomi perlu dilakukan untuk mengetahui potensi ekonomi di Kabupaten Bogor sehingga dapat mengetahui sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan di Kabupaten Bogor yang diharapkan dapat meningkatkan output daerah.

Selanjutnya apabila telah diketahui sektor yang memiliki keunggulan maka perlu dirumuskan kebijakan dalam pengembangan sektor perekonomian tersebut. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada serta harapan pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk merumuskan perencanaan daerahnya, maka pengetahuan mengenai potensi dan kondisi perekonomian sangat diperlukan agar perencanaan daerah dapat dirumuskan dengan baik. Kabupaten Bogor yang berada di lingkup Provinsi Jawa Barat dan berlokasi strategis karena dekat dengan ibukota negara perlu menentukan sektor-sektor yang strategis bagi pengembangan wilayahnya. Kondisi strategis itu memberikan peluang Kabupaten Bogor untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh daerah sekitarnya dan dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh daerah sekitarnya namun juga dapat menjadi ancaman bila hanya menjadi tempat bagi pasar produk hasil dari daerah sekitarnya. Perekonomian yang senantiasa berubah juga perlu menjadi pertimbangan bagi penentuan sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan. PDRB Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi pada tahun 2007, namun bila dilihat dari PDRB per kapita, Kabupaten Bogor termasuk dalam kabupaten yang memiliki tingkat kemakmuran masih rendah. Hal ini disebabkan output yang dihasilkan Kabupaten Bogor masih rendah untuk itu Kabupaten Bogor perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan outputnya. Analisis mengenai sektor ekonomi perlu dilakukan untuk mengetahui potensi ekonomi di Kabupaten Bogor sehingga dapat mengetahui sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan di Kabupaten

Bogor yang diharapkan dapat meningkatkan output daerah. Selanjutnya setelah mengetahui sektor yang memiliki keunggulan perlu dirumuskan kebijakan pengembangan sektor perekonomian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta harapan pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor. Untuk itu perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Sektor-sektor perekonomian apakah yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor?
2. Kebijakan-kebijakan apakah yang perlu dilakukan dalam upaya mengembangkan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang memiliki keunggulan
2. Mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor yang perlu dilakukan dan diharapkan dalam upaya mengembangkan sektor perekonomian.

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat sektor yang memiliki keunggulan dibandingkan sektor lain yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bogor dan terdapat kebijakan yang diharapkan menjadi prioritas dalam mengembangkan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penentuan sektor yang akan dikembangkan di Kabupaten Bogor dan kebijakan yang diharapkan bagi pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada identifikasi perekonomian yang dilakukan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2007, dengan lokasi di Kabupaten Bogor. Analisis bersifat makro dan pengertian sektor dalam penelitian ini adalah sektor dalam PDB dan PDRB menurut lapangan usaha.

1.7. Metodologi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Bogor digunakan :
 - a. Analisis *Location Quotient* (LQ) : untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *selfsufficiency* suatu sektor. Dalam analisis ini sektor dibagi menjadi dua yaitu sektor basis yaitu sektor yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun luar daerah yang bersangkutan dan sektor non basis, yaitu sektor yang melayani pasar di daerah tersebut.
 - b. Analisis *Shift Share* : suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional atau lokal dan menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis *shift share* nilai tambah yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis *shift share* PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDB Nasional. Selain itu analisis *shift share* juga dilakukan pada jumlah penduduk bekerja Kabupaten Bogor terhadap jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk bekerja Kabupaten Bogor terhadap jumlah penduduk bekerja Nasional. Analisis ini menggunakan analisis pada dua titik yaitu Tahun 1996 dan Tahun 2000 serta Tahun 2001 dan Tahun 2007. Hal ini mengingat *regional shift* tidak konstan dari satu periode ke periode lainnya.
 - c. Analisis Tipologi Klassen : alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor atau sub sektor prioritas atau unggulan suatu daerah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pangsa sektor dan subsektor suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi atau secara nasional.
2. Untuk menangkap persepsi *expert* tentang arah pengembangan Kabupaten Bogor digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu salah

satu bentuk model pengambilan keputusan dengan menggunakan hirarki fungsional dan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Pengambilan contoh dilakukan secara non-probabilitas yaitu dengan memilih responden secara sengaja (*purposive sampling*) (Singarimbun dan Effendi, 1989). Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah responden ahli yang terdiri dari perwakilan *stakeholder*/pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor yaitu : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Perizinan Terpadu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor, Sekretaris Komisi B (Bidang Perekonomian) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dan Peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB). Pengumpulan data primer untuk penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara secara langsung dan dengan cara terstruktur melalui kuesioner yang telah dipersiapkan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data dan informasi untuk elemen-elemen dalam menyusun hirarki dan pemberian bobot atas elemen-elemen dalam hirarki AHP.

Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Pusat (PDB, PDRB, Statistik Indonesia) dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat dalam Angka, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor 2005 – 2025, Kabupaten Bogor dalam Angka) dan juga sumber-sumber lain yang terkait. Sedangkan data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan *expert*/ahli.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi, sistematika penulisan tesis serta kerangka pikir penelitian

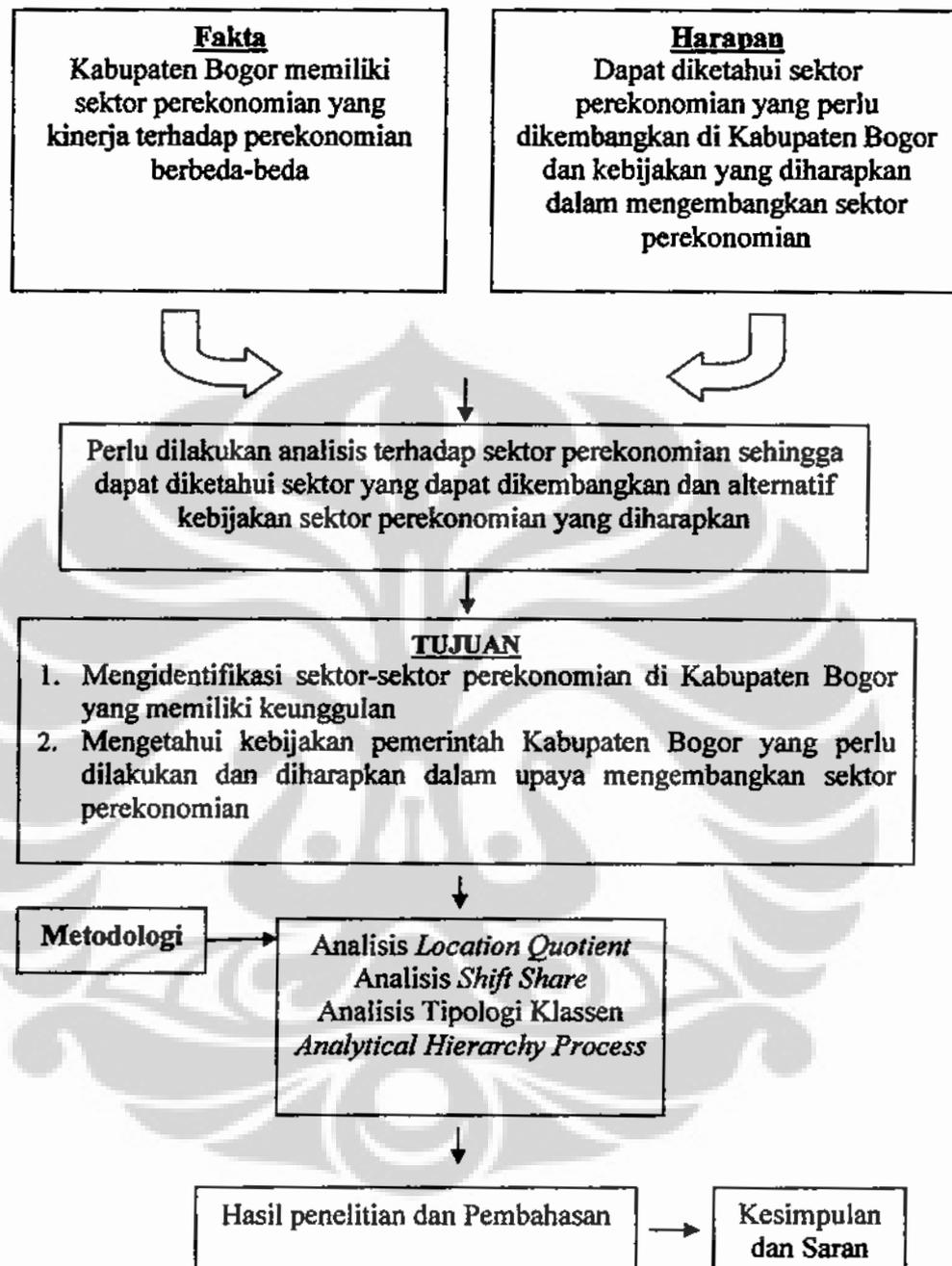
Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menyajikan kajian pustaka yang berkaitan dengan perencanaan daerah dan penentuan keunggulan daerah serta metode analisis bagi penentuan keunggulan daerah dan penentuan prioritas bagi kebijakan yang diharapkan

Bab III. Gambaran Umum Obyek Penelitian. Bab ini menjelaskan Kabupaten Bogor secara singkat baik secara geografis, demografis, kondisi perekonomian dan kebijakan daerah Kabupaten Bogor

Bab IV. Analisis dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil analisis yang diperoleh yang menjelaskan mengenai analisis sektor perekonomian di Kabupaten Bogor dan kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor

Bab V. Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan disimpulkan mengenai keseluruhan hasil penelitian dan beberapa saran yang relevan bagi pengambil kebijakan.

1.9. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penelitian

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Todaro dan Smith (2003) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan juga tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pembangunan tersebut pada dasarnya memiliki tiga tujuan inti yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pentingnya upaya pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2003) di berbagai negara pada beberapa dasawarsa pertama seusai Perang Dunia Kedua, tercermin pada penerimaan luas yang nyaris bersifat universal atas peranan dan fungsi perencanaan pembangunan sebagai jalur yang paling langsung dan paling meyakinkan untuk mencapai kemajuan ekonomi. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan

dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor dan sebagainya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan ekonomi menurut Jhinghan (2003) juga mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Adapun yang disebut dengan rencana ekonomi menurut Todaro dan Smith (2003) pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target-target tersebut. Rencana ekonomi itu ada yang bersifat komprehensif, ada pula yang bersifat parsial. Sebuah rencana komprehensif menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dari perekonomian nasional. Sedangkan rencana ekonomi parsial hanya akan meliputi sektor-sektor ekonomi tertentu saja (sektor industri, pertanian, sektor publik, sektor luar negeri dan sebagainya). Kemudian apa yang biasa disebut sebagai proses perencanaan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang diawali dengan pemilihan tujuan sosial, kemudian menetapkan berbagai target ekonomi yang disusun dengan menyusun suatu kerangka kerja bagi kegiatan-kegiatan implementasi, koordinasi dan pemantauan rencana pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Arsyad (1999) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Beberapa alasan mengapa diperlukan perencanaan adalah mengurangi ketidakpastian, mengintegrasikan metoda dan teknologi yang rasional ke dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Secara umum fungsi-fungsi perencanaan menurut Arsyad (1999) adalah sebagai berikut :

- a. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
- b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan
- e. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi adalah agar :

- a. Alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan
- b. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap dan berkesinambungan
- c. Stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

2.2. Penentuan Sektor Unggulan

Stimson, Stough dan Roberts (2002) mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi regional pada dasarnya adalah tentang alokasi atau realokasi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja sektor perekonomian. Oleh karena itu perlu diketahui potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Ada beberapa alat analisis yang digunakan untuk penentuan potensi relatif perekonomian suatu wilayah. Alat analisis itu diantaranya adalah *Location Quotient*, *Shift Share* dan Tipologi Klassen.

2.2.1. Location Quotient (LQ)

Location quotient merupakan suatu tehnik yang membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah. Tarigan (2007) mengemukakan bahwa metode LQ membandingkan porsi nilai tambah atau lapangan kerja untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi nilai tambah atau lapangan kerja untuk sektor yang sama secara nasional. Dalam bentuk rumus apabila yang digunakan adalah nilai tambah dapat dituliskan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{NTB_{ri} / NTB_{Ni}}{NTB_r / NTB_N}$$

Dimana :

NTB_{ri} = nilai tambah sektor i di wilayah analisis

NTB_{Ni} = nilai tambah sektor i nasional

NTB_r = nilai tambah wilayah analisis

NTB_N = nilai tambah nasional

Catatan :

Istilah nasional adalah wilayah yang lebih tinggi jenjangnya. Misalnya wilayah analisis adalah provinsi maka nasional adalah negara. Bila wilayah analisis adalah wilayah kabupaten atau kota maka istilah nasional dapat digunakan untuk provinsi dan seterusnya.

Perhitungan LQ dari rumus diatas bila diketahui $LQ > 1$ berarti bahwa porsi nilai tambah sektor i di wilayah analisis terhadap total nilai tambah wilayah adalah lebih besar dibandingkan porsi nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Artinya sektor i di wilayah analisis secara proporsional dapat menyediakan nilai tambah melebihi porsi sektor i secara nasional. $LQ > 1$ memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis, sedangkan apabila $LQ < 1$ berarti sektor itu adalah sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang hasilnya diekspor ke luar daerah/kota atau luar negeri (analog *tradable goods*). Sektor non basis adalah sektor yang melayani sektor lain dalam daerah/kota (analog *non-tradable goods*).

Menurut Arsyad (1999) analisis LQ ini sangat sederhana dan dapat dipakai untuk menganalisis ekspor impor (perdagangan) suatu daerah. Namun demikian tehnik ini memiliki kelemahan yaitu :

- a. LQ mengasumsikan bahwa selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah sama padahal selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah
- b. LQ juga mengasumsikan bahwa tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah sama, pada kenyataannya berbeda, artinya konsumsi rata-rata bahan pakaian daerah A lebih besar dari 1 (satu) tetapi daerah A mengimpor bahan pakaian, sedang daerah B yang LQ industri bahan pakaian lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat mengekspor bahan pakaian
- c. Bahan keperluan industri berbeda antar daerah. Artinya daerah A memakai benang tenun dari kapas, sedang daerah B lebih banyak memakai bahan tenun sintetis. Walaupun industri pemintalan kapas daerah A mempunyai LQ lebih besar dari 1 (satu) daerah itu mungkin harus mengimpor bahan tenun dari daerah B yang mungkin industri tekstil di daerah B mempunyai LQ kurang dari 1 (satu).

2.2.2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional atau lokal dan menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau nasional (Sjafrizal, 2008). Analisis ini memisahkan (dekomposisi) pertumbuhan regional ke dalam tiga komponen :

1. Peran pertumbuhan nasional secara keseluruhan terhadap daerah (*regional share/R_t*)
2. Peran pertumbuhan sektoral nasional terhadap daerah (*proportional shift/Sp*)
3. Peran pertumbuhan sektoral daerah terhadap pertumbuhan daerah (*differential shift/Sd*)

Dimana :

1. Pertumbuhan Daerah (G): selisih antara output periode akhir dengan awal

$$G_t = X_{nt} - X_{r0}$$

2. *Regional Share* (R_t): pertumbuhan sektor i di daerah jika pertumbuhannya = pertumbuhan ekonomi nasional

$$R_t^i = \left(\frac{X_{nt}^i}{X_{n0}^i} - 1 \right) * X_{r0}^i$$

3. *Proportional Shift* (Sp_t): pertumbuhan sektor i di daerah jika pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan nasional. Sp dapat disebut juga sebagai efek struktural

$$Sp_t^i = \left(\frac{X_{nt}^i}{X_{n0}^i} - \frac{X_{nt}}{X_{n0}} \right) * X_{r0}^i$$

4. *Differential Shift* (Sd_t): pertumbuhan sektor i di daerah jika pertumbuhan sektor i di daerah tersebut mengikuti pertumbuhan sektor i nasional. Sd dapat disebut juga sebagai efek daya saing.

$$Sd_t^i = (X_{rt}^i - (X_{nt}^i / X_{n0}^i) X_{r0}^i)$$

Dimana :

X_{nt} = PDRB tingkat atasnya Tahun ke-t

X_{n0} = PDRB tingkat atasnya Tahun ke-0

X_{nt}^i = Nilai Tambah Sektor i tingkat atasnya tahun ke- t

X_{n0}^i = Nilai Tambah Sektor i tingkat atasnya tahun ke-0

X_{rt}^i = Nilai Tambah Sektor i daerah tersebut tahun ke-t

X_{r0}^i = Nilai Tambah Sektor i daerah tersebut tahun ke-0

Selain itu berlaku juga perhitungan sebagai berikut :

$$S_t = \text{Regional shift} (Sp+Sd)$$

$$G_t = R_t + S_t$$

$$G_t = R_t + (Sp + Sd)$$

Analisis *shift share* memiliki keunggulan yaitu tergolong sederhana, namun demikian dapat memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat dan memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat. Sedangkan kelemahan analisis *shift share* hanya dapat digunakan untuk analisis *ex post*, dan adanya data periode waktu tertentu di tengah periode pengamatan yang tidak terungkap. Analisis ini membutuhkan analisis lebih lanjut apabila digunakan untuk peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya dan tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor serta tidak dapat melihat keterkaitan antar daerah.

2.2.3. Analisis Tipologi Klassen

Pembangunan daerah perlu diupayakan agar berjalan sesuai rencana. Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan tersebut salah satunya adalah penentuan sektor-sektor prioritas atau unggulan. Sjafrizal (1997) mengemukakan bahwa Tipologi Klassen adalah salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Analisis Tipologi Klassen membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pangsa sektor, sub sektor, usaha atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi atau nasional. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, sub sektor, usaha atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Tipologi Klassen juga merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita (nasional).

Tujuan analisis Tipologi Klassen, menurut Sjafrizal (1997) adalah mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya dan mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan suatu daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis ini adalah :

1. Dapat membuat prioritas kebijakan daerah berdasarkan keunggulan sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah yang merupakan hasil analisis Tipologi Klassen
2. Dapat menentukan prioritas kebijakan suatu daerah berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian nasional maupun daerah yang diacunya
3. Dapat menilai suatu daerah baik dari segi daerah maupun sektoral.

Tabel 2.2.3. Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral

Kuadran II Sektor maju tapi tertekan $g_i < g, s_i > s$	Kuadran I Sektor maju dan tumbuh dengan pesat $g_i > g, s_i > s$
Kuadran IV Sektor relatif tertinggal $g_i < g, s_i < s$	Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat $g_i > g, s_i < s$

Sumber : Sjafrizal (1997), *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma, Tahun XXVI, No. 34, (27-38)

Menurut Sjafrizal (1997), alat analisis Tipologi Klassen merupakan gabungan atau perpaduan antara alat analisis hasil bagi lokasi atau *Location Quotient (LQ)* dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Tipologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan yaitu sektoral maupun daerah. Data yang biasa digunakan dalam analisis ini adalah data Pendapatan Domestik Regional

Bruto (PDRB). Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut :

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $s_i > s$. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional
2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i < g$ dan $s_i > s$. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh
3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (s_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $s_i < s$. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional
4. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

2.3. Penentuan Prioritas Kebijakan

Dalam penentuan prioritas kebijakan dapat digunakan berbagai analisis salah satunya adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang akan diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Brodjonegoro (1992) menjelaskan bahwa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang menggunakan sebuah hirarki fungsional dan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap *expert* atau ahli yaitu orang yang dianggap mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut. Pada hakekatnya AHP merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kelebihan lain model AHP adalah kemampuannya memecahkan masalah yang *multiobjectives* dan *multicriterias*.

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, Brodjonegoro (1992) juga menjelaskan bahwa model AHP juga memiliki kelemahan. Ketergantungannya terhadap input berupa persepsi seorang ahli menjadi tidak ada artinya jika penilaiannya keliru. Selain itu belum adanya kriteria yang jelas tentang ahli membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini. Kebanyakan orang akan ragu apakah persepsi seorang ahli dapat mewakili kepentingan orang banyak dan apakah responden tersebut layak

dianggap ahli. Keragu-raguan ini disebabkan karena pada kenyataannya bahwa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda dengan orang lain. Karenanya agar model AHP dapat diterima masyarakat perlu diberikan kriteria dan batasan yang tegas dari seorang ahli serta meyakinkan masyarakat untuk menganggap bahwa persepsi ahli itu dapat mewakili pendapat masyarakat, paling tidak sebagian besar masyarakat. Kelemahan lain yang juga sekaligus kelebihan adalah modelnya yang sederhana namun telah memasukkan aspek kualitatif. Keunggulan lain model AHP ini adalah sifatnya yang demokratis yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam model perencanaan, sehingga pada akhirnya pembangunan dapat bersifat *bottom up*.

Dalam model AHP terdapat 4 aksioma yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. *Reciprocal Comparison*

Pengambilan keputusan harus dapat memuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi tersebut harus memenuhi syarat *reciprocal* yaitu apabila A lebih disukai daripada B dengan skala x , maka B lebih disukai daripada A dengan skala $1/x$

b. *Homogeneity*

Preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen- elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogen dan harus dibentuk *cluster* (kelompok elemen-elemen) yang baru

c. *Independence*

Preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan dalam model AHP adalah searah keatas, artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen pada level di atasnya

d. *Expectations*

Untuk tujuan pengambil keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak

memakai seluruh kriteria atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Tahapan dalam penyusunan model AHP adalah mengurai masalah ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan dan menyusun elemen tersebut menurut hirarkinya. Setelah penyusunan hirarki, proses selanjutnya adalah menimbang relatif pentingnya semua elemen dengan menggunakan skala perbandingan dengan angka 1-9. Perbandingan kepentingan setiap elemen tersebut dinyatakan dalam matriks perbandingan berpasangan. Dalam menimbang relatif pentingnya suatu elemen harus diterapkan prinsip konsistensi logis, yaitu apabila madu tiga kali lebih manis dibandingkan gula, dan gula tiga kali lebih manis dibandingkan nasi, maka manisnya madu adalah 9 kali manisnya nasi. Setelah semua unsur hirarki ditentukan bobot prioritasnya maka langkah selanjutnya adalah melakukan sintesa.

2.4. Referensi Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu dilakukan Muflihun (2008) untuk mengetahui potensi kerjasama Kawasan Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah yaitu kawasan yang terbentuk dari tujuh daerah yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Analisis yang digunakan analisis *Location Quotient*, *Shift Share* dan Tipologi Klassen, menghasilkan kesimpulan apabila kawasan Subosukawonosraten ingin unggul dan memiliki daya saing di Provinsi Jawa Tengah maka dalam pembangunan ekonominya perlu membuat prioritas kebijakan pembangunan yang berdasarkan sektor yang memiliki keunggulan dengan prioritas utama sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan apabila kawasan Subosukawonosraten ingin memiliki keunggulan dan mampu bersaing secara nasional maka sektor yang dapat dijadikan prioritas utama adalah sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sriwahyuni (2002) yang menganalisis kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dan

mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan sektor, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis Tabel Input Output, analisis *Location Quotient*, *Shift Share* dan *Multiplier*. Data yang digunakan sampai dengan tahun 2000 menemukan bahwa sektor strategis yang mempunyai memiliki keunggulan dibandingkan sektor lain dalam lingkup Nasional dan lingkup Provinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan dan subsektor restoran.

Studi dengan menggunakan metode AHP untuk menghasilkan prioritas kebijakan telah banyak dilakukan, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Sunaryanto (2000) yang menganalisis perencanaan kutub pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada wilayah pertambangan dengan studi kasus pada unit pertambangan emas Pongkor. Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut adalah prioritas utama skenario kebijakan untuk daerah Pongkor ke depan adalah mengembangkan pertambangan bawah tanah agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tetap mengembangkan sektor pertanian sehingga tercipta kutub pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah Tingkat II dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bogor terletak antara 6°18'0" – 6°47'10" Lintang Selatan dan 106° 23'45" - 107° 13'30' Bujur Timur, memiliki luas ± 298.838,304 Ha. Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 411 desa dan 17 kelurahan (428 desa/kelurahan), 3.639 RW dan 14.403 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Wilayah Kabupaten Bogor berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten)
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur.

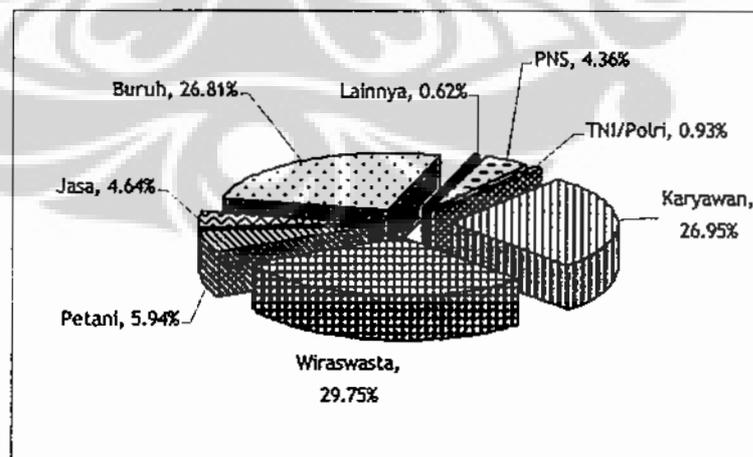
Topografi wilayah Kabupaten Bogor sangat bervariasi, yaitu berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran rendah di sebelah Utara. Keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bogor posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara. Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali Bekasi serta Sub DAS Cipamingkis dan Cibeet. Sungai-sungai pada masing-masing DAS tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Disamping itu, di Kabupaten Bogor terdapat 94 danau atau situ dengan luas total 496,28 Ha serta 63 mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai *reservoir* atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan.

Komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Bogor menurut RTRW Kabupaten Bogor, yaitu : (1) Kawasan Lindung seluas 112.584,615 ha atau 37,67% ; (2) Kawasan Budidaya seluas 186.253,69 ha atau 62,33 %. Perincian lebih lanjut dari ruang lingkup kawasan lindung serta kawasan budidaya, yaitu :

- (1) Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung seluas 57.932,655 ha (19,39%), hutan produksi seluas 27.555,418 ha (9,22%), perkebunan seluas 11.590,659 ha (3,88%) dan tanaman tahunan seluas 15.505,884 ha (5,19%)
- (2) Kawasan budidaya terdiri dari kawasan perkotaan seluas 78.794,14 ha (26,37%) dan kawasan perdesaan seluas 106.603,14 ha (35,67%)
 - Kawasan perkotaan terdiri dari perkotaan seluas 51.317,98 ha (17,17%), pusat kota seluas 23.242,57 ha (7,78%), dan industri seluas 4.233,59 ha (1,4%)
 - Kawasan perdesaan terdiri dari perdesaan seluas 28.682,81 ha (9,60%), lahan basah seluas 45.817,20 ha (15,33%), dan lahan kering seluas 32.103,13 ha (10,74%).

3.1. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2007 mencapai 4.237.962 jiwa atau sekitar 10,32% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (41.483.729 jiwa) dan menempati urutan kedua setelah Kabupaten Bandung bilamana dilihat dari jumlah penduduk di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

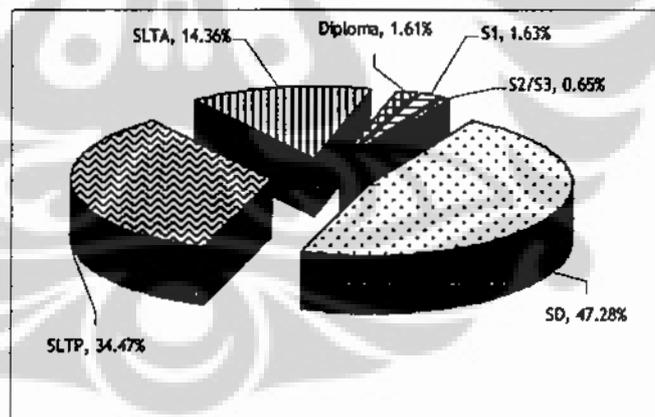


Sumber : Pemda Kabupaten Bogor, LKPJ-AMJ Bupati Bogor
Periode Tahun 2003-2008

**Gambar 3.1.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Kabupaten Bogor**

Sementara itu, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian/profesi, terdiri dari PNS sebanyak 52.923 orang (4,36 %), TNI/Polri sebanyak 11.328 orang (0,93%), karyawan/pegawai swasta sebanyak 327.350 orang (26,95%), wiraswasta/pengusaha sebanyak 361.463 orang (29,75 %), petani sebanyak 71.010 orang (5,85%), peternak sebanyak 1.211 orang (0,10%), jasa sebanyak 56.354 orang (4,64%), buruh sebanyak 325.718 orang (26,81%) dan profesi lainnya sebanyak 7.489 orang (0,62%). (Gambar 4.1.1.). Tampak pada data di atas bahwa sebagian besar atau 83,71 % dari seluruh mata pencaharian penduduk Kabupaten Bogor adalah berprofesi sebagai wiraswasta, karyawan/pegawai swasta dan buruh dan penduduk yang berprofesi sebagai petani dan peternak sangat kecil.

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor relatif masih tinggi, yaitu 459.167 orang atau 15,99 % dari angkatan kerja pada tahun 2007. Tingginya jumlah pengangguran terbuka ini disebabkan oleh rendahnya peluang kerja dan kesempatan kerja yang bisa dimasuki oleh tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.



Sumber : Pemda Kabupaten Bogor, LKPJ-AMJ Bupati Bogor
Periode Tahun 2003-2008

Gambar 3.1.2. Jumlah Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, yaitu tamat SD/ sederajat sebanyak 1.810.208 orang

(47,28%), SLTP/ sederajat sebanyak 1.319.564 orang (34,47%), SLTA/ sederajat sebanyak 549.871 orang (14,36%), Diploma I/II sebanyak 30.618 orang (0,80%), Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 31.018 orang (0,81%), Diploma IV/Sarjana (S-1) sebanyak 62.241 orang (1,63%), Pasca Sarjana/Magister (S-2) sebanyak 23.388 orang (0,61%) dan Pasca Sarjana/Doktor (S-3) sebanyak 1.432 orang (0,04 %) (Gambar 4.1.2.). Terlihat dari data di atas bahwa penduduk Kabupaten Bogor masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yaitu hampir sebagian besar penduduknya hanya menamatkan pendidikan sampai SD (47,28%). Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bogor adalah 7,11 tahun atau setara dengan SMP kelas satu. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor masih rendah. Rata-rata lama sekolah ini belum dapat memenuhi program nasional yang mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama Kelas Tiga atau sampai dengan lulus Sekolah Menengah Pertama.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sebesar 70,18. Bila dibandingkan tahun 2006 angka IPM ini mengalami peningkatan sebesar 0,73 poin. Secara rinci nilai tersebut terdiri dari Angka Harapan Hidup (67,58 tahun) Angka Melek Huruf (95,78%), Rata-rata Lama Sekolah (7,11 tahun) dan Kemampuan Daya Beli Masyarakat sebesar Rp 559.300/kapita/bulan. Angka IPM ini diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya sehingga kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bogor semakin baik.

Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sebesar 1.017.879 jiwa, atau mencapai 24,02% dari jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 4.237.962 jiwa. Besarnya jumlah penduduk miskin ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program pembangunannya.

3.2. Kondisi Perekonomian

Perekonomian di Kabupaten Bogor selama periode 2003 – 2007 dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor menurut lapangan usaha atau sektoral berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai PDRB di setiap lapangan usaha juga mengalami

peningkatan pada setiap tahun kecuali sektor pertanian, peternakan dan kehutanan pada tahun 2003 dan 2006 dan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan output yang dihasilkan Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Tabel 3.2.1. PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	1,341,294.23	1,343,360.54	1,383,027.40	1,366,323.55	1,429,544.34
2. Pertambangan dan Penggalian	340,063.40	314,553.26	282,744.39	307,414.98	322,126.54
3. Industri Pengolahan	14,125,219.14	14,967,082.19	15,851,166.44	16,790,944.62	17,687,418.97
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	791,000.10	837,824.84	898,437.38	968,659.50	1,046,346.68
5. Bangunan	681,988.87	727,576.14	764,824.41	802,808.83	855,403.53
6. Perdagangan, hotel dan restoran	3,261,433.99	3,478,304.84	3,761,156.17	4,063,192.67	4,403,782.79
7. Pengangkutan dan Komunikasi	575,062.76	617,288.50	662,327.26	715,462.14	782,112.69
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	370,645.06	393,162.64	418,271.35	446,627.18	480,698.34
9. Jasa-jasa	934,457.53	992,276.26	1,034,410.42	1,084,753.16	1,143,884.97
Total PDRB	22,421,165.08	23,671,429.21	25,056,365.22	26,546,186.63	28,151,318.85

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, PDRB Menurut Lapangan Usaha (2004-2008)

Tabel 3.2.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	-5.41	0.15	2.95	-1.21	4.63
2. Pertambangan dan Penggalian	8.22	-7.50	-10.11	8.73	4.79
3. Industri Pengolahan	5.34	5.96	5.91	5.93	5.34
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5.11	5.92	7.23	7.82	8.02
5. Bangunan	5.81	6.68	5.12	4.97	6.55
6. Perdagangan, hotel dan restoran	6.24	6.65	8.13	8.03	8.38
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6.46	7.34	7.30	8.02	9.32
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.68	6.08	6.39	6.78	7.63
9. Jasa-jasa	5.44	6.19	4.25	4.87	5.45
Total PDRB	4.84	5.58	5.85	5.95	6.05

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, PDRB Menurut Lapangan Usaha (2004-2008), telah diolah kembali

Secara umum semua lapangan usaha memperlihatkan pertumbuhan yang positif kecuali sektor pertanian, peternakan dan kehutanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran serta listrik, gas dan air bersih. Laju terendah terdapat pada sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer.

Tabel. 3.2.3 Distribusi Persentase Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2003 – 2007

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	5.98	5.65	5.03	4.67	4.81
2. Pertambangan dan Penggalian	1.53	1.36	1.10	1.14	1.15
3. Industri Pengolahan	63.35	63.73	64.13	64.30	63.72
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3.58	3.63	3.28	3.27	3.27
5. Bangunan	3.10	3.14	3.15	3.23	3.33
6. Perdagangan, hotel dan restoran	14.15	14.21	15.22	15.48	15.85
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2.56	2.58	2.85	2.92	2.90
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.65	1.64	1.59	1.48	1.48
9. Jasa-jasa	4.09	4.06	3.66	3.52	3.48
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, PDRB Menurut Lapangan Usaha (2004-2008), telah diolah kembali

Bila dilihat dari distribusi persentase PDRB tiap lapangan usaha terhadap total PDRB, distribusi terbesar diperlihatkan oleh sektor industri dan pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sementara yang paling kecil persentasenya adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel. 3.2.4. Distribusi Persentase Kelompok Sektor terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2003 – 2007

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1. Sektor Primer	7.51	7.01	6.13	5.81	5.96
2. Sektor Sekunder	70.03	70.50	70.56	70.79	70.32
3. Sektor Tersier	22.45	22.49	23.31	23.40	23.72
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, PDRB Menurut Lapangan Usaha (2004-2008), telah diolah kembali

Adapun struktur ekonomi Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2003-2007, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB harga berlaku, maka kelompok sektor sekunder (sektor industri manufaktur, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan) memberikan kontribusi terbesar, yaitu rata-rata sebesar 70,44 %, kemudian kelompok sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lainnya) dengan rata-rata sebesar 23,07% dan kontribusi terkecil adalah dari sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian), yaitu rata-rata hanya 6,48 % dari total PDRB Kabupaten Bogor dan kontribusi dari kelompok sektor primer ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

3.3. Kebijakan Daerah Kabupaten Bogor

Kebijakan daerah Kabupaten Bogor, bila dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 mempunyai visi “ Kabupaten Bogor Maju Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa.” Makna dari Visi tersebut :

- Maju, berarti masyarakat telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Maju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk terus menyesuaikan diri terhadap perubahan. Tingkat kemajuan dapat diukur berdasarkan kualitas SDM, tingkat kemakmuran, terkendalinya perubahan lingkungan alam dan binaan melalui kesadaran pembangunan yang berkelanjutan, serta kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum
- Sejahtera berarti masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasarnya) dan tentram (gemah ripah, regeh, rapih). Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor diukur berdasarkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan

ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif
3. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri Aman dan Nyaman (TEGAR BERIMAN) dan berkelanjutan adalah membentuk suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju, sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum serta peningkatan pelibatan dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pelayanan umum terus dapat ditingkatkan.

Sasaran pembangunan yang ditetapkan Kabupaten Bogor dalam mencapai misinya, khususnya yang berkaitan dengan misi terwujudnya perekonomian rakyat yang tangguh adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor industri dan perdagangan serta didukung pertanian yang tangguh dan pariwisata yang berbasis masyarakat
2. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kabupaten Bogor, terutama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta tumbuhnya wira usaha baru
3. Meningkatnya pelayanan jaringan infrastruktur transportasi yang andal dan terintegrasi serta terwujudnya kemudahan dan efisiensi bagi pergerakan orang, barang dan jasa
4. Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian
5. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk kemajuan perekonomian daerah
6. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar pemukiman sesuai lingkungan yang sehat dan layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan
7. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat
8. Meningkatnya jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan teknologi informasi (telematika) yang efisien dan modern ke seluruh wilayah
9. Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan, seperti energi hidro, surya, angin, panas bumi dan bio energi lainnya untuk pembangunan daerah
10. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat
11. Meningkatnya investasi di daerah, perluasan lapangan kerja, nilai tambah produk unggulan Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Kabupaten Bogor menurun.

Arah pembangunan daerah menurut RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi : (i) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; (ii) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah
2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi : (i) Kebijakan pengembangan kawasan lindung; (ii) kebijakan pengembangan kawasan budidaya; dan (iii) Kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Sementara itu, dalam kebijakan pengembangan pola ruang, ruang lingkungannya meliputi :

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi : (i) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (ii) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi : (i) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (ii) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi : (i) Pengembangan kawasan strateis puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; (ii) Pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; (iii) pengembangan strategis pertambangan dan penggalian sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; (iv) Pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Berdasarkan kebijakan daerah Kabupaten Bogor tersebut, misi peningkatan kualitas SDM menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah karena merupakan misi pertama. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bogor yang masih berpendidikan rendah (setara SMP kelas satu). Sedangkan arah perekonomian Kabupaten Bogor adalah mengembangkan potensi lokal yang memiliki keunggulan kompetitif di sektor industri dan perdagangan serta didukung pertanian yang tangguh dan pariwisata yang berbasis masyarakat. Dalam mencapai sasaran tersebut perlu disediakan dukungan berupa peningkatan infrastruktur, sumber daya yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.



BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor dianalisis dalam lingkup Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan juga lingkup Nasional. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000, secara *time series* dari tahun 1996 – 2007. Selain itu juga digunakan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha atau sektoral di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara *time series* dari tahun 1996 – 2007. Analisis yang digunakan untuk menganalisis data PDRB adalah analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share* dan Tipologi Klassen, sedangkan untuk menganalisis data tenaga kerja digunakan analisis LQ dan *Shift Share*. Dalam analisis LQ data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 1996 -2007, sedangkan dalam analisis *shift share* dilakukan analisis pada dua titik yaitu pada tahun 1996 – 2000 dan tahun 2001 – 2007. Data yang digunakan dalam Tipologi Klassen adalah data rata-rata dari pertumbuhan masing-masing sektor dan rata-rata proporsi masing-masing sektor dalam PDRB pada tahun 1996 -2007. Analisis selanjutnya adalah untuk menangkap persepsi ahli tentang arah pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Bogor digunakan model *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang dilakukan dengan wawancara dengan para ahli.

4.1. Ekonomi Basis

Kegiatan perekonomian dapat digolongkan menjadi 2 golongan ekonomi basis dan non basis. Ekonomi basis adalah kegiatan perekonomian yang melayani pasar di daerah itu sendiri dan juga daerah di luar daerah sendiri, sedangkan ekonomi non basis adalah kegiatan perekonomian yang melayani pasar di daerah sendiri atau lokal. Dasar pemikiran tehnik ini adalah teori ekonomi basis yaitu kegiatan ekonomi basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah dan di luar daerah yang bersangkutan maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan

bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah memungkinkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan akan sektor ekonomi basis tetapi juga menaikkan permintaan sektor ekonomi non basis (lokal). Kenaikan permintaan itu akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor ekonomi lokal merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari kenaikan sektor ekonomi basis. Oleh karena itu sektor basis patut dikembangkan di suatu daerah (Arsyad, 1999). Perhitungan LQ ini adalah dengan membandingkan proporsi sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB/nilai tambah bruto Kabupaten Bogor dengan proporsi sumbangan sektor yang sama pada PDRB Provinsi Jawa Barat atau PDB Indonesia.

4.1.1. Analisis Ekonomi Basis dengan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

Hasil analisis sektor basis menggunakan analisis *Location Quotient* Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa antara tahun 1996 – 2007, sektor yang dapat dikategorikan sektor basis adalah sektor industri dan pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan yang dapat dikategorikan subsektor basis adalah subsektor : pertambangan tanpa migas, penggalian, industri tanpa migas, listrik, hotel, jasa penunjang angkutan dan sosial kemasyarakatan.

Sektor industri pengolahan selama periode waktu analisis selalu memberikan nilai LQ yang lebih besar dari 1. Sektor industri pengolahan ini adalah industri tanpa migas. Industri tanpa migas ini ditopang oleh industri : (a) Makanan, minuman dan tembakau, (b) tekstil, barang kulit dan alas kaki, (c) barang kayu dan hasil hutan lainnya, (d) kertas dan barang cetakan, (e) pupuk, kimia dan barang dari karet, (f) semen dan barang galian bukan logam, (g) logam dasar besi dan baja, (h) alat angkutan, mesin dan peralatannya (i) barang lainnya. Sektor industri menjadi

sektor basis dapat disebabkan banyaknya industri yang berada di Kabupaten Bogor diantaranya di Citeureup, Cileungsi, Babakan Madang (Kawasan Sentul), Gunung Putri dan Cibinong.

Tabel. 4.1.1. Nilai *Location Quotient* PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 1996 - 2007

LAPANGAN USAHA	Tahun											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. PERTANIAN	0.51	0.50	0.42	0.38	0.42	0.44	0.44	0.41	0.38	0.38	0.38	0.39
a. Tanaman Bahan Makanan	0.39	0.41	0.33	0.28	0.32	0.33	0.33	0.30	0.28	0.29	0.29	0.28
b. Tanaman Perkebunan	0.60	0.67	0.74	0.62	0.72	0.77	0.79	0.64	0.63	0.65	0.64	0.68
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.86	0.81	0.77	0.99	0.89	1.02	0.92	0.87	0.77	0.71	0.70	0.75
d. Kehutanan	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.09	0.09	0.10
e. Perikanan	0.70	0.59	0.58	0.62	0.60	0.55	0.49	0.49	0.51	0.52	0.56	0.63
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.37	0.36	0.44	0.32	0.35	0.37	0.39	0.40	0.40	0.38	0.43	0.48
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas												
c. Penggalian	0.50	0.47										
3. INDUSTRI PENGOLAHAN												
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair												
b. Industri Tanpa Migas **)												
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH												
a. Listrik												
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	0.45	0.37	0.55	0.41	0.42	0.38	0.36	0.38	0.38	0.42	0.43	0.43
5. BANGUNAN	0.99									0.95	0.95	0.93
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	0.69	0.66	0.60	0.70	0.73	0.72	0.74	0.75	0.74	0.77	0.78	0.78
a. Perdagangan Besar & Eceran	0.67	0.64	0.57	0.67	0.70	0.69	0.71	0.71	0.71	0.72	0.73	0.73
b. Hotel												
c. Restoran	0.78	0.75	0.71	0.78	0.82	0.79	0.82	0.85	0.86			
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0.56	0.59	0.52	0.66	0.65	0.63	0.62	0.60	0.58	0.62	0.62	0.62

Tabel. 4.1.1. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	Tahun											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
a. Pengangkutan	0.52	0.52	0.47	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.62	0.65	0.66	0.68
1. Angkutan Rel	0.13	0.12	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.18	0.19	0.20	0.19	0.23
2. Angkutan Jalan Raya	0.65	0.64	0.57	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.67	0.69	0.70	0.71
3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Angk. Sungai, Danau & penyebr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.54	0.54	0.54									
b. Komunikasi	0.80	1.04	0.74	0.76	0.74	0.69	0.65	0.58	0.50	0.55	0.54	0.51
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	0.50	0.48	0.64	0.66	0.60	0.56	0.53	0.52	0.53	0.53	0.56	0.54
a. Bank	0.20	0.18	3.89	0.85	0.48	0.37	0.32	0.32	0.31	0.29	0.34	0.26
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.43	0.43	0.36	0.37	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.34	0.30	0.27
c. Jasa Penunjang Keuangan												
d. Sewa Bangunan	0.88	0.93	0.63	0.78	0.74	0.73	0.70	0.67	0.68	0.72	0.75	0.84
e. Jasa Perusahaan	0.38	0.39	0.40	0.43	0.43	0.41	0.41	0.42	0.45	0.48	0.50	0.51
9. JASA-JASA	0.60	0.60	0.59	0.63	0.68	0.65	0.64	0.61	0.61	0.60	0.58	0.59
a. Pemerintahan Umum	0.45	0.46	0.46	0.48	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.50
b. Swasta	0.83	0.83	0.79	0.87	0.89	0.88	0.85	0.77	0.76	0.73	0.69	0.71
1. Sosial Kemasyarakatan	0.96	0.99	0.99							0.99		1.00
2. Hiburan & Rekreasi	0.73	0.72	0.78	0.78	0.76	0.74	0.67	0.64	0.57	0.57	0.55	0.56
3. Perorangan & Rumah tangga	0.80	0.80	0.74	0.81	0.83	0.83	0.80	0.71	0.71	0.68	0.63	0.66

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, PDRB Menurut Lapangan Usaha (1996-2008), telah diolah kembali

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor basis yang ditopang oleh subsektor listrik. Nilai LQ sektor ini cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan listrik yang meningkat baik yang digunakan oleh industri maupun rumah tangga. Sektor bangunan juga merupakan sektor basis. Sektor ini mencakup pembangunan fisik (konstruksi) baik yang digunakan tempat tinggal atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun yang dilakukan oleh perorangan. Sebagai daerah yang dekat

dengan ibukota negara, Kabupaten Bogor merupakan salah satu tujuan bagi pembangunan tempat tinggal atau pemukiman karena areal pemukiman di Jakarta yang semakin terbatas akibatnya besarnya aktivitas ekonomi yang ada di pusat kota. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan sektor bangunan menjadi sektor memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor.

4.1.2. Analisis Ekonomi Basis dengan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional

Sektor perekonomian di Kabupaten Bogor bila dibandingkan terhadap Nasional menggunakan analisis *Location Quotient* diperoleh hasil bahwa antara tahun 1996–2007, sektor yang dapat dikategorikan sektor basis adalah sektor industri dan pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Sedangkan yang dapat dikategorikan subsektor basis adalah subsektor: industri tanpa migas, listrik, restoran dan angkutan jalan raya.

Tabel. 4.1.2. Nilai *Location Quotient* PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDB Nasional Tahun 1996 – 2007

LAPANGAN USAHA	Tahun											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. PERTANIAN	0.56	0.50	0.42	0.42	0.43	0.45	0.43	0.39	0.38	0.38	0.36	0.37
a. Tanaman Bahan Makanan	0.56	0.56	0.46	0.47	0.48	0.50	0.48	0.43	0.41	0.43	0.40	0.40
b. Tanaman Perkebunan	0.27	0.26	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya				0.99	1.00	1.00	0.95	0.92	0.89	0.83	0.82	0.84
d. Kehutanan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
e. Perikanan	0.27	0.23	0.20	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	0.53	0.50	0.41	0.38	0.36	0.31	0.28	0.30	0.28	0.20	0.18	0.17
c. Penggalian	0.62	0.58	0.75	0.71	0.73	0.72	0.66	0.64	0.62	0.60	0.66	0.68
3. INDUSTRI PENGOLAHAN												
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabel 4.1.2. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	Tahun											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)												
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH												
a. Listrik												
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	0.57	0.52	0.57	0.58	0.58	0.56	0.50	0.51	0.51	0.53	0.54	0.57
5. BANGUNAN	0.66	0.63	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	0.90	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.90	0.89	0.90	0.91
a. Perdagangan Besar & Eceran	0.86	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.89
b. Hotel	0.78	0.83	0.74	0.70	0.73	0.71	0.74	0.76	0.76	0.75	0.76	0.76
c. Restoran												
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.51	0.50	0.47	0.45	0.42	0.40	0.38
a. Pengangkutan	0.52	0.50	0.53	0.55	0.55	0.54	0.55	0.53	0.52	0.52	0.51	0.53
1. Angkutan Rel	0.54	0.51	0.42	0.38	0.37	0.39	0.44	0.51	0.53	0.56	0.55	0.56
2. Angkutan Jalan Raya	0.85	0.79	0.88	0.97		1.00						
3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.38	0.37	0.34	0.33	0.33	0.31	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.29
b. Komunikasi	0.52	0.60	0.51	0.46	0.47	0.44	0.40	0.36	0.31	0.28	0.25	0.23
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18
a. Bank	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	0.42	0.43	0.39	0.44	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39
e. Jasa Perusahaan	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14
9. JASA-JASA	0.41	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44
a. Pemerintahan Umum	0.33	0.34	0.37	0.37	0.38	0.40	0.42	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45
b. Swasta	0.52	0.50	0.51	0.49	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43
1. Sosial Masyarakat	0.41	0.41	0.47	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42
2. Hiburan & Rekreasi	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
3. Perorangan & Rumah tangga	0.64	0.60	0.57	0.55	0.57	0.57	0.55	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

Sektor basis di Kabupaten Bogor di lingkup Nasional ini hasilnya cenderung sama dengan sektor basis di lingkup Jawa Barat, yaitu industri pengolahan dan listrik, gas dan air bersih, hanya untuk lingkup Provinsi Jawa Barat ditambahkan sektor bangunan.

4.2. Shift Share Nilai Tambah

Dalam analisis *shift share* nilai tambah dengan dua titik yaitu tahun 1996 - 2000 dan tahun 2001-2007 terdapat pergeseran dalam nilai *regional share*, *proportional shift* dan *differential shift*, nilai komponen-komponen tersebut yang semula positif dapat berubah menjadi negatif dan sebaliknya yang semula negatif dapat berubah menjadi positif. Hal ini menunjukkan selama periode analisis tersebut terdapat perubahan dari kinerja sektor perekonomian.

4.2.1. Analisis Shift Share Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

Perhitungan *shift share* antara tahun 1996-2000, sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sedangkan pada tahun 2001-2007, nilai *shift share* yang memiliki *differential shift* positif adalah sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran dan pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Bila dilihat pada kedua titik periode tahun tersebut sektor yang selalu memiliki nilai *differential shift* positif adalah sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran, dan pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan subsektor yang memiliki nilai *differential shift* positif pada dua titik periode analisis adalah kehutanan, penggalian, listrik, air bersih, perdagangan besar dan eceran, restoran, pengangkutan dan jasa perusahaan. *Differential shift* yang positif menunjukkan bahwa sektor dan subsektor di daerah tersebut memiliki

keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah atau efisien (Tarigan, 2007).

Tabel. 4.2.1. Nilai *Shift Share* PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	Tahun 1996 – 2000				Tahun 2001-2007			
	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN	-	+	-	6	+	-	-	4
a. Tanaman Bahan Makanan	-	+	-	6	+	-	-	4
b. Tanaman Perkebunan	-	-	+	7	+	-	-	4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-	+	7	+	+	-	2
d. Kehutanan	-	+	+	5	+	-	+	3
e. Perikanan	-	+	-	6	+	-	+	3
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	+	+	5	+	-	+	3
a. Minyak dan Gas Bumi								
b. Pertambangan tanpa Migas	-	+	-	6	+	-	+	3
c. Penggalian	-	-	+	7	+	-	+	3
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	-	+	+	5	+	+	-	2
a. Industri Migas								
1. Pengilangan Minyak Bumi								
2. Gas Alam Cair								
b. Industri Tanpa Migas (**)	-	+	+	5	+	+	-	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	-	+	+	5	+	-	+	3
a. Listrik	-	+	+	5	+	-	+	3
b. Gas								
c. Air Bersih	-	+	+	5	+	-	+	3
5. BANGUNAN	-	-	+	7	+	+	-	2
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	-	-	+	7	+	+	+	1
a. Perdagangan Besar & Eceran	-	-	+	7	+	+	+	1
b. Hotel	-	-	+	7	+	+	-	2
c. Restoran	-	-	+	7	+	-	+	3
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-	-	+	7	+	+	+	1
a. Pengangkutan	-	-	+	7	+	-	+	3
1. Angkutan Rel	-	-	+	7	+	-	+	3
2. Angkutan Jalan Raya	-	-	+	7	+	-	+	3
3. Angkutan Laut								

Tabel 4.2.1. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	Tahun 1996 – 2000				Tahun 2001-2007			
	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.								
5. Angkutan Udara								
6. Jasa Penunjang Angkutan	-	-	+	7	+	-	+	3
b. Komunikasi	-	+	+	5	+	+	-	2
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	-	-	+	7	+	+	-	2
a. Bank	-	-	+	7	+	+	-	2
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	-	+	-	6	+	+	-	2
c. Jasa Penunjang Keuangan	-							
d. Sewa Bangunan	-	+	-	6	+	-	+	3
e. Jasa Perusahaan	-	-	+	7	+	-	+	3
9. JASA-JASA	-	+	+	5	+	+	-	2
a. Pemerintahan Umum	-	-	+	7	+	-	-	4
b. Swasta	-	+	+	5	+	+	-	2
1. Sosial Masyarakat	-	-	+	7	+	+	-	2
2. Hiburan & Rekreasi	-	+	+	5	+	+	-	2
3. Perorangan & Rumahtangga	-	+	+	5	+	+	-	2

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, PDRB Menurut Lapangan Usaha (1996-2008), telah diolah kembali

KETERANGAN HASIL:

1. Sektor Favorit di Jawa Barat dan berkembang baik di Kabupaten Bogor, dapat terus dikembangkan. (R(+), P(+), D(+))
2. Sektor favorit di Jawa Barat namun tidak berkembang baik di Kabupaten Bogor, sebaiknya tidak diprioritaskan (R(+), P(+), D(-))
3. Sektor ini tidak menjadi sektor unggulan di Jawa Barat, namun berkembang baik di Kabupaten Bogor (R(+), P(-), D(+))
4. Sektor ini tidak menjadi unggulan untuk Jawa Barat, dan juga tidak berkembang baik di Kabupaten Bogor. Sebaiknya sektor ini di tinggalkan/tidak di prioritaskan (R(+), P(-), D(-))
5. Sektor ini memberikan harapan untuk terus dikembangkan di Kabupaten Bogor (R(-), P(+), D(+))
6. Sektor ini tidak perlu di prioritaskan (R(-), P(+), D(-))
7. Sektor ini adalah sektor yang sangat kuat (berkembang baik) di Kabupaten Bogor meskipun terjadi penurunan perekonomian Jawa Barat (R(-), P(-), D(+))
8. Sektor ini adalah sektor yang rentan dengan perkembangan perekonomian Jawa Barat. Sektor ini akan ikut terpuruk jika perekonomian Jawa Barat terpuruk (R(-), P(-), D(-))

4.2.2. Analisis *Shift Share* Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Indonesia

Hasil perhitungan *shift share* antara tahun 1996 -2000, sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif terdapat pada sektor listrik, gas dan air bersih, dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sedangkan pada tahun 2001-2007, nilai *shift share* yang memiliki *differential shift* positif terdapat pada sektor industri pengolahan dan perdagangan hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan kedua sektor tersebut memiliki keunggulan/ daya saing daerah. Tidak terdapat sektor yang selalu memiliki nilai *differential shift* positif dalam kedua periode waktu tersebut. Subsektor yang memiliki nilai *differential shift* positif pada dua titik periode analisis adalah kehutanan, listrik, bank dan jasa pemerintahan umum.

Tabel 4.2.2. Nilai *Shift Share* PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDB Nasional Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN	-	+	-	6	+	-	-	4
a. Tanaman Bahan Makanan	-	+	-	6	+	-	-	4
b. Tanaman Perkebunan	-	+	-	6	+	-	-	4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	+	-	6	+	-	-	4
d. Kehutanan	-	+	+	5	+	-	+	3
e. Perikanan	-	+	-	6	+	+	-	2
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	+	-	6	+	-	-	4
a. Minyak dan Gas Bumi								
b. Pertambangan tanpa Migas	-	+	-	6	+	-	-	4
c. Penggalian	-	-	+	7	+	+	-	2
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	-	+	-	6	+	-	+	3
a. Industri Migas								
1. Pengilangan Minyak Bumi								
2. Gas Alam Cair								
b. Industri Tanpa Migas **)	-	+	-	6	+	+	-	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	-	+	+	5	+	+	-	2
a. Listrik	-	+	+	5	+	+	+	1
b. Gas								

Tabel 4.2.2. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
c. Air Bersih	-	+	-	6	+	-	+	3
5. BANGUNAN	-	-	-	8	+	+	-	2
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	-	-	-	8	+	+	+	1
a. Perdagangan Besar & Eceran	-	-	-	8	+	+	+	1
b. Hotel	-	+	-	6	+	+	+	1
c. Restoran	-	-	-	8	+	+	+	1
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-	+	-	6	+	+	-	2
a. Pengangkutan	-	-	+	7	+	+	-	2
1. Angkutan Rel	-	+	-	6	+	-	+	3
2. Angkutan Jalan Raya	-	-	+	7	+	-	+	3
3. Angkutan Laut								
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.								
5. Angkutan Udara								
6. Jasa Penunjang Angkutan	-	+	-	6	+	+	-	2
b. Komunikasi	-	+	-	6	+	+	-	2
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	-	-	+	7	+	+	-	2
a. Bank	-	-	+	7	+	-	+	3
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	-	-	-	8	+	+	+	1
c. Jasa Penunjang Keuangan								
d. Sewa Bangunan	-	-	+	7	+	+	-	2
e. Jasa Perusahaan	-	-	-	8	+	+	-	2
9. JASA-JASA	-	+	+	5	+	-	-	4
a. Pemerintahan Umum	-	+	+	5	+	-	+	3
b. Swasta	-	+	-	6	+	+	-	2
1. Sosial Kemasyarakatan	-	+	+	5	+	+	-	2
2. Hiburan & Rekreasi	-	-	+	7	+	+	-	2
3. Perorangan & Rumah tangga	-	+	-	6	+	+	-	2

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor dan Statistik Indonesia (1996-2008) , telah diolah kembali

Hasil *shift share* terhadap nilai tambah di Kabupaten Bogor terhadap Nasional sektor-sektor yang memiliki keunggulan lokasional cenderung sama

dengan hasil *shift share* terhadap nilai tambah di Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat.

4.3. Kontribusi/Proporsi dan Pertumbuhan PDRB dengan Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen sektoral mengklasifikasi sektor perekonomian berdasarkan rata pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian dalam 4 karakteristik yang berbeda yaitu : (a) sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat/Kuadran I, (b) sektor maju tapi tertekan/ Kuadran II, (c) sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat/ Kuadran III dan (d) sektor relatif tertinggal/Kuadran IV. Sektor-sektor yang berada dalam kuadran I adalah sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang lebih besar dari daerah yang diacunya, kuadran II adalah sektor yang memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih kecil, namun memiliki kontribusi yang lebih besar dari daerah yang diacunya, kuadran III memiliki pertumbuhan yang lebih besar dan namun kontribusinya lebih kecil dari daerah yang diacunya, sedangkan kuadran IV memiliki pertumbuhan dan kontribusinya yang lebih kecil dari daerah yang diacunya. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat maupun Nasional dapat dilihat dalam sub bab dibawah ini :

4.3.1. Analisis Tipologi Klassen Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat, sektor yang termasuk dalam sektor maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sektor yang termasuk sektor maju tapi tertekan adalah sektor industri. Sedangkan sektor yang potensial untuk berkembang adalah sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dan sektor yang relatif tertinggal adalah pertanian. Klasifikasi sektor dan subsektor terdapat pada Tabel 4.3.1.1. dan Tabel 4.3.1.2.

Tabel 4.3.1.1. Klasifikasi Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1996 – 2007

LAPANGAN USAHA	Kabupaten Bogor		Provinsi Jawa Barat		Klasifikasi Tipologi Klassen		
	Rata-rata Pertumbuhan Gi	Rata-rata kontribusi Si	Rata-rata Pertumbuhan G	Rata-rata kontribusi S	gi thd g	si thd s	Kuadran
1. PERTANIAN	-1.468	6.33	-0.497	15.05	<	<	4
a. Tanaman Bahan Makanan	-1.187	3.51	0.336	11.04	<	<	4
b. Tanaman Perkebunan	0.978	0.56	-1.272	0.82	>	<	3
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-2.774	1.84	-2.303	2.20	<	<	4
d. Kehutanan	4.560	0.02	-0.957	0.26	>	<	3
e. Perikanan	1.014	0.41	0.751	0.73	>	<	3
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-0.251	1.44	-3.472	3.74	>	<	3
a. Minyak dan Gas Bumi	0.000	0.00	-1.028	3.27			
b. Pertambangan tanpa Migas	-2.256	0.84	68.581	0.07	<	>	2
c. Penggalian	2.276	0.60	-10.263	0.40	>	>	1
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.904	62.80	3.062	41.74	<	>	2
a. Industri Migas	0.000	0.00	1.261	1.05			
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.000	0.00	1.261	1.05			
2. Gas Alam Cair	0.000	0.00	0.000	0.00			
b. Industri Tanpa Migas **)	2.904	62.80	3.128	40.69	<	>	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.758	3.24	3.860	2.11	>	>	1
a. Listrik	7.793	3.19	4.141	1.80	>	>	1
b. Gas	0.000	0.00	1.010	0.18			
c. Air Bersih	6.034	0.05	6.080	0.13	<	<	4
5. BANGUNAN	-0.327	3.33	-0.519	3.18	>	>	1
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	3.093	14.68	0.828	20.44	>	<	3
a. Perdagangan Besar & Eceran	3.287	11.76	1.314	17.19	>	<	3
b. Hotel	3.709	0.50	1.445	0.39	>	>	1
c. Restoran	2.044	2.41	-2.161	2.85	>	<	3
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.156	2.53	2.308	4.19	>	<	3
a. Pengangkutan	2.818	1.90	-0.348	3.21	>	<	3
1. Angkutan Rel	1.053	0.02	-5.216	0.13	>	<	3
2. Angkutan Jalan Raya	2.952	1.63	0.970	2.47	>	<	3
3. Angkutan Laut	0.000	0.00	2.171	0.12			

Tabel 4.3.1.1. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	Kabupaten Bogor		Provinsi Jawa Barat		Klasifikasi Tipologi Klassen		
	Rata-rata Pertumbuhan Gi	Rata-rata kontribusi Si	Rata-rata Pertumbuhan G	Rata-rata kontribusi S	gi thd g	si thd s	Kuadran
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.000	0.00	-7.496	0.00			
5. Angkutan Udara	0.000	0.00	3.434	0.21			
6. Jasa Penunjang Angkutan	2.106	0.26	-4.592	0.28	>	<	3
b. Komunikasi	8.990	0.63	11.962	0.99	<	<	4
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	2.964	1.66	2.423	3.02	>	<	3
a. Bank	2.424	0.24	36.662	0.75	<	<	4
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	4.333	0.09	7.643	0.26	<	<	4
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.000	0.00	0.000	0.00			
d. Sewa Bangunan	3.171	1.08	2.118	1.44	>	<	3
e. Jasa Perusahaan	2.319	0.25	-1.253	0.57	>	<	3
9. JASA-JASA	3.829	4.00	2.809	6.52	>	<	3
a. Pemerintahan Umum	3.666	1.86	1.685	3.81	>	<	3
b. Swasta	3.972	2.15	4.453	2.70	<	<	4
1. Sosial Kemasyarakatan	5.143	0.50	3.935	0.48	>	>	1
2. Hiburan & Rekreasi	4.180	0.04	5.789	0.07	<	<	4
3. Perorangan & Rumah tangga	3.605	1.60	4.566	2.16	<	<	4

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, PDRB Menurut Lapangan Usaha (1996-2008), telah diolah kembali

Sektor yang termasuk sektor yang tumbuh dengan pesat adalah sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan. Kedua sektor ini adalah sektor yang lebih dipengaruhi oleh sisi permintaan dibandingkan sisi penawaran atau dapat diartikan bahwa kebutuhan dan konsumsi terhadap listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan di Kabupaten Bogor naik dengan pesat. Hal ini dapat disebabkan karena lokasi Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Jakarta dan Kabupaten Bogor memiliki efek limpahan dari Jakarta khususnya dalam sektor bangunan karena kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat karena lahan dan sumber daya di Jakarta yang semakin terbatas maka kebutuhan tersebut dipenuhi oleh Kabupaten Bogor. Peningkatan aktivitas ini juga akan mendorong kebutuhan akan listrik, gas

Tabel. 4.3.1.2. Klasifikasi Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Terhadap Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Barat

<p style="text-align: center;">Kuadran II (Sektor Maju tapi tertekan /jenuh)</p> <p>Subsektor Pertambangan tanpa Migas Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Tanpa Migas</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran I (Sektor Maju dan tumbuh dengan pesat)</p> <p>Subsektor Penggalian Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Subsektor Listrik Sektor Bangunan Subsektor Hotel Subsektor Sosial Kemasyarakatan</p>
<p style="text-align: center;">Kuadran IV Sektor Relatif Tertinggal</p> <p>Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Bahan Makanan Subsektor Peternakan dan Hasil-hasilnya Subsektor Air Bersih Subsektor Komunikasi Subsektor Bank Subsektor Lembaga Keuangan tanpa Bank Subsektor Swasta Subsektor Hiburan & Rekreasi Subsektor Perorangan & Rumah tangga</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran III Sektor Potensial untuk berkembang</p> <p>Subsektor Tanaman Perkebunan Subsektor Kehutanan Subsektor Perikanan Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Subsektor Perdagangan Besar & Eceran Subsektor Restoran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Subsektor Pengangkutan Subsektor Angkutan Rel Subsektor Angkutan Jalan Raya Subsektor Jasa Penunjang Angkutan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Persh. Subsektor Sewa Bangunan Subsektor Jasa Perusahaan Sektor Jasa-jasa Subsektor Pemerintahan Umum</p>

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, PDRB Menurut Lapangan Usaha (1996-2008), telah diolah kembali

dan air bersih. Dalam klasifikasi ini juga dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar yaitu 63 %, namun pertumbuhannya yang lebih rendah dari daerah yang diacunya. Kelompok sektor jasa juga menunjukkan bahwa sektor ini yang potensial untuk berkembang di Kabupaten Bogor. Sedangkan sektor pertanian termasuk ke dalam kategori sektor yang relatif tertinggal. Secara agroklimatologi Kabupaten Bogor sesuai untuk pengembangan pertanian, namun sektor ini termasuk ke dalam sektor yang relatif tertinggal, hal ini dapat disebabkan karena produktivitas di sektor belum maksimal sehingga kontribusi maupun pertumbuhannya bila dibandingkan daerah acuannya yaitu Jawa Barat lebih rendah.

4.3.2. Analisis Tipologi Klasen Nilai Tambah Kabupaten Bogor terhadap Indonesia

Hasil analisis Tipologi Klasen sektoral Kabupaten Bogor terhadap Indonesia mengklasifikasi sektor perekonomian sebagai berikut : Sektor yang termasuk dalam sektor maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor yang termasuk sektor maju tapi tertekan adalah sektor industri. Sedangkan sektor yang potensial untuk berkembang adalah sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sektor yang relatif tertinggal adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Klasifikasi sektor dan subsektor dalam Tipologi Klasen terdapat pada Tabel 4.3.2.1 dan Tabel 4.3.2.2.

Tabel 4.3.2.1. Klasifikasi Tipologi Klasen PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDB Nasional Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1996 – 2007

LAPANGAN USAHA	Kabupaten Bogor		Indonesia		Klasifikasi Tipologi Klasen		
	Rata-rata pertumbuhan g	Rata-rata kontribusi Si	Rata-rata pertumbuhan g	Rata-rata kontribusi S	g thd g	si thd s	Kuadran
1. PERTANIAN	-1.468	6.33	2.451	14.91	<	<	4
a. Tanaman Bahan Makanan	-1.187	3.51	1.863	7.54	<	<	4
b. Tanaman Perkebunan	0.978	0.56	2.963	2.32	<	<	4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-2.774	1.84	2.887	1.83	<	>	2
d. Kehutanan	4.560	0.02	0.123	1.10	>	<	3
e. Perikanan	1.014	0.41	5.082	2.12	<	<	4
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-0.251	1.44	0.389	10.77	<	<	4
a. Minyak dan Gas Bumi	0.000	0.00	-2.421	7.15			
b. Pertambangan tanpa Migas	-2.256	0.84	8.542	2.72	<	<	4
c. Penggalian	2.276	0.60	2.244	0.91	>	<	3
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.904	62.80	3.439	27.39	<	>	2
a. Industri Migas	0.000	0.00	-0.551	3.35			
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.000	0.00	0.073	1.39			
2. Gas Alam Cair	0.000	0.00	-0.893	1.96			

Tabel. 4.3.2.1. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	Kabupaten Bogor		Indonesia		Klasifikasi Tipologi Klassen		
	Rata-rata pertumbuhan	Rata-rata kontribusi	Rata-rata pertumbuhan	Rata-rata kontribusi	g	si	Kuadran
b. Industri Tanpa Migas **)	2.904	62.80	3.991	24.04	<	>	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.758	3.24	7.250	0.60	>	>	1
a. Listrik	7.793	3.19	6.919	0.42	>	>	1
b. Gas	0.000	0.00	10.161	0.09			
c. Air Bersih	6.034	0.05	6.359	0.10	<	<	4
5. BANGUNAN	-0.327	3.33	2.071	6.04	<	<	4
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	3.093	14.68	3.240	16.50	<	<	4
a. Perdagangan Besar & Eceran	3.287	11.76	3.233	13.61	>	<	3
b. Hotel	3.709	0.50	4.046	0.66	<	<	4
c. Restoran	2.044	2.41	3.083	2.23	<	>	2
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.156	2.53	7.512	5.37	<	<	4
a. Pengangkutan	2.818	1.90	3.051	3.60	<	<	4
1. Angkutan Rel	1.053	0.02	0.998	0.04	>	<	3
2. Angkutan Jalan Raya	2.952	1.63	1.215	1.67	>	<	3
3. Angkutan Laut	0.000	0.00	4.353	0.47			
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.000	0.00	2.248	0.14			
5. Angkutan Udara	0.000	0.00	7.210	0.45			
6. Jasa Penunjang Angkutan	2.106	0.26	4.680	0.82	<	<	4
b. Komunikasi	8.990	0.63	17.403	1.77	<	<	4
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	2.964	1.66	1.837	9.26	>	<	3
a. Bank	2.424	0.24	-0.433	4.46	>	<	3
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	4.333	0.09	5.330	0.67	<	<	4
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.000	0.00	3.897	0.06			
d. Sewa Bangunan	3.171	1.08	3.719	2.57	<	<	4
e. Jasa Perusahaan	2.319	0.25	4.609	1.49	<	<	4
9. JASA-JASA	3.829	4.00	3.528	9.16	>	<	3
a. Pemerintahan Umum	3.666	1.86	1.114	4.65	>	<	3
b. Swasta	3.972	2.15	6.109	4.51	<	<	4
1. Sosial Kemasyarakatan	5.143	0.50	5.446	1.19	<	<	4
2. Hiburan & Rekreasi	4.180	0.04	3.266	0.37	>	<	3
3. Perorangan & Rumah tangga	3.605	1.60	6.842	2.95	<	<	4

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

Tabel. 4.3.2.2. Klasifikasi Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor Terhadap Sektor Perekonomian Nasional

<p style="text-align: center;">Kuadran II (Sektor Maju tapi tertekan /jenuh)</p> <p>Subsektor Peternakan dan Hasil-hasilnya Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Tanpa Migas Subsektor Restoran</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran I (Sektor Maju dan tumbuh dengan pesat)</p> <p>Sektor Listrik, gas dan air bersih Subsektor Listrik</p>
<p style="text-align: center;">Kuadran IV Sektor Relatif Tertinggal</p> <p>Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Bahan Makanan Subsektor Tanaman Perkebunan Subsektor Perikanan Sektor Pertambangan dan Penggalian Subsektor Pertambangan tanpa Migas Subsektor Air Bersih Sektor Bangunan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Subsektor Hotel Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Subsektor Jasa Penunjang Angkutan Subsektor Komunikasi Subsektor Lembaga Keuangan tanpa Bank Subsektor Sewa Bangunan Subsektor Jasa Perusahaan Subsektor Swasta Subsektor Sosial Kemasyarakatan Subsektor Perorangan & Rumah tangga</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran III Sektor Potensial untuk berkembang</p> <p>Subsektor Kehutanan Subsektor Penggalian Subsektor Perdagangan Besar & Eceran Subsektor Angkutan Rel Subsektor Angkutan Jalan Raya Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh. Subsektor Bank Sektor Jasa-jasa Subsektor Pemerintahan Umum Subsektor Hiburan & Rekreasi</p>

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor dan Statistik Indonesia (1996-2008) , telah diolah kembali

Industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar, namun pertumbuhannya lebih lambat bila dibandingkan baik dengan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Rata-rata kontribusinya 63% sedangkan rata-rata nasional hanya 27%, namun pertumbuhannya lebih kecil yaitu 3% sedangkan nasional adalah 3,5%. Namun demikian dengan kontribusi yang besar dan masih tumbuh, sektor ini perlu diperhitungkan sebagai sektor yang penting bagi Kabupaten Bogor. Sektor listrik,

gas dan air bersih adalah sektor yang merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat baik dengan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Sedangkan sektor pertanian juga merupakan sektor yang selalu diklasifikasikan sebagai sektor yang relatif tertinggal baik terhadap Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Hal ini menunjukkan bila dibandingkan daerah acuannya sektor pertanian memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang lebih rendah, selain dapat disebabkan produktivitas pertanian yang masih rendah juga dapat disebabkan karena Kabupaten Bogor mengalami perubahan struktur produksi yaitu makin meningkatnya peran sektor non pertanian dan makin menurunnya sektor pertanian. Perbedaan hasil analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bogor bila mengacu terhadap Provinsi Jawa Barat dan terhadap nasional adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang relatif tertinggal bila dibandingkan nasional. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bogor memiliki keunggulan dalam sektor tersebut di Jawa Barat namun bila dibandingkan dengan nasional pertumbuhan dan kontribusinya masih lebih rendah.

4.4. Pemetaan Potensi Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

Dengan menggabungkan semua hasil analisis dengan tehnik overlay diperoleh hasil sektor-sektor yang diprioritaskan dalam perekonomian Kabupaten Bogor. Indikator sektor-sektor yang perlu diprioritaskan ditekankan pada nilai LQ yang lebih besar dari 1, memiliki *differential shift* positif dan kategori Tipologi Klassen dalam Kuadran I, II dan III. Dari hasil perhitungan, sektor yang perlu diprioritaskan adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan subsektor yang perlu diprioritaskan pertama adalah pertambangan tanpa migas, penggalian, listrik, hotel, jasa penunjang angkutan dan jasa sosial kemasyarakatan.

Tabel 4.4.1. Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996 - 2007

LAPANGAN USAHA	LQ	Klassen	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
	Tahun	Kuadran	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN		4	-	+	-	6	+	-	-	4
a. Tanaman Bahan Makanan		4	-	+	-	6	+	-	-	4
b. Tanaman Perkebunan		3	-	-	+	7	+	-	-	4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya		4	-	-	+	7	+	+	-	2
d. Kehutanan		3	-	+	+	5	+	-	+	3
e. Perikanan		3	-	+	-	6	+	-	+	3
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN		3	-	+	+	5	+	-	+	3
a. Minyak dan Gas Bumi										
b. Pertambangan tanpa Migas	12	2	-	+	-	6	+	-	+	3
c. Penggalian	10	1	-	-	+	7	+	-	+	3
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12	2	-	+	+	5	+	+	-	2
a. Industri Migas										
1. Pengilangan Minyak Bumi										
2. Gas Alam Cair										
b. Industri Tanpa Migas (**)	12	2	-	+	+	5	+	+	-	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	12	1	-	+	+	5	+	-	+	3
a. Listrik	12	1	-	+	+	5	+	-	+	3
b. Gas										
c. Air Bersih		4	-	+	+	5	+	-	+	3
5. BANGUNAN	8	1	-	-	+	7	+	+	-	2
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN		3	-	-	+	7	+	+	+	1
a. Perdagangan Besar & Eceran		3	-	-	+	7	+	+	+	1
b. Hotel	12	1	-	-	+	7	+	+	-	2
c. Restoran	3	3	-	-	+	7	+	-	+	3
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI		3	-	-	+	7	+	+	+	1
a. Pengangkutan		3	-	-	+	7	+	-	+	3
1. Angkutan Rel		3	-	-	+	7	+	-	+	3
2. Angkutan Jalan Raya		3	-	-	+	7	+	-	+	3
3. Angkutan Laut										
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.										
5. Angkutan Udara										
6. Jasa Penunjang Angkutan	9	3	-	-	+	7	+	-	+	3
b. Komunikasi		4	-	+	+	5	+	+	-	2

Tabel. 4.4.1. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	LQ	Klassen	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
	Tahun	Kuadran	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.		3	-	-	+	7	+	+	-	2
a. Bank		4	-	-	+	7	+	+	-	2
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank		4	-	+	-	6	+	+	-	2
c. Jasa Penunjang Keuangan			-							
d. Sewa Bangunan		3	-	+	-	6	+	-	+	3
e. Jasa Perusahaan		3	-	-	+	7	+	-	+	3
9. JASA-JASA		3	-	+	+	5	+	+	-	2
a. Pemerintahan Umum		3	-	-	+	7	+	-	-	4
b. Swasta		4	-	+	+	5	+	+	-	2
1. Sosial Kemasyarakatan	7	1	-	-	+	7	+	+	-	2
2. Hiburan & Rekreasi		4	-	+	+	5	+	+	-	2
3. Perorangan & Rumah tangga		4	-	+	+	5	+	+	-	2

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, PDRB Menurut Lapangan Usaha (1996-2008), telah diolah kembali

Tabel. 4.4.2. Pemetaan Prioritas Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996 – 2007

LAPANGAN USAHA	LQ	1996-2000			2001 - 2007			Periode	Periode	Klassen
	Tahun	Rs	Ps	Ds	Rs	Ps	Ds	1996-2000	2001-2007	Kuadran
1. PERTANIAN		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
a. Tanaman Bahan Makanan		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
b. Tanaman Perkebunan		-	-	+	+	-	-	prio 3	prio 3	3
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	4
d. Kehutanan		-	+	+	+	-	+	prio 2	prio 3	3
e. Perikanan		-	+	-	+	-	+	prio 3	prio 3	3
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN		-	+	+	+	-	+	prio 2	prio 3	3
a. Minyak dan Gas Bumi										
b. Pertambangan tanpa Migas	12	-	+	-	+	-	+	prio 1	prio 1	2
c. Pengalihan	10	-	-	+	+	-	+	prio 1	prio 1	1
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12	-	+	+	+	+	-	prio 1	prio 1	2
a. Industri Migas										
1. Pengilangan Minyak Bumi										

Tabel. 4.4.2. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	LQ	1996-2000			2001-2007			Periode	Periode	Klassen
	Tahun	Rs	Ps	Ds	Rs	Ps	Ds	1996-2000	2001-2007	Kuadran
2. Gas Alam Cair										
b. Industri Tanpa Migas **)	12	-	+	+	+	+	-	prio 1	prio 1	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	12	-	+	+	+	-	+	prio 1	prio 1	1
a. Listrik	12	-	+	+	+	-	+	prio 1	prio 1	1
b. Gas										
c. Air Bersih		-	+	+	+	-	+	prio 2	prio 3	4
5. BANGUNAN	8	-	-	+	+	+	-	prio 1	prio 1	1
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN		-	-	+	+	+	+	prio 3	prio 2	3
a. Perdagangan Besar & Eceran		-	-	+	+	+	+	prio 3	prio 2	3
b. Hotel	12	-	-	+	+	+	-	prio 1	prio 1	1
c. Restoran	3	-	-	+	+	-	+	prio 3	prio 1	3
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI		-	-	+	+	+	+	prio 3	prio 2	3
a. Pengangkutan		-	-	+	+	-	+	prio 3	prio 3	3
1. Angkutan Rel		-	-	+	+	-	+	prio 3	prio 3	3
2. Angkutan Jalan Raya		-	-	+	+	-	+	prio 3	prio 3	3
3. Angkutan Laut										
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.										
5. Angkutan Udara										
6. Jasa Penunjang Angkutan	9	-	-	+	+	-	+	prio 1	prio 1	3
b. Komunikasi		-	+	+	+	+	-	prio 2	prio 3	4
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	3
a. Bank		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	4
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
c. Jasa Penunjang Keuangan		-								
d. Sewa Bangunan		-	+	-	+	-	+	prio 3	prio 3	3
e. Jasa Perusahaan		-	-	+	+	-	+	prio 3	prio 3	3
9. JASA-JASA		-	+	+	+	+	-	prio 2	prio 3	3
a. Pemerintahan Umum		-	-	+	+	-	-	prio 3	prio 3	3
b. Swasta		-	+	+	+	+	-	prio 2	prio 3	4
1. Sosial Kemasyarakatan	7	-	-	+	+	+	-	prio 1	prio 1	1
2. Hiburan & Rekreasi		-	+	+	+	+	-	prio 2	prio 3	4
3. Perorangan & Rumah tangga		-	+	+	+	+	-	prio 2	prio 3	4

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, PDRB Menurut Lapangan Usaha (1996-2008), telah diolah kembali

Hasil gabungan semua hasil analisis dengan tehnik overlay, sektor yang perlu diprioritaskan adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Industri pengolahan di Kabupaten Bogor terdiri dari industri besar, menengah dan industri kecil yang berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor selalu meningkat. Peningkatan jumlah industri ini dapat mengindikasikan bahwa sektor ini mampu berkembang di dalam perekonomian. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan ini seperti telah dipaparkan terdahulu dapat disebabkan karena adanya kebutuhan akan sektor ini yang meningkat dan adanya efek limpahan dari Jakarta. Beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Bogor sehubungan dengan hal tersebut adalah banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor juga menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Industri juga banyak dibangun di Kabupaten Bogor seperti di Cibinong, Citeureup dan Cileungsi. Keberadaan industri ini akan meningkatkan kebutuhan listrik selain kebutuhan listrik rumah tangga.

4.5. Pemetaan Potensi Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor terhadap Nasional

Pemetaan potensi sektor perekonomian Kabupaten Bogor terhadap Nasional dengan menggabungkan semua hasil analisis dengan tehnik overlay diperoleh hasil sektor-sektor yang diprioritaskan dalam perekonomian Kabupaten Bogor. Sektor yang perlu diprioritaskan pertama sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih. Sedangkan sub sektor yang perlu diprioritaskan pertama adalah industri tanpa migas, listrik, restoran dan angkutan jalan raya.

Tabel 4.5.1. Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor terhadap Nasional Tahun 1996 - 2007

LAPANGAN USAHA	IQ	Klassen	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
		Kuadran	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN		4	-	+	-	6	+	-	-	4
a. Tanaman Bahan Makanan		4	-	+	-	6	+	-	-	4
b. Tanaman Perkebunan		4	-	+	-	6	+	-	-	4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3	2	-	+	-	6	+	-	-	4
d. Kehutanan		3	-	+	+	5	+	-	+	3
e. Perikanan		4	-	+	-	6	+	+	-	2
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN		4	-	+	-	6	+	-	-	4
a. Minyak dan Gas Bumi										
b. Pertambangan tanpa Migas		4	-	+	-	6	+	-	-	4
c. Penggalian		3	-	-	+	7	+	+	-	2
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12	2	-	+	-	6	+	-	+	3
a. Industri Migas										
1. Pengilangan Minyak Bumi										
2. Gas Alam Cair										
b. Industri Tanpa Migas **)	12	2	-	+	-	6	+	+	-	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	12	1	-	+	+	5	+	+	-	2
a. Listrik	12	1	-	+	+	5	+	+	+	1
b. Gas										
c. Air Bersih		4	-	+	-	6	+	-	+	3
5. BANGUNAN		4	-	-	-	8	+	+	-	2
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN		4	-	-	-	8	+	+	+	1
a. Perdagangan Besar & Eceran		3	-	-	-	8	+	+	+	1
b. Hotel		4	-	+	-	6	+	+	+	1
c. Restoran	12	2	-	-	-	8	+	+	+	1
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI		4	-	+	-	6	+	+	-	2
a. Pengangkutan		4	-	-	+	7	+	+	-	2
1. Angkutan Rel		3	-	+	-	6	+	-	+	3
2. Angkutan Jalan Raya	7	3	-	-	+	7	+	-	+	3
3. Angkutan Laut										
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.										
5. Angkutan Udara										
6. Jasa Penunjang Angkutan		4	-	+	-	6	+	+	-	2
b. Komunikasi		4	-	+	-	6	+	+	-	2

i

Tabel 4.5.1. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	LQ	Klasen	Tahun 1996-2000				Tahun 2001-2007			
			Kuadran	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.		3	-	-	+	7	+	+	-	2
a. Bank		3	-	-	+	7	+	-	+	3
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank		4	-	-	-	8	+	+	+	1
c. Jasa Penunjang Keuangan										
d. Sewa Bangunan		4	-	-	+	7	+	+	-	2
e. Jasa Perusahaan		4	-	-	-	8	+	+	-	2
9. JASA-JASA		3	-	+	+	5	+	-	-	4
a. Pemerintahan Umum		3	-	+	+	5	+	-	+	3
b. Swasta		4	-	+	-	6	+	+	-	2
1. Sosial Kemasyarakatan		4	-	+	+	5	+	+	-	2
2. Hiburan & Rekreasi		3	-	-	+	7	+	+	-	2
3. Perorangan & Rumah tangga		4	-	+	-	6	+	+	-	2

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

Tabel 4.5.2. Pemetaan Prioritas Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor terhadap Nasional Tahun 1996 - 2007

LAPANGAN USAHA	LQ	Tahun 1996-2000			Tahun 2001-2007			Periode	Periode	Klasen
		Rs	Ps	Ds	Rs	Ps	Ds	1996-2000	2001-2007	Kuadran
1. PERTANIAN		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
a. Tanaman Bahan Makanan		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
b. Tanaman Perkebunan		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3	-	+	-	+	-	-	prio 1	prio 3	2
d. Kehutanan		-	+	+	+	-	+	prio 2	prio 3	3
e. Perikanan		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
a. Minyak dan Gas Bumi										
b. Pertambangan tanpa Migas		-	+	-	+	-	-	prio 3	prio 3	4
c. Penggalan		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	3
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12	-	+	-	+	-	+	prio 1	prio 1	2
a. Industri Migas										
1. Pengilangan Minyak Bumi										
2. Gas Alam Cair										

Tabel. 4.5.2. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	LQ	Tahun 1996-2000			Tahun 2001-2007			Periode	Periode	Klassen
		Rs	Ps	Ds	Rs	Ps	Ds	1996-2000	2001-2007	Kuadran
b. Industri Tanpa Migas **)	12	-	+	-	+	+	-	prio 1	prio 1	2
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	12	-	+	+	+	+	-	prio 1	prio 1	1
a. Listrik	12	-	+	+	+	+	+	prio 1	prio 1	1
b. Gas										
c. Air Bersih		-	+	-	+	-	+	prio 3	prio 3	4
5. BANGUNAN		-	-	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN		-	-	-	+	+	+	prio 3	prio 2	4
a. Perdagangan Besar & Eceran		-	-	-	+	+	+	prio 3	prio 2	3
b. Hotel		-	+	-	+	+	+	prio 3	prio 2	4
c. Restoran	12	-	-	-	+	+	+	prio 2	prio 1	2
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
a. Pengangkutan		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	4
1. Angkutan Rel		-	+	-	+	-	+	prio 3	prio 3	3
2. Angkutan Jalan Raya	7	-	-	+	+	-	+	prio 1	prio 1	3
3. Angkutan Laut										
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.										
5. Angkutan Udara										
6. Jasa Penunjang Angkutan		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
b. Komunikasi		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	3
a. Bank		-	-	+	+	-	+	prio 3	prio 3	3
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank		-	-	-	+	+	+	prio 3	prio 2	4
c. Jasa Penunjang Keuangan										
d. Sewa Bangunan		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	4
e. Jasa Perusahaan		-	-	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
9. JASA-JASA		-	+	+	+	-	-	prio 2	prio 3	3
a. Pemerintahan Umum		-	+	+	+	-	+	prio 2	prio 3	3
b. Swasta		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4
1. Sosial Masyarakat		-	+	+	+	+	-	prio 2	prio 3	4
2. Hiburan & Rekreasi		-	-	+	+	+	-	prio 3	prio 3	3
3. Perorangan & Rumah tangga		-	+	-	+	+	-	prio 3	prio 3	4

Sumber : BPS Kabupaten Bogor dan BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bogor dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

Hasil gabungan semua hasil analisis dengan tehnik overlay sektor yang perlu diprioritaskan dalam lingkup Nasional maupun Provinsi Jawa Barat adalah sama untuk sektor industri pengolahan dan listrik, gas dan air bersih, hanya saja untuk Provinsi Jawa Barat ditambahkan sektor bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan gabungan analisis tersebut industri pengolahan memiliki keunggulan baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Nasional.

4.6. Ekonomi Basis Penduduk Bekerja

Analisis ekonomi basis terhadap penduduk yang bekerja di Kabupaten Bogor juga dilakukan terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Analisis ekonomi basis terhadap penduduk yang bekerja baik terhadap Provinsi Jawa Barat maupun Nasional dapat dilihat dalam sub bab di bawah ini.

4.6.1. Analisis Ekonomi Basis Penduduk Bekerja dengan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan perhitungan nilai LQ dari penduduk bekerja, hampir seluruh sektor perekonomian merupakan sektor basis kecuali sektor pertanian. Sektor yang selama periode waktu 1996 -2007 selalu menjadi sektor basis adalah sektor industri dan sektor jasa-jasa.

Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kapasitas ekspor terhadap penduduk bekerja di semua sektor kecuali pertanian. Khususnya untuk sektor industri dan jasa-jasa selama periode 12 tahun ini selalu menjadi sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat perubahan struktur ekonomi bila dilihat dari penduduk bekerja yaitu lebih cenderung ke sektor non pertanian.

Tabel. 4.6.1.1. Nilai LQ Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996 - 2007

LAPANGAN USAHA	Tahun											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. PERTANIAN	0.67	0.50	0.51	0.53	0.83	0.84	0.85	0.55	0.68	0.76	0.72	0.74
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.84	1.31	1.05	1.27	1.14	1.66	2.19	1.36	1.72	0.85	1.75	2.32
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.33	1.28	1.21	1.34	1.10	1.16	0.50	1.36	1.28	1.31	1.13	1.26
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.16	0.42	0.94	0.78	0.84	0.52	1.09	1.91	1.52	1.92	1.23	0.79
5. BANGUNAN	1.23	1.08	1.50	1.13	1.20	1.01	1.15	1.06	1.12	1.14	1.08	1.00
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.14	1.27	1.24	1.16	0.97	0.89	1.06	1.21	1.09	0.99	1.03	0.90
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.03	1.03	1.14	0.94	1.00	1.03	1.25	1.10	1.03	0.95	0.96	1.03
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	0.56	1.03	1.12	0.84	0.68	1.27	1.24	1.45	0.51	0.34	0.91	1.59
9. JASA-JASA	1.12	1.29	1.30	1.37	1.16	1.38	1.10	1.25	1.16	1.15	1.27	1.19
LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	0.91	2.82	-	-	0.64	1.15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Jawa Barat dalam Angka (1996-2008) , telah diolah kembali

4.6.2. Analisis Ekonomi Basis Penduduk Bekerja dengan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bogor terhadap Nasional

Berdasarkan perhitungan nilai LQ dari penduduk bekerja Kabupaten Bogor terhadap Nasional hampir seluruh sektor perekonomian merupakan sektor basis kecuali sektor pertanian (Tabel 4.6.2). Sektor yang selama periode waktu 1996-2007 selalu menjadi sektor basis adalah sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor yang menjadi sektor basis baik dengan acuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sama yaitu semua sektor kecuali pertanian. Demikian juga untuk sektor yang konsisten selama 12 tahun selalu menjadi sektor basis juga sama yaitu industri pengolahan dan jasa-jasa, namun untuk nasional ditambahkan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kapasitas ekspor untuk penduduk bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian dan sektor yang konsisten menjadi sektor basis adalah sektor industri pengolahan dan jasa-jasa baik di Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Tabel 4.6.2. Nilai LQ Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terhadap Nasional Tahun 1996 – 2007

LAPANGAN USAHA	Tahun											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. PERTANIAN	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.4	0.7	0.7
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.7	1.7	1.5	1.6	1.2	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	1.6	1.6
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
5. BANGUNAN	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	0.9
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5
9. JASA-JASA	1.5	1.5	1.2	1.4	1.5	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.6	1.7
LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	24.6	41.0	-	-	2.1	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS, Jawa Barat dalam Angka dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

4.7. Analisis *Shift Share* Penduduk Bekerja

4.7.1. Analisis *Shift Share* Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

Perhitungan *shift share* penduduk bekerja selama dua titik periode waktu, menghasilkan nilai yang berbeda. Pada periode tahun 1996-2000 *differential shift* positif terdapat pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sedangkan pada tahun 2001-2007 sektor yang memiliki *differential shift* positif adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor yang dalam dua periode merupakan memiliki *differential shift* positif adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel.4.7.1. Nilai *Shift Share* Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	Tahun 1996 – 2000				Tahun 2001-2007			
	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN	+	-	+	3.00	+	-	-	4.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	+	-	+	3.00	+	+	-	2.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	+	+	-	3.00	+	-	+	3.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	+	-	-	4.00	+	+	+	1.00
5. BANGUNAN	+	-	-	4.00	+	-	+	3.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	+	+	-	2.00	+	+	+	1.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	+	+	-	2.00	+	-	+	3.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	+	-	+	3.00	+	-	+	3.00
9. JASA-JASA	+	-	+	3.00	+	+	-	2.00
JUMLAH/TOTAL	+	+	-		+	+	+	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Jawa Barat dalam Angka (1996-2008) , telah diolah kembali

Dari hasil perhitungan *shift share* penduduk bekerja yang menarik adalah bahwa sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian (sektor primer) menjadi sektor yang memiliki keunggulan pada periode tahun 1996-2000, namun pada tahun 2001-2007 sektor ini digantikan dengan sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi dari penduduk yang bekerja.

4.7.2. Analisis *Shift Share* Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Nasional

Perhitungan *shift share* pada periode tahun 1996-2000 *differential shift* positif terdapat pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Sedangkan pada tahun 2001-2007 sektor yang memiliki *differential shift* positif adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sektor yang dalam dua periode merupakan memiliki *differential shift* positif adalah sektor pertambangan dan penggalian dan jasa-jasa.

Tabel 4.7.2 . Nilai *Shift Share* Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Tenaga Kerja Nasional Tahun 1996-2000 dan Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN	+	+	+	1.00	+	-	-	4.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	+	-	+	3.00	+	-	+	3.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	+	+	-	2.00	+	-	+	3.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	+	-	-	4.00	+	+	+	1.00
5. BANGUNAN	+	-	-	4.00	+	+	-	2.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	+	+	-	2.00	+	+	+	1.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	+	+	+	1.00	+	+	-	2.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	+	+	-	2.00	+	+	+	1.00
9. JASA-JASA	+	-	+	3.00	+	-	+	3.00
JUMLAH/TOTAL	+	-	+		+	+	+	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS, Jawa Barat dalam Angka dan Statistik Indonesia (1996-2008) , telah diolah kembali

Dari hasil perhitungan *shift share* penduduk bekerja dengan mengacu Nasional, yang menarik adalah bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki keunggulan pada periode tahun 1996-2000, sedangkan pada tahun 2001-2007 sektor pertanian digantikan dengan sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Apabila mengacu pada Provinsi Jawa Barat maupun Nasional sektor pertanian pada periode 1996-2001 untuk penduduk bekerja menjadi sektor yang memiliki keunggulan, namun pada periode selanjutnya sektor ini digantikan oleh terutama sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan struktur yang semula sektor pertanian menjadi sektor manufaktur dan jasa-jasa.

4.8. Pemetaan Potensi Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor berdasarkan penduduk yang bekerja

Pemetaan potensi sektor perekonomian Kabupaten Bogor berdasarkan penduduk yang bekerja dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis LQ dan *shift share*. Teknik overlay antara sektor perekonomian Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat menghasilkan yang perlu diprioritaskan pertama adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor perekonomian Kabupaten Bogor terhadap Nasional yang perlu diprioritaskan pertama adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa.

Tabel. 4.8.1. Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

LAPANGAN USAHA	LQ	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
		Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN		+	-	+	3.00	+	-	-	4.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	10	+	-	+	3.00	+	+	-	2.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	11	+	+	-	3.00	+	-	+	3.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6	+	-	-	4.00	+	+	+	1.00
5. BANGUNAN	11	+	-	-	4.00	+	-	+	3.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	8	+	+	-	2.00	+	+	+	1.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8	+	+	-	2.00	+	-	+	3.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	6	+	-	+	3.00	+	-	+	3.00
9. JASA-JASA	12	+	-	+	3.00	+	+	-	2.00
JUMLAH/TOTAL		+	+	-		+	+	+	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Jawa Barat dalam Angka (1996-2008) , telah diolah kembali

Tabel. 4.8.2. Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Nasional

LAPANGAN USAHA	LQ	Tahun 1996 - 2000				Tahun 2001-2007			
		Rs	Ps	Ds	Kode Hasil	Rs	Ps	Ds	Kode Hasil
1. PERTANIAN		+	+	+	1.00	+	-	-	4.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	8	+	-	+	3.00	+	-	+	3.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12	+	+	-	2.00	+	-	+	3.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	9	+	-	-	4.00	+	+	+	1.00
5. BANGUNAN	11	+	-	-	4.00	+	+	-	2.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	12	+	+	-	2.00	+	+	+	1.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	12	+	+	+	1.00	+	+	-	2.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	8	+	+	-	2.00	+	+	+	1.00
9. JASA-JASA	12	+	-	±	3.00	+	-	±	3.00
JUMLAH/TOTAL		+	-	+		+	+	+	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS, Jawa Barat dalam Angka dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

Tabel. 4.8.3. Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat

LAPANGAN USAHA	LQ	1996 - 2000			2001-2007			Periode	
		Rs	Ps	Ds	Rs	Ps	Ds	1996-2000	2001-2007
1. PERTANIAN		+	-	+	+	-	-	prio 3	prio 3
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	10	+	-	+	+	+	-	prio 1	prio 1
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	11	+	+	-	+	-	+	prio 1	prio 1
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6	+	-	-	+	+	+	prio 2	prio 1
5. BANGUNAN	11	+	-	-	+	-	+	prio 2	prio 1
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	8	+	+	-	+	+	+	prio 1	prio 1
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8	+	+	-	+	-	+	prio 1	prio 1
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	6	+	-	+	+	-	+	prio 1	prio 1
9. JASA-JASA	12	+	-	+	+	+	-	prio 1	prio 1
JUMLAH/TOTAL		±	±	-	±	±	±		

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat dalam Angka (1996-2008), telah diolah kembali

Tabel. 4.8.4. Pemetaan Potensi Ekonomi Berdasarkan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhadap Nasional

LAPANGAN USAHA	LQ	2001-2007			2001-2007			Periode	Periode
		Rs	Ps	Ds	Rs	Pa	Ds	1996-2000	2001-2007
1. PERTANIAN		+	+	+	+	-	-	prio 2	prio 3
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN	8	+	-	+	+	-	+	prio 1	prio 1
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12	+	+	-	+	-	+	prio 1	prio 1
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	9	+	-	-	+	+	+	prio 2	prio 1
5. BANGUNAN	11	+	-	-	+	+	-	prio 1	prio 1
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	12	+	+	-	+	+	+	prio 1	prio 1
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	12	+	+	+	+	+	-	prio 1	prio 1
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	8	+	+	-	+	+	+	prio 1	prio 1
9. JASA-JASA	12	+	-	+	+	-	+	prio 1	prio 1
JUMLAH/TOTAL		+	-	+	+	+	+		

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS, Jawa Barat dalam Angka dan Statistik Indonesia (1996-2008), telah diolah kembali

Pemetaan potensi sektor perekonomian Kabupaten Bogor berdasarkan penduduk yang bekerja baik di Provinsi Jawa Barat maupun Nasional adalah semua sektor kecuali pertanian, listrik, gas dan air bersih. Apabila mengacu pada Provinsi Jawa Barat sektor bangunan juga bukan yang menjadi prioritas. Seperti telah dipaparkan terdahulu perubahan struktur produksi menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor yang cenderung menurun dan digantikan sektor non pertanian (sektor sekunder dan tersier).

4.9. Hasil Analisis Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor berdasarkan Nilai Tambah dan Penduduk Bekerja

Hasil analisis sektor perekonomian berdasarkan nilai tambah di Kabupaten Bogor terhadap Jawa Barat diperoleh hasil sektor yang perlu diprioritaskan pertama adalah (a) sektor industri pengolahan, (b) listrik, gas dan air bersih, (c) bangunan. Sedangkan subsektor yang perlu diprioritaskan pertama adalah (a) industri tanpa migas, (b) pertambangan tanpa migas, (c) penggalian, (d) listrik, (e) hotel, (f) jasa penunjang angkutan dan (g) jasa sosial kemasyarakatan.

Sedangkan hasil analisis sektor perekonomian berdasarkan nilai tambah di Kabupaten Bogor terhadap Nasional diperoleh hasil sektor yang perlu diprioritaskan pertama (a) sektor industri pengolahan, (b) listrik, gas dan air bersih. Sedangkan sub sektor yang perlu diprioritaskan pertama adalah (a) industri tanpa migas, (b) listrik, (c) restoran dan (d) angkutan jalan raya.

Hasil analisis sektor perekonomian berdasarkan penduduk bekerja Kabupaten Bogor terhadap Jawa Barat diperoleh sektor yang perlu diprioritaskan pertama adalah sektor (a) pertambangan dan penggalian, (b) industri pengolahan, (c) perdagangan, hotel dan restoran, (d) pengangkutan dan komunikasi, (e) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (f) jasa-jasa.

Sedangkan sektor perekonomian Kabupaten Bogor terhadap Nasional yang perlu diprioritaskan pertama adalah (a) sektor pertambangan dan penggalian, (b) industri pengolahan, (c) bangunan, (d) perdagangan, hotel dan restoran, (e) pengangkutan dan komunikasi, (f) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (g) jasa-jasa.

Dari hasil analisis sektor yang diprioritaskan pertama mengingat sektor pertambangan dan penggalian beserta sub sektor yang menopangnya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan terdapat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi, maka sektor ini tidak dijadikan prioritas pertama.

Berdasarkan analisis nilai tambah maupun penduduk bekerja, sektor yang perlu diprioritaskan bukanlah sektor pertanian (sektor primer), namun sektor sekunder (manufaktur) dan juga sektor tersier (jasa). Hal ini menunjukkan adanya perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor primer yang digantikan sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor sekunder di Kabupaten Bogor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan diklasifikasikan sebagai sektor yang maju dan tumbuh cepat. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan listrik, gas, air bersih dan bangunan semakin meningkat.

Tabel 4.9.1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2007

No	Sektor (Lapangan Usaha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pertanian	326,260	20.21
2	Pertambangan dan Penggalian	27,840	1.72
3	Industri	319,575	19.79
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	4,383	0.27
5	Konstruksi	75,509	4.68
6	Perdagangan	357,147	22.12
7	Angkutan & Komunikasi	110,701	6.86
8	Keuangan	37,777	2.34
9	Jasa-jasa	320,848	19.87
10	Lainnya	34,424	2.13
	Total	1,614,464	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat dalam Angka 2008

Dilihat dari penduduk yang bekerja pada tahun 2007, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran (22.12 %), sektor pertanian (20.21%), sektor jasa-jasa (19.87 %) dan sektor industri pengolahan (19.79%). Penduduk yang bekerja di sektor pertanian cukup besar yaitu lebih dari 20 %, namun dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bogor hanya 4.81 %. Sedangkan sektor industri proporsinya dalam PDRB mencapai 63.72 dan penduduk yang bekerja di sektor ini 19.79%. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakseimbangan proporsi sektor terhadap PDRB dan penduduk yang bekerja. Selain itu juga dapat disebabkan produktivitas di sektor pertanian yang masih rendah. Dari hasil tipologi Klasen sektor ini termasuk ke dalam sektor yang relatif tertinggal.

Kabupaten Bogor didominasi oleh kontribusi sektor sekunder, kemudian sektor tersier dan sektor primer, dimana perkembangan sektor primer cenderung menurun dan sektor sekunder cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bogor juga mempengaruhi perubahan kontribusi sektoral tersebut. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tahun 2003 industri

menengah besar sejumlah 455 meningkat menjadi 667 pada tahun 2007, yang didominasi industri agro, logam, hasil hutan, tekstil dan produk tekstil dan kimia dan barang kimia. Jumlah unit usaha industri kecil juga meningkat pada tahun 2003 sejumlah 1096 unit usaha dan pada tahun 2007 menjadi 1368 unit usaha yang didominasi industri tekstil dan produk tekstil, agro, logam, barang dari kulit dan hasil hutan.

Tabel. 4.9.2. Data Jumlah Industri Menengah dan Besar dan Industri Kecil Kabupaten Bogor Tahun 2007

No.	Jenis Industri	Menengah dan Besar	Kecil	Jumlah
1	Logam	102	156	258
2	Mesin	31	68	99
3	Alat Angkut	39	32	71
4	Elektronika	17	6	23
5	Tekstil dan Produk Tekstil	70	347	417
6	Aneka	5	9	14
7	Barang dari Kulit	13	145	158
8	Kimia dan Barang Kimia	61	56	117
9	Plastik dan Barang dari Plastik	49	20	69
10	Karet dan Barang Karet	14	3	17
11	Kertas dan barang kertas	17	80	97
12	Bahan Bangunan dan Bahan Galian	24	43	67
13	Agro	126	296	422
14	Hasil Hutan	99	106	205
	Jumlah	667	1,367	2,034

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor

Perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Bogor disebabkan juga salah satunya adalah keterbatasan sumber daya alam dimana sektor primer pertambangan dan penggalian adalah produk yang tidak dapat diperbaharui sehingga eksploitasi terhadap sektor ini pada akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaannya. Selain itu juga perubahan fungsi lahan pertanian, dimana lahan pertanian banyak berubah fungsi menjadi perumahan dimana Kabupaten Bogor menjadi salah satu tujuan tempat tinggal bagi orang yang bekerja di Jakarta, yang disebabkan area pemukiman di Jakarta yang semakin terbatas akibat aktivitas

ekonomi yang tinggi sehingga tidak dapat menyediakan kebutuhan tempat tinggal bagi semua orang yang bekerja di Jakarta. Sumberdaya manusia yang ada juga ikut mendorong perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Bogor, dimana siswa-siswa lulusan sekolah cenderung bekerja diluar sektor primer.

Struktur ekonomi yang berubah ini, dampak positifnya diantaranya adalah bagi sumber daya yang memiliki keahlian di bidang struktur ekonomi yang berkembang dalam hal ini sekunder dan tersier dapat masuk ke sektor industri maupun jasa, sehingga dapat masuk ke lapangan pekerjaan di sektor tersebut (menyerap lapangan pekerjaan). Keunggulan yang lain, industri pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah produk.

Kerugian dari perubahan struktur ekonomi dengan meningkatnya kegiatan industri adalah efek negatif yang ditimbulkan misalnya masalah lingkungan seperti polusi, yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di bidang sektor sekunder maupun tersier (misal industri dan jasa) mereka tidak dapat masuk ke lapangan pekerjaan sektor tersebut, sementara ketersediaan sumber daya alam di sektor primer cenderung menurun. Oleh karena itu perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Bogor yang mengarah sektor sekunder dan tersier perlu mendapat perhatian karena dampak perubahan struktur ini apabila masyarakat tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang menunjang bagi perubahan, masyarakat dapat tidak terserap dalam sektor yang sedang berkembang tersebut. Mengingat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor yang masih mencapai 7,11 tahun atau setara dengan kelas satu SMP, Kabupaten Bogor sepatutnya memberi perhatian yang lebih terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakatnya.

4. 10. Perencanaan Kebijakan Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor

Setelah melakukan analisa terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Bogor, selanjutnya *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk mengetahui perencanaan kebijakan sektor perekonomian Kabupaten Bogor yang diinginkan. Analisis ini digunakan untuk mencari sasaran prioritas perencanaan

kebijakan sektor perekonomian, kendala prioritas yang harus diperhatikan dan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor.

Hasil analisis terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Bogor diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keunggulan karena merupakan sektor basis, memiliki kontribusi yang besar, dan termasuk ke dalam sektor maju, namun demikian sektor ini juga disebut sektor yang maju tapi tertekan. Sektor jasa termasuk sektor yang tumbuh dengan cepat dan potensial untuk berkembang. Sektor pertanian termasuk ke dalam sektor yang relatif tertinggal namun sektor ini memiliki dukungan lahan-lahan subur dan agroklimatologi yang cocok untuk pertanian, serta penduduk yang bekerja di sektor ini terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 20.21 %. Subsektor peternakan juga berpeluang dikembangkan karena saat ini kebutuhan akan subsektor ini juga dipenuhi dari luar Kabupaten Bogor terutama daging dan susu. Maka sasaran perencanaan sektoral dalam hirarki pada analisis ini adalah pengembangan industri, pengembangan pertanian dan pengembangan kelompok sektor jasa. Hal ini sejalan dengan arahan rencana pembangunan Kabupaten Bogor dalam RPJPD yaitu mengembangkan industri, pertanian dan pariwisata. Dengan analisis ini diharapkan diketahui prioritas perencanaan sektoral yang diinginkan.

Dalam pengembangan sektor perekonomian juga perlu diketahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pengembangan sektoral tersebut. Kendala-kendala dalam pengembangan agroindustri yang dikemukakan Supriyati dan Suryani, 2006 antara lain adalah (1) kualitas dan kontinuitas produk yang kurang terjamin, (2) kemampuan SDM masih terbatas, (3) teknologi yang digunakan sebagian besar masih bersifat sederhana sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah dan (4) belum berkembang secara luas kemitraan antara agroindustri skala besar/sedang dengan agroindustri skala kecil atau rumah tangga. Implikasinya harus didukung kebijakan yang komprehensif dari penyediaan bahan baku, SDM, teknologi, sarana dan prasarana dan kemitraaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri, Departemen Perindustrian (2008) menyatakan masalah internal yang dihadapi diantaranya adalah masih lemahnya keterkaitan antara industri baik industri hulu dan hilir maupun industri kecil, menengah dan besar, produktivitas yang masih rendah dan keterbatasan penguasaan pasar domestik khususnya akibat penyelundupan. Masalah eksternal yang dihadapi diantaranya keterbatasan infrastruktur, birokrasi, masalah perburuhan dan ketentuan limbah. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan industri di kabupaten Bogor dalam RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 adalah infrastruktur yang belum memadai, rendahnya kemampuan dan pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta pencemaran limbah industri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kendala-kendala yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang dirumuskan dalam model AHP yaitu input yang terbatas (lahan yang terbatas, kualitas sumber daya yang terbatas, bahan baku yang terbatas), infrastruktur yang belum memadai (infrastruktur jalan, listrik dan lainnya), kebijakan pemerintah yang kurang mendukung (prosedur dan birokrasi perizinan) dan rendahnya produktivitas.

Dalam RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 disebutkan bahwa untuk mendukung pengembangan perekonomian dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah perlunya kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun di dalam dokumen tersebut tidak disebutkan mana yang paling prioritas. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dalam model AHP ini adalah kebijakan investasi dan kelembagaan, kemitraan pemerintah dan swasta, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan.

Hasil wawancara dan pengisian kuesioner dengan pembobotan setiap elemen oleh para responden ahli atas hirarki yang disusun diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran prioritas perencanaan sektor perekonomian :

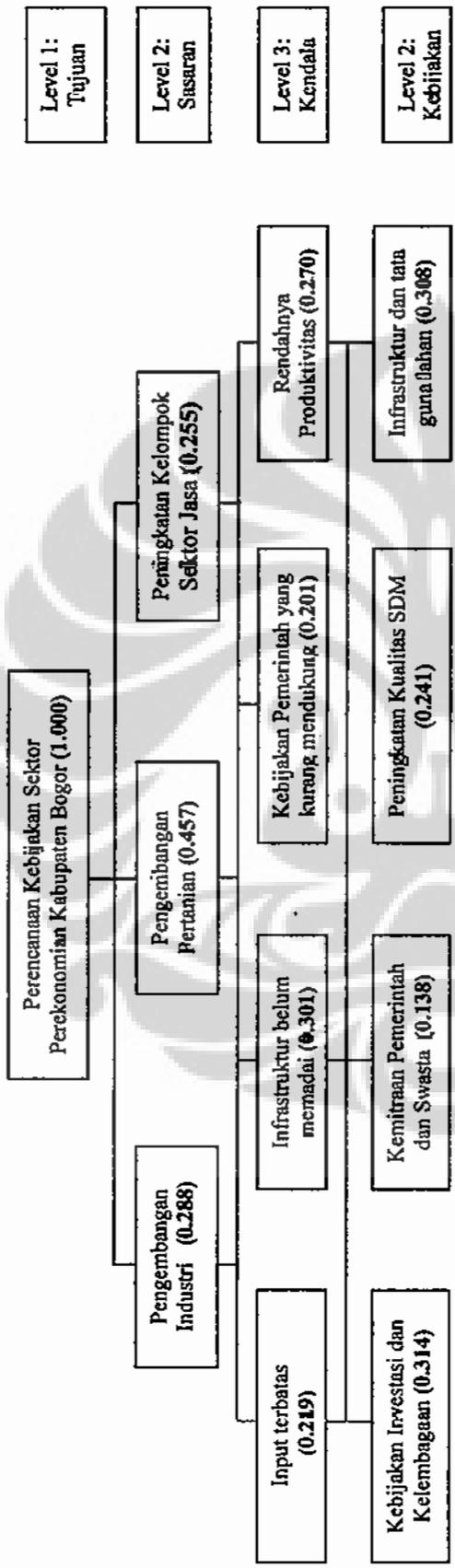
- Pengembangan Pertanian (0.457)
 - Pengembangan Industri (0.288)
 - Peningkatan Kelompok Sektor Jasa (0.255)
- b. Kendala prioritas yang dihadapi adalah :
- Infrastruktur yang belum memadai (0.301)
 - Rendahnya produktivitas (0.270)
 - Input terbatas (0.219)
 - Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung (0.201)
- c. Kebijakan prioritas yang diperlukan dalam pengembangan sektor perekonomian:
- Kebijakan Investasi dan kelembagaan (0.314)
 - Peningkatan Infrastruktur dan penataan tata guna lahan (0.308)
 - Peningkatan kualitas SDM (0.241)
 - Kemitraan Pemerintah dan Swasta (0.138)

Sasaran pengembangan pertanian dianggap paling prioritas karena Kabupaten Bogor memiliki sumber daya alam bagi pengembangan pertanian yaitu wilayah yang luas 298.838,304 Ha, dengan tanah-tanah yang relatif subur yang berasal dari endapan gunung berapi yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Selain itu di bidang peternakan Kabupaten Bogor memiliki agroklimat yang cocok untuk peternakan serta kebutuhan yang saat ini masih diperoleh dari daerah di luar Kabupaten Bogor khususnya produk daging dan susu. Namun demikian sektor pertanian di Kabupaten Bogor dalam penggolongan Tipologi Klassen masuk ke dalam sektor yang relatif tertinggal, hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pertanian berupa revitalisasi pertanian. Pengembangan pertanian yang memanfaatkan teknologi yang baik perlu dioptimalkan. Sasaran prioritas kedua adalah pengembangan industri, hal ini disebabkan industri memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kabupaten Bogor, dan diharapkan dengan berkembangnya industri akan mendorong juga berkembangnya sektor yang lain karena industri akan membutuhkan input yang dihasilkan sektor lainnya. Sasaran prioritas ketiga adalah peningkatan kelompok sektor jasa, dimana bobot prioritas sasaran kedua dan ketiga

tidak berbeda terlampau jauh. Kabupaten Bogor yang berada dekat dengan Ibukota negara dan Provinsi Jawa Barat berpeluang untuk menyediakan kebutuhan sektor jasa untuk daerah sekitarnya.

Kendala prioritas yang dihadapi dalam pembobotan tersebut adalah infrastruktur yang belum memadai diantaranya infrastruktur berupa jalan, listrik, air, drainase dan irigasi. Infrastruktur di Kabupaten Bogor walaupun di beberapa daerah sudah cukup baik, namun masih banyak daerah yang belum terbangun dengan baik, selain itu masih perlu dibangun akses-akses jalan baru sehingga memudahkan lalu lintas barang dan jasa. Panjang jalan yang ada masih 47,77 % dari kebutuhan ideal dan 31,46 % dalam keadaan rusak. Kondisi irigasi juga masih belum memadai dengan adanya 37,54 % jaringan dalam kondisi rusak. Dan untuk jaringan listrik rasio elektrifikasinya masih mencapai 50,96 %. Selain itu listrik yang sering padam juga akan mengganggu aktivitas ekonomi walaupun hal ini juga merupakan permasalahan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kendala prioritas berikutnya adalah rendahnya produktivitas, hal ini dapat disebabkan karena teknologi, kualitas SDM yang belum maksimal dan juga kurangnya etos kerja. Kendala prioritas ketiga yaitu input terbatas. Input terbatas ini dapat berupa lahan yang kurang tersedia, khususnya bagi pertanian akibat banyaknya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman sedangkan bagi industri dapat berupa belum banyaknya kawasan industri yang dimiliki atau kualitas sumber daya manusia yang masih kurang maupun ketersediaan bahan baku. Prioritas yang terakhir adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung baik berupa birokrasi yang ada misalnya dalam pengajuan perizinan. Namun demikian kendala ini merupakan prioritas terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kendala ini bukanlah kendala yang paling prioritas di Kabupaten Bogor.

Kendala prioritas dari hasil analisis ini dalam setiap sasaran yaitu pengembangan industri, pengembangan pertanian dan peningkatan kelompok sektor jasa berbeda (Lampiran 4). Kendala prioritas pertama dalam pengembangan industri dan pengembangan jasa memiliki kendala yang sama yaitu infrastruktur yang kurang



Gambar 4. Hasil Pembobotan Hirarki AHP

memadai, sedangkan dalam pengembangan pertanian kendala prioritas pertama adalah rendahnya produktivitas.

Pembobotan terhadap kebijakan prioritas yang merupakan prioritas utama adalah kebijakan investasi dan kelembagaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan investasi yang baik akan menarik investasi dari luar daerah Kabupaten Bogor dan dapat meningkatkan kesempatan kerja serta peningkatan perekonomian di Kabupaten Bogor. Kebijakan investasi di Kabupaten Bogor sejak tahun 2009 telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan adanya Badan Perizinan Terpadu yang melayani perizinan melalui satu pintu diharapkan akan mempermudah prosedur perizinan. Prioritas kedua adalah peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan, dimana dengan adanya infrastruktur yang baik akan memperlancar aktivitas ekonomi dan juga akan menarik investasi masuk ke Kabupaten Bogor. Penataan tata guna lahan juga dianggap penting agar terjadi keseimbangan yang selaras bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Bogor, lahan produktif tidak terkonversi menjadi pemukiman, namun lahan pemukiman dan kawasan industri juga tetap tersedia. Kebijakan prioritas ketiga adalah peningkatan kualitas SDM, mengingat lama rata-rata sekolah di Kabupaten Bogor masih 7,11 tahun atau setara dengan kelas satu SMP, maka agar dapat terserap dan memiliki daya saing dalam lapangan kerja di sektor perekonomian dan dalam meningkatkan produktivitas sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM. Kebijakan prioritas berikutnya adalah kemitraan pemerintah dan swasta. Kemitraan pemerintah dan swasta diharapkan dapat mensinergikan potensi, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis sensitivitas terhadap kebijakan yang dianggap prioritas, pada pengembangan industri atau pengembangan pertanian maupun untuk pengembangan keseluruhan sasaran, urutan kebijakan prioritas adalah sama, yaitu kebijakan investasi dan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan, peningkatan SDM dan kemitraan pemerintah dan swasta. Perubahan terjadi bila sasaran yang dituju adalah peningkatan kelompok sektor jasa, dimana kebijakan yang

utama adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM, kebijakan investasi dan kelembagaan, kemitraan pemerintah dan swasta (Lampiran 5).

Dari hasil wawancara mengenai iklim investasi di Kabupaten Bogor saat ini sudah mengarah ke iklim yang lebih baik terutama dengan terbentuknya Badan Perizinan Terpadu yang mulai berjalan tahun 2009. Hal ini menunjukkan upaya Kabupaten Bogor untuk memberikan kemudahan perizinan. Alur perizinan dan biaya serta lama waktu pengurusan izin juga menjadi jelas. Lama waktu pengurusan izin sudah diberikan tenggat waktu yaitu paling lambat 14 hari. Selain itu dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru juga memberikan peluang bagi masuknya investasi di Kabupaten Bogor sesuai peruntukannya. Pembangunan infrastruktur terutama jalan juga menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya upaya yang dilakukan terjadi peningkatan peringkat realisasi nilai investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bogor di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2003 Kabupaten Bogor memiliki peringkat kelima dan tahun 2009 (sampai dengan September) peringkat yang diraih adalah peringkat 2 tertinggi sejak tahun 2003.

Hasil wawancara dengan responden ahli, hambatan dalam berinvestasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi standar kebutuhan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor yang masih rendah yaitu RLS 7.11 tahun. Oleh karena itu diharapkan dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM permasalahan tersebut dapat teratasi. Selain itu masih diperlukan peningkatan infrastruktur untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan pembukaan akses baru. Dalam hal perizinan juga perlu dilanjutkan upaya mempermudah perizinan, khususnya perizinan yang belum terlayani oleh Badan Perizinan Terpadu. Strategi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah *political will* dari Kepala Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya investasi dengan sosialisasi dan forum investasi.

Dari hasil penelitian, berdasarkan analisis data kuantitatif, industri pengolahan memiliki keunggulan dan memiliki kontribusi terbesar (63 %) terhadap PDRB Kabupaten Bogor, namun mengalami pertumbuhan yang lambat, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang cepat. Kedua sektor ini adalah sektor yang lebih dipengaruhi oleh sisi permintaan daripada penawaran atau dapat diartikan meningkatnya kebutuhan atau konsumsi yang dapat disebabkan Kabupaten Bogor mengalami dampak *urban sprawl* dari Jakarta akibat aktivitas ekonomi yang kuat. Sementara sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang lambat dan kontribusi yang kecil namun demikian bila didasarkan persepsi ahli secara kumulatif dengan metode *Analytical Hierarchy Process* sektor yang menjadi sasaran adalah sektor pertanian. Hal ini bertolak belakang dengan hasil analisis dengan data kuantitatif, dimana sektor yang memiliki keunggulan adalah industri pengolahan. Jika diamati lebih lanjut maka hasil dengan metode AHP adalah hasil gabungan dari seluruh persepsi ahli. Secara individu, beberapa ahli mengutamakan prioritas pada industri atau jasa, sedangkan lainnya mengutamakan pada prioritas pertanian. Dari wawancara para ahli yang memilih pengembangan pertanian disebabkan karena melihat sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bogor, tenaga kerja yang terserap di sektor ini cukup besar dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kelestarian lingkungan yang perlu dijaga. Sementara pendapat para ahli yang memilih pengembangan industri terutama disebabkan kontribusinya terhadap PDRB yang besar, dapat meningkatkan nilai tambah produk dan merupakan motor penggerak bagi sektor lain, karena industri akan membutuhkan input dari sektor lain. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjamin agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor telah memperoleh informasi yang cukup tentang aktivitas perekonomian yang ada, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mensosialisasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keunggulan. Mengingat persepsi ahli sektor yang paling prioritas adalah pengembangan pertanian maka industri pengolahan yang menjadi sasaran adalah sektor industri yang mengolah bahan baku pertanian seperti industri pengolahan makanan dan minuman.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient*, *Shift Share* dan Tipologi Klassen terhadap nilai tambah dan analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* terhadap penduduk yang bekerja pada tahun 1996-2007 dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan di Kabupaten Bogor adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini memiliki keunggulan baik terhadap Provinsi Jawa Barat maupun terhadap Nasional.

Namun, industri pengolahan yang memiliki keunggulan dan kontribusi terbesar (63 %) terhadap PDRB Kabupaten Bogor, mengalami pertumbuhan yang lambat, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bogor mengalami dampak *urban sprawl* dari Jakarta, karena sektor tersebut lebih dipengaruhi oleh sisi permintaan daripada penawaran akibat aktivitas ekonomi yang kuat di Jakarta.

Sementara sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang lambat dan kontribusi yang kecil namun demikian bila didasarkan persepsi ahli secara kumulatif dengan metode *Analytical Hierarchy Process* sektor yang menjadi sasaran adalah sektor pertanian. Hal ini bertolak belakang dengan hasil analisis dengan data kuantitatif yang menjadi sasaran adalah industri pengolahan. Jika diamati lebih lanjut maka hasil dengan metode AHP adalah hasil gabungan dari seluruh persepsi ahli. Apabila dilihat secara individu, maka beberapa ahli mengutamakan prioritas pada industri atau jasa, sedangkan sisanya mengutamakan pada prioritas pertanian. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjamin agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor telah mendapat informasi yang cukup tentang aktivitas perekonomian yang ada.

Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Bogor menurut para ahli adalah infrastruktur yang belum memadai, rendahnya produktivitas, input yang terbatas dan kebijakan

Pemerintah yang kurang mendukung. Sementara itu untuk menanggulangi kendala tersebut, urutan kebijakan prioritas yang diperlukan dalam pengembangan sektor perekonomian adalah kebijakan investasi dan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan penataan tata guna lahan, peningkatan kualitas SDM dan kemitraan pemerintah dan swasta.

Analisis sensitivitas atas alternatif kebijakan baik bagi pengembangan industri, maupun pengembangan pertanian, maupun untuk pengembangan keseluruhan sasaran tersebut tetap sama, namun pada kebijakan peningkatan kelompok sektor jasa terdapat perubahan yaitu kebijakan prioritas berturut-turut adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kebijakan investasi dan penguatan kelembagaan dan terakhir kemitraan pemerintah dan swasta.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mensosialisasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki keunggulan, namun mengingat persepsi ahli sektor yang paling prioritas adalah pengembangan pertanian maka industri pengolahan yang menjadi sasaran adalah sektor industri yang mengolah bahan baku pertanian seperti industri pengolahan makanan dan minuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFPE.
- Badan Pusat Statistik. (1996-2008). Statistik Indonesia. Jakarta: BPS. (Beberapa Tahun)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (1996-2008). Jawa Barat dalam Angka. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat. (Beberapa Tahun)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2008). PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (1996-2007). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha. Cibinong: BPS Kabupaten Bogor. (Beberapa Tahun)
- _____ . (2008). Kabupaten Bogor dalam Angka. Cibinong: BPS Kabupaten Bogor.
- Brodjonegoro, P. S. (1992). AHP. Jakarta: Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Departemen Perindustrian. (2008). Potret Tiga Setengah Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Dornbusch, Rudiger., Fischer, Stanley., Startz, Richard. (2004). *Macroeconomics*. (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

- Harmadi, S.H.B. dan Yudhistira, M.H. (2008). Analisis Arah Pergerakan Aktivitas Ekonomi Jakarta terhadap Daerah Sekitarnya dengan Menggunakan Pendekatan *Urban Sprawl*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 9 (2008): 59-76
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (D. Guritno, Penerjemah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muflihun, M. (2008). Analisis Potensi Kerjasama Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah. (Thesis). Depok: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2008). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati Bogor Periode 2003-2008.
- _____. (2008). RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
- Republik Indonesia. (1999) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2004) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- _____. (2004) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta; LP3ES.
- Sjarizal. (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma*, Tahun XXVI, No. 34, (27-38)
- Sjarizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.

- Sriwahyuni, E. (2002). Analisis Perekonomian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagai Dasar Kebijakan Penentuan Sektor Strategis s.d. Tahun 2006 (Dalam lingkup Jabotabek, Provinsi Jawa Barat dan Nasional) (Thesis). Depok: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Stimson, R. J., Stough, R. R., dan Roberts, B. H. (2002). *Regional Economic Development : Analysis and Planning Strategy*. Berlin: Springer.
- Sunaryanto, D. (2000) Perencanaan Kutub Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan pada Wilayah Pertambangan dengan Metode AHP. (Thesis). Depok: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Supriyati, Suryani dan Erma. (2006). Peranan, Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 24 No.2 Desember 2006 : 92-106
- Susanti, Hera., Ikhsan, Moh., Widyanti. (2007). Indikator-indikator Makroekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tarigan, Robinson. (2007). Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. (2003). *Economic Development (8th ed.)* Essex: Pearson Education Limited

KUESIONER AHP (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS)

PENGANTAR

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan tesis yang sedang dilakukan, maka saya mengharapkan kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini dibuat sebagai bagian dari bahan penulisan tesis tentang analisis sektor perekonomian di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang menggunakan pengambilan keputusan oleh *expert/ahli* (orang-orang yang memahami tentang sektor perekonomian di Kabupaten Bogor) atas pemilihan berbagai alternatif kebijakan.

Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk menganalisis sektor perekonomian di Kabupaten Bogor khususnya mengenai alternatif perencanaan kebijakan sektor perekonomian Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kesediaan dan partisipasi Bapak/ Ibu untuk dapat mengisi kuesioner ini dan memberikan jawaban yang paling tepat. Bantuan Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Bogor.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Rubidiyanti Dominica
NPM 0806430506

DATA RESPONDEN EXPERT

NAMA :

NAMA INSTANSI :

JABATAN :

PENDIDIKAN :

PENGALAMAN PEKERJAAN :

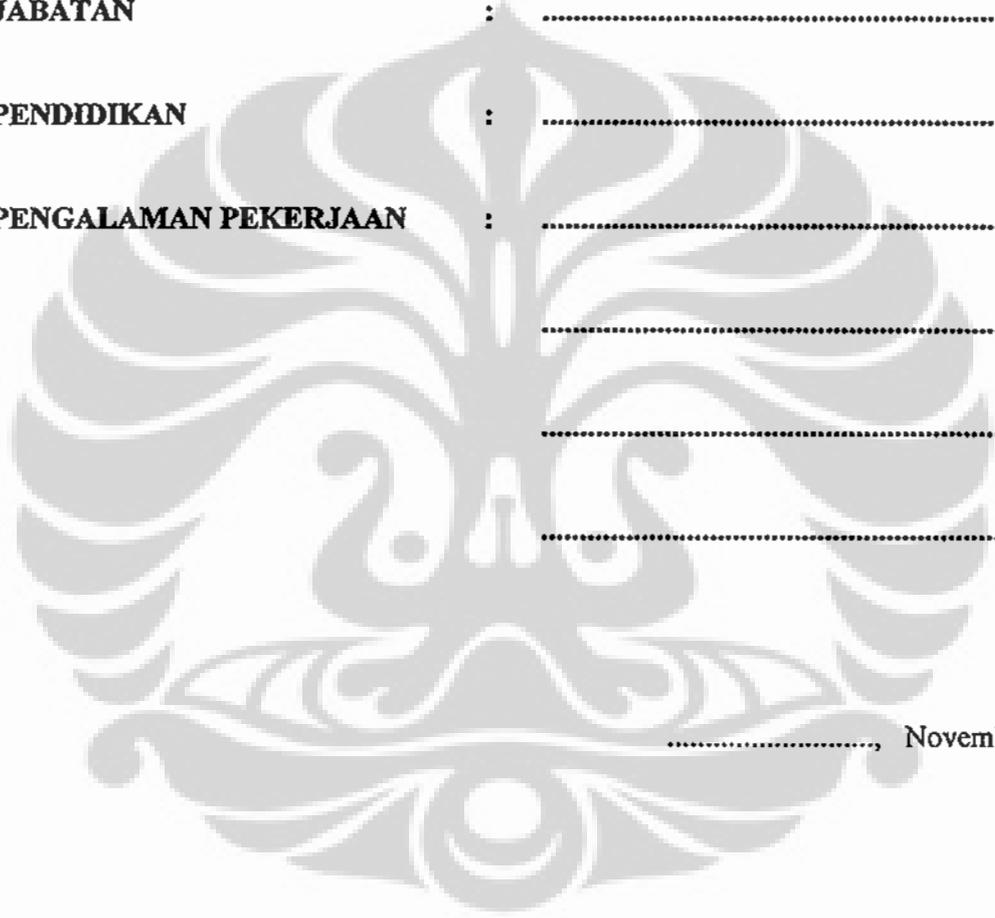
.....

.....

.....

....., November 2009

(.....)



(Lanjutan Lamp. 1)

**KUESIONER AHP (ANALYTICAL HIERARCY PROSES)
DALAM PENANGANAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN
BOGOR**

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER:

Untuk pengisian kuesioner AHP ini, yang perlu dilakukan adalah memperbandingkan pengaruh atau tingkat kepentingan elemen-elemen di setiap level pertanyaan dengan menggunakan nilai skala. Kuesioner ini menggunakan sistem rangking yang menilai besarnya pengaruh satu elemen faktor dengan elemen faktor lainnya. Setiap responden dapat memilih jawaban yang berada di sisi kanan ataupun sisi kiri menurut bobot kepentingannya. Jawaban dilakukan dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan antara nilai 1 s.d 9 dari kedua elemen faktor dengan membubuhkan tanda (X) pada satu kolom bobot nilai tersebut.

Berikut ini adalah sistem skala penilaian dari perbandingan kriteria :

Nilai	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Lebih penting	A lebih penting dari B
7	Sangat lebih penting	A sangat lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika A dibanding B=3 maka B dibanding A=1/3	Asumsi masuk akal

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen, berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen A dinilai 3 kali lebih penting dibanding elemen B, maka elemen B sama dengan 1/3 kali lebih penting dibanding A.

Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom 1) lebih penting dari elemen kolom sebelah kanan (kolom 2) nilai perbandingan ini diisikan pada sebelah kiri dan jika sebaliknya maka diisikan pada sebelah kanan (dapat dilihat dalam contoh).

CONTOH PENGISIAN KUESIONER:

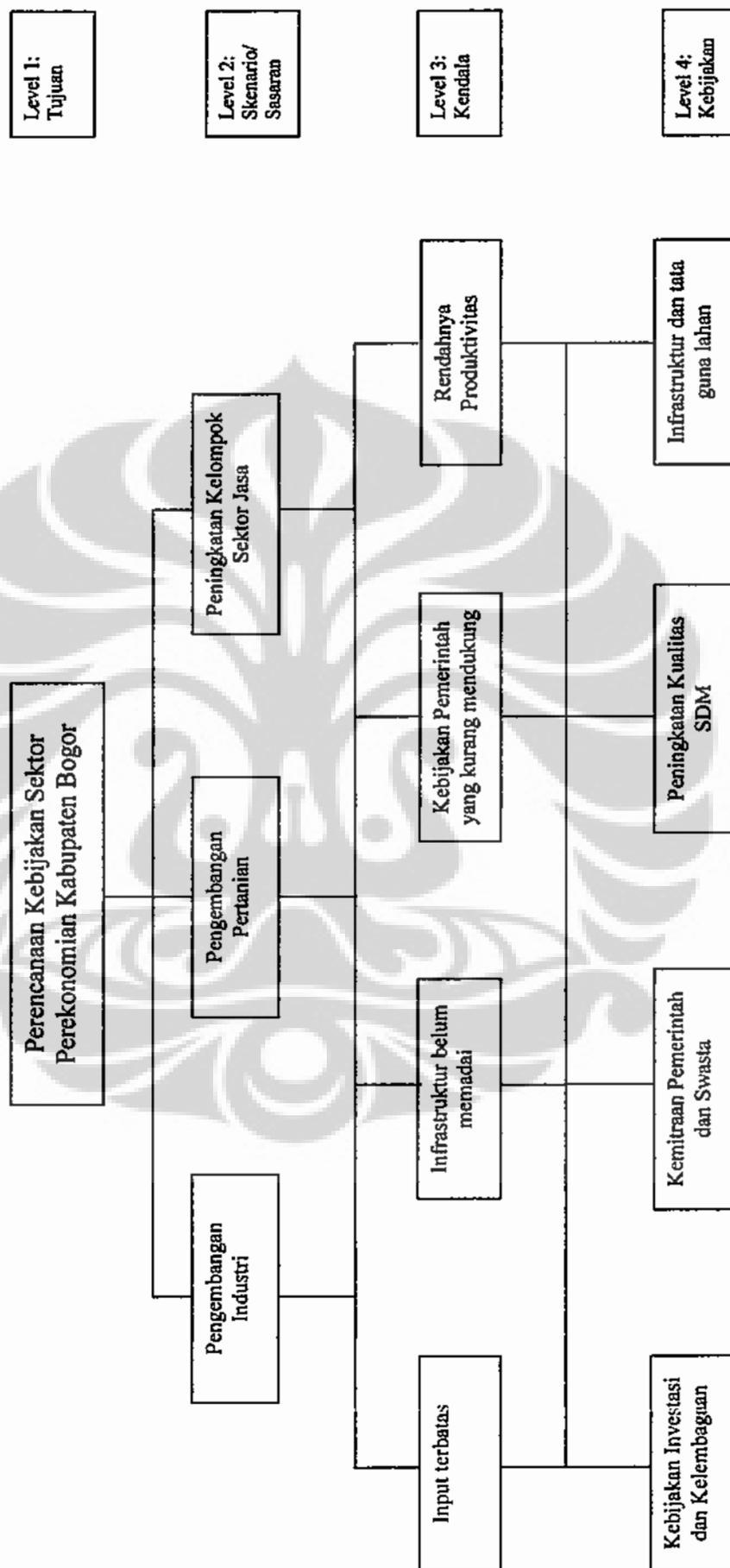
Berkaitan dengan tujuan utama yaitu Perencanaan Kebijakan Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor, maka skenario/sasaran apa yang *paling penting* untuk diprioritaskan?

<u>Kolom 1</u>	9	7	5	3	1	3	5	7	9	<u>Kolom 2</u>
Pengembangan Industri					X					Pengembangan Pertanian
Pengembangan Industri		X								Peningkatan Kelompok Sektor Jasa
Peningkatan Kelompok Sektor Jasa							X			Pengembangan Pertanian

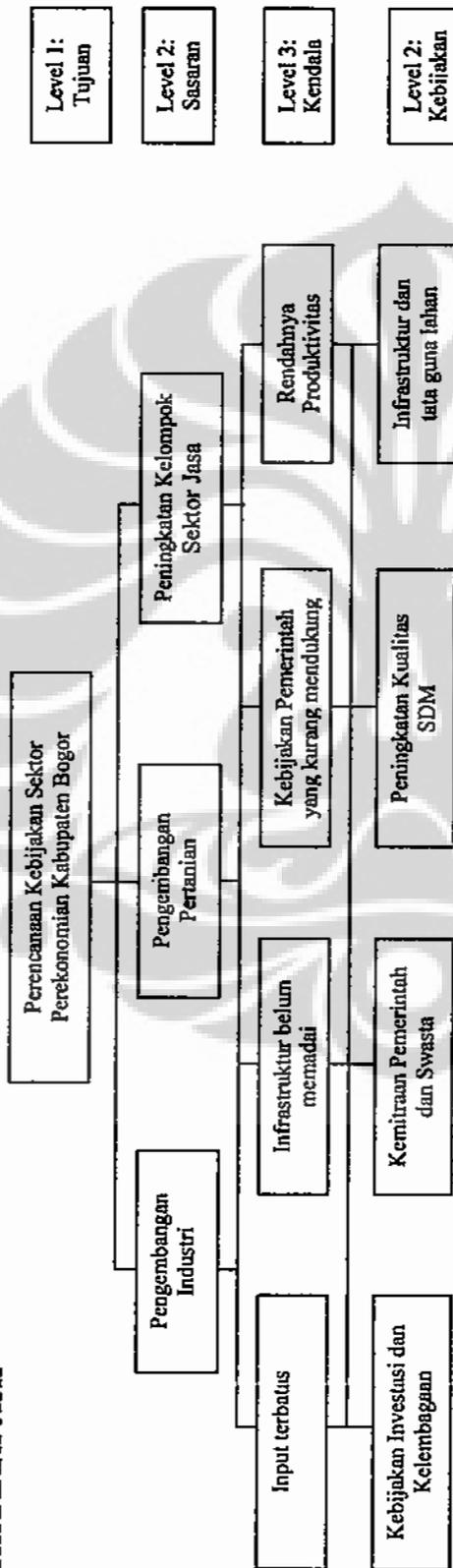
Keterangan:

- Jika jawaban yang diprioritaskan adalah Pengembangan Industri sama pentingnya dengan Pengembangan Pertanian, maka tanda silang (X) diletakkan pada kolom angka 1.
- Jika jawaban yang diprioritaskan adalah Pengembangan Industri 7 kali relatif (sangat lebih penting) dibandingkan dengan Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, maka tanda silang (X) diletakkan pada kolom angka 7 sebelah kiri.
- Jika Jawaban yang diprioritaskan adalah Pengembangan Pertanian 5 kali relatif (lebih penting) dibandingkan dengan Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, maka tanda silang (X) diletakkan pada kolom angka 5 di sebelah kanan.

HIRARKI AHP



HIRARKI AHP



Keterangan :

Sasaran :

1. Peningkatan Kelompok Sektor Jasa : Termasuk didalamnya sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa

Kendala :

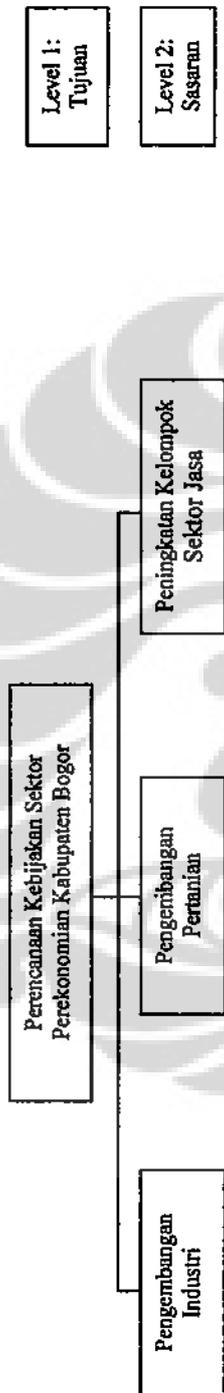
1. Input Terbatas : Ketersediaan lahan yang terbatas, kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, ketersediaan bahan baku
2. Infrastruktur belum memadai : Jaringan jalan, ketersediaan listrik, ketersediaan air
3. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung : Lama waktu dan prosedur perijinan

Kebijakan :

1. Infrastruktur dan tata guna Lahan : Peningkatan infrastruktur dan penataan tata guna lahan

(Lanjutan Lamp. 1)

PERTANYAAN KUESIONER:



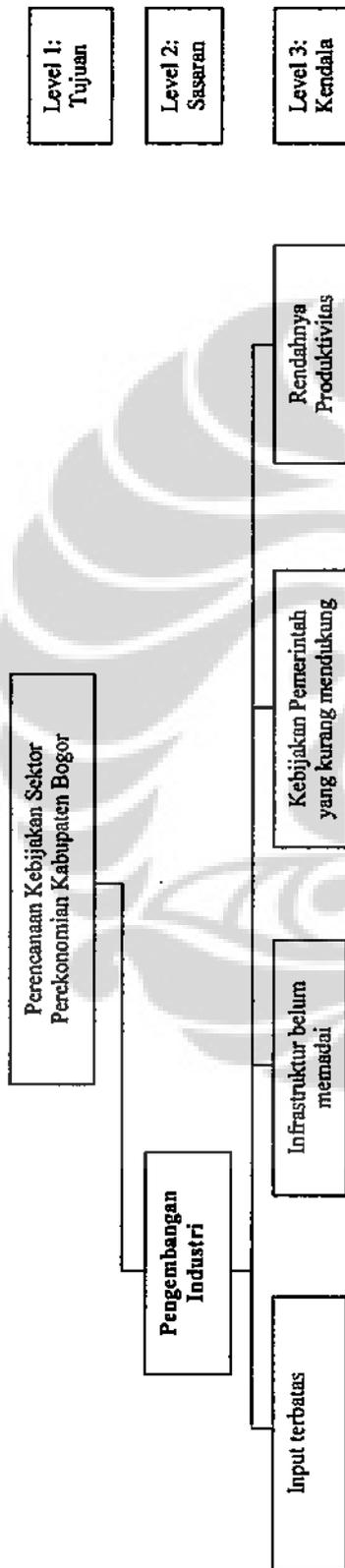
Pertanyaan 1:

Berkaitan dengan tujuan utama yaitu **Perencanaan Kebijakan Sektor Perekonomian Kabupaten Bogor**, maka skenario/sasaran apa yang **paling penting** untuk diprioritaskan?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
1.	Pengembangan Industri										Pengembangan Pertanian
2.	Pengembangan Industri										Peningkatan Kelompok Sektor Jasa
3.	Pengembangan Pertanian										Peningkatan Kelompok Sektor Jasa

Ket. (1 = sama penting, 3 = sedikit lebih penting, 5 = lebih penting, 7 = sangat lebih penting, 9 = mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



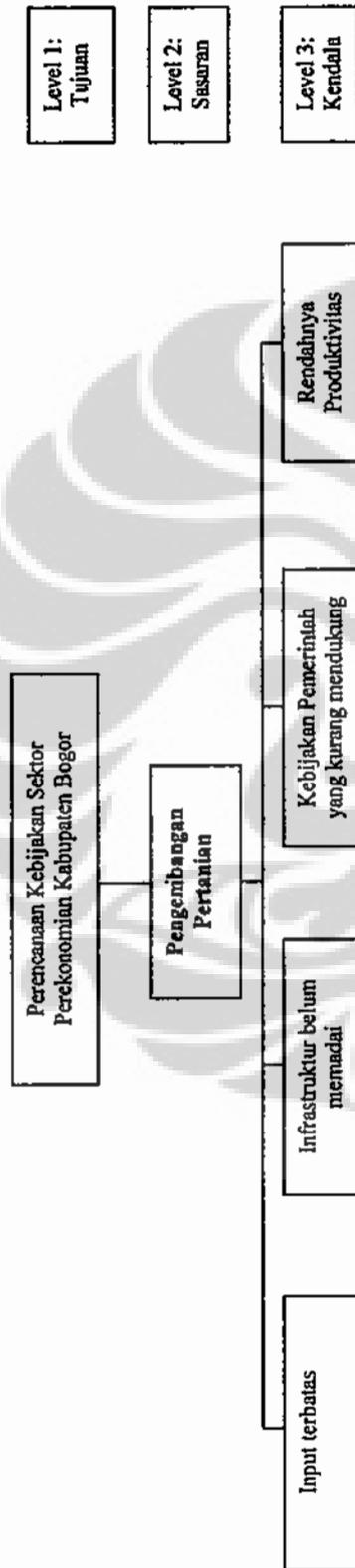
Pertanyaan 2:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Industri, kendala manakah yang *paling penting* untuk diperhatikan?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
4.	Input Terbatas										Infrastruktur belum memadai
5.	Input Terbatas										Kebijakan Pemerintah
6.	Input Terbatas										Rendahnya Produktivitas
7.	Infrastruktur belum memadai										Kebijakan Pemerintah
8.	Infrastruktur belum memadai										Rendahnya Produktivitas
9.	Kebijakan Pemerintah										Rendahnya Produktivitas

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



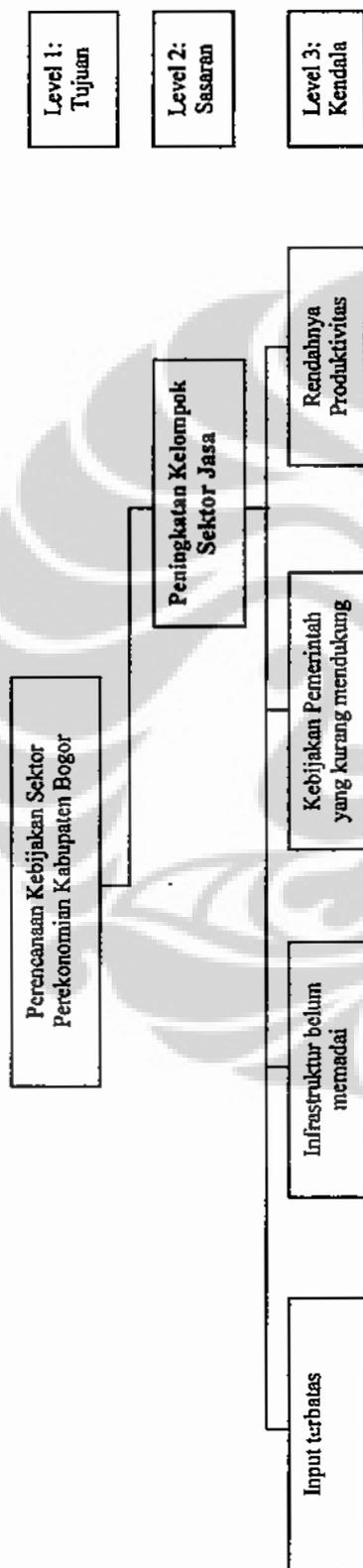
Pertanyaan 3:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Pertanian, kendala manakah yang paling penting untuk diperhatikan?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
10.	Input Terbatas										Infrastruktur belum memadai
11.	Input Terbatas										Kebijakan Pemerintah
12.	Input Terbatas										Rendahnya Produktivitas
13.	Infrastruktur belum memadai										Kebijakan Pemerintah
14.	Infrastruktur belum memadai										Rendahnya Produktivitas
15.	Kebijakan Pemerintah										Rendahnya Produktivitas

Ket. (1 = sama penting, 3 = sedikit lebih penting, 5 = lebih penting, 7 = sangat lebih penting, 9 = mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



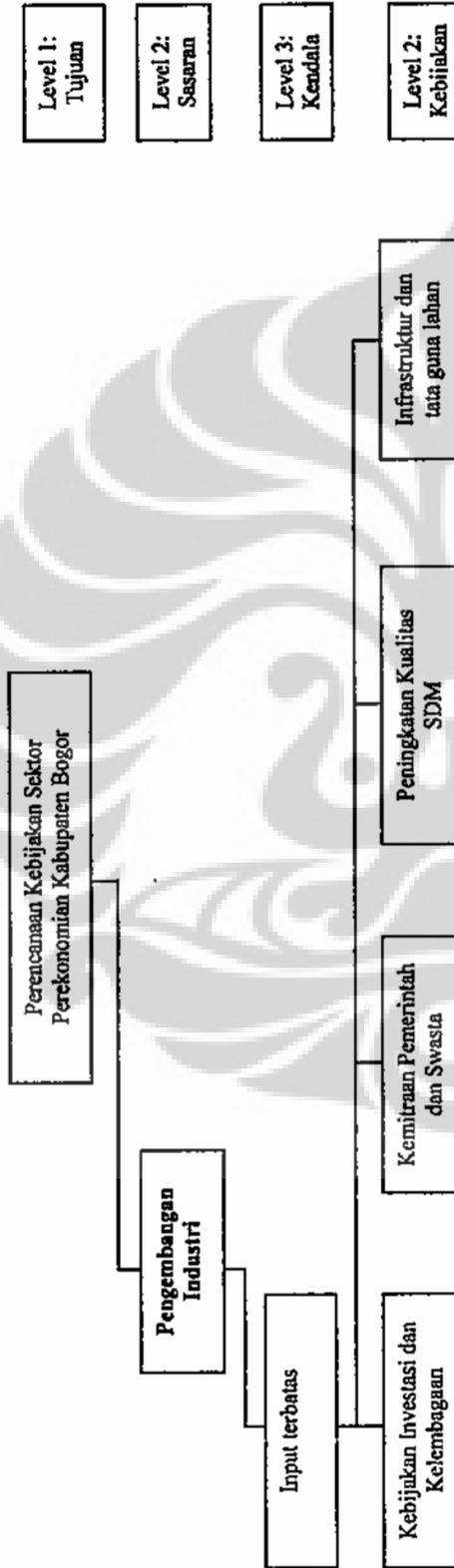
Pertanyaan 4:

Menurut Bapak/Ibu dalam Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, kendala manakah yang paling penting untuk diperhatikan?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
16.	Input Terbatas										Infrastruktur belum memadai
17.	Input Terbatas										Kebijakan Pemerintah
18.	Input Terbatas										Rendahnya Produktivitas
19.	Infrastruktur belum memadai										Kebijakan Pemerintah
20.	Infrastruktur belum memadai										Rendahnya Produktivitas
21.	Kebijakan Pemerintah										Rendahnya Produktivitas

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



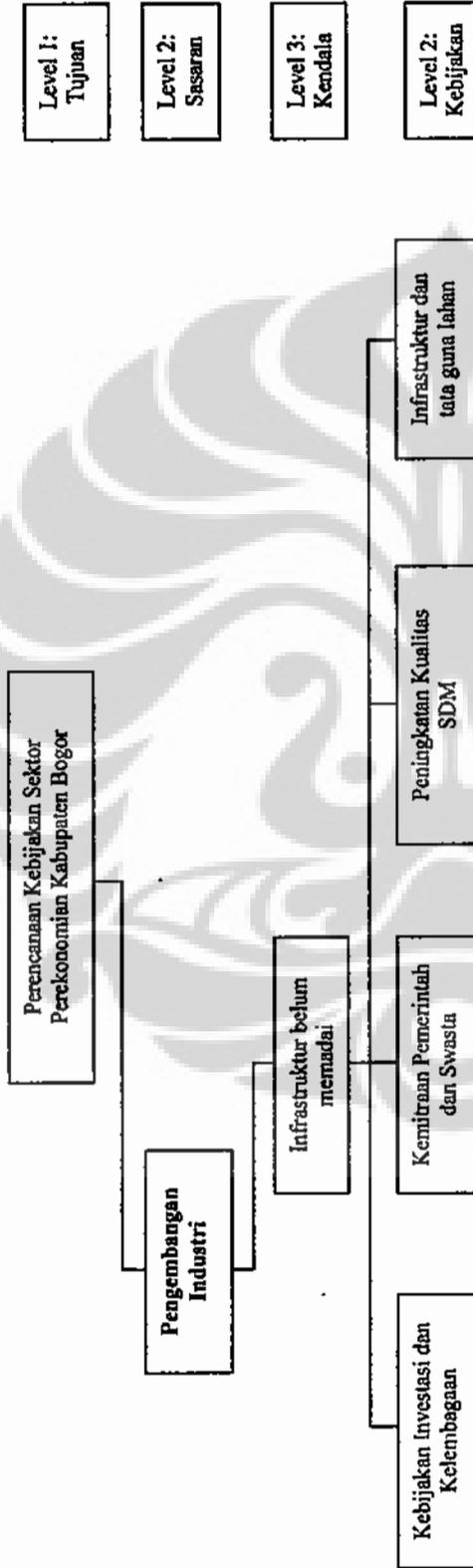
Pertanyaan 5:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Industri, kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Input yang terbatas?

No.	Kolom 1									Kolom 2		
	9	7	5	3	1	3	5	7	9			
22.												Kemitraan Pemerintah dan Swasta
23.												Peningkatan Kualitas SDM
24.												Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
25.												Peningkatan Kualitas SDM
26.												Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
27.												Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



Level 1:
Tujuan

Level 2:
Sasaran

Level 3:
Kendala

Level 2:
Kebijakan

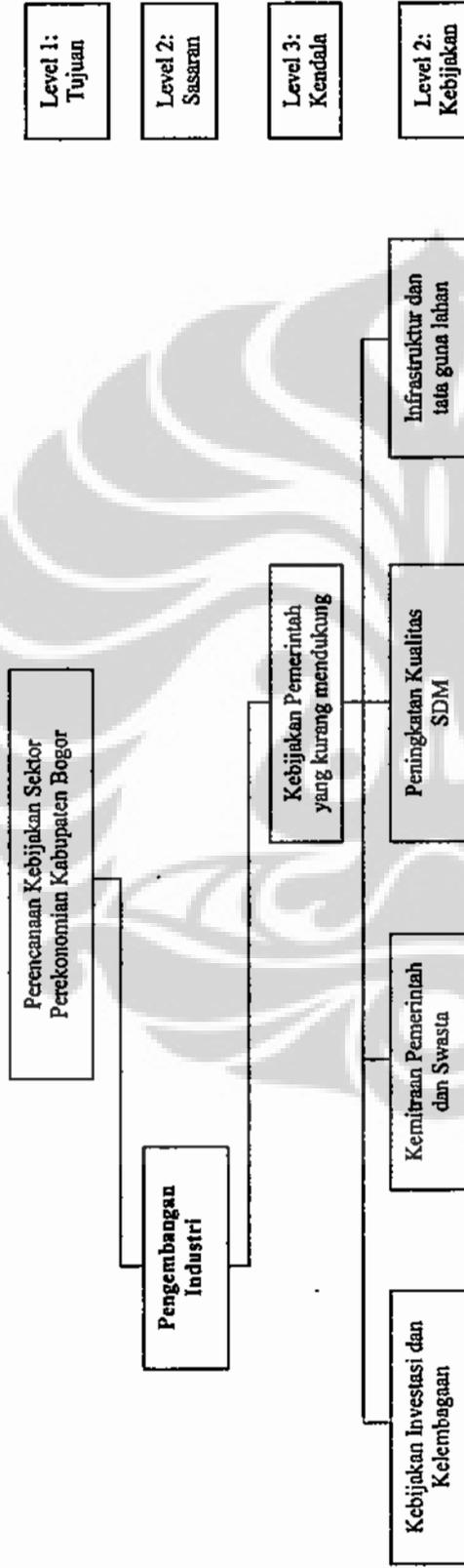
Pertanyaan 6:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Industri, kebijakan manakah yang paling penting diprioritaskan untuk mengatasi kendala Infrastruktur belum memadai ?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
28.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
29.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
30.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
31.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
32.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
33.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



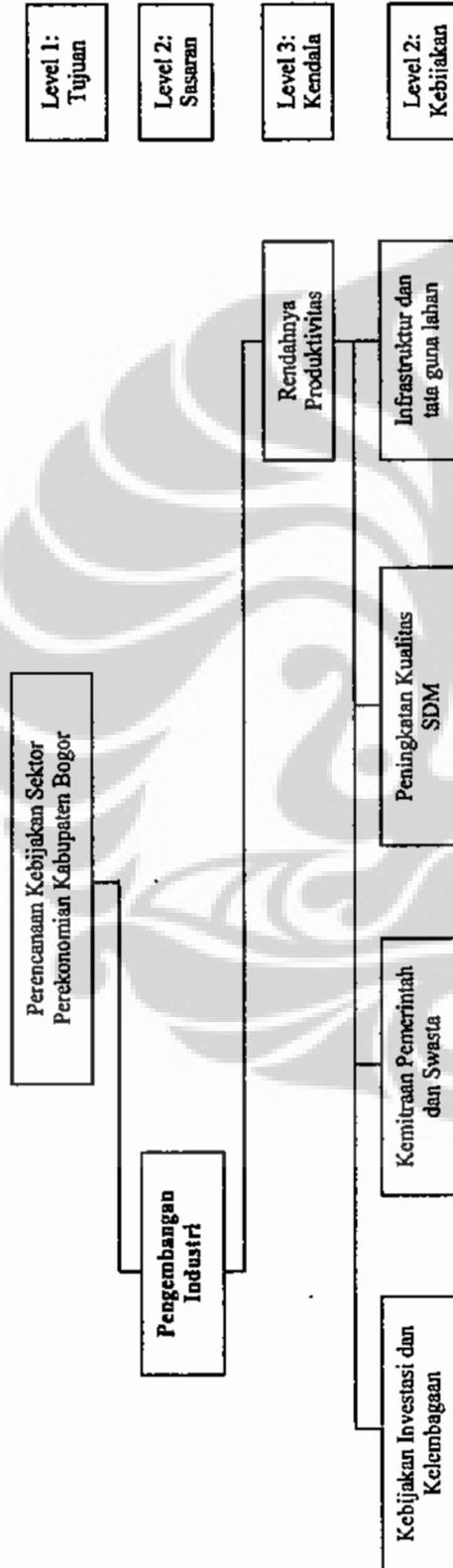
Pertanyaan 7:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Industri, kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
34.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
35.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
36.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
37.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
38.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
39.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



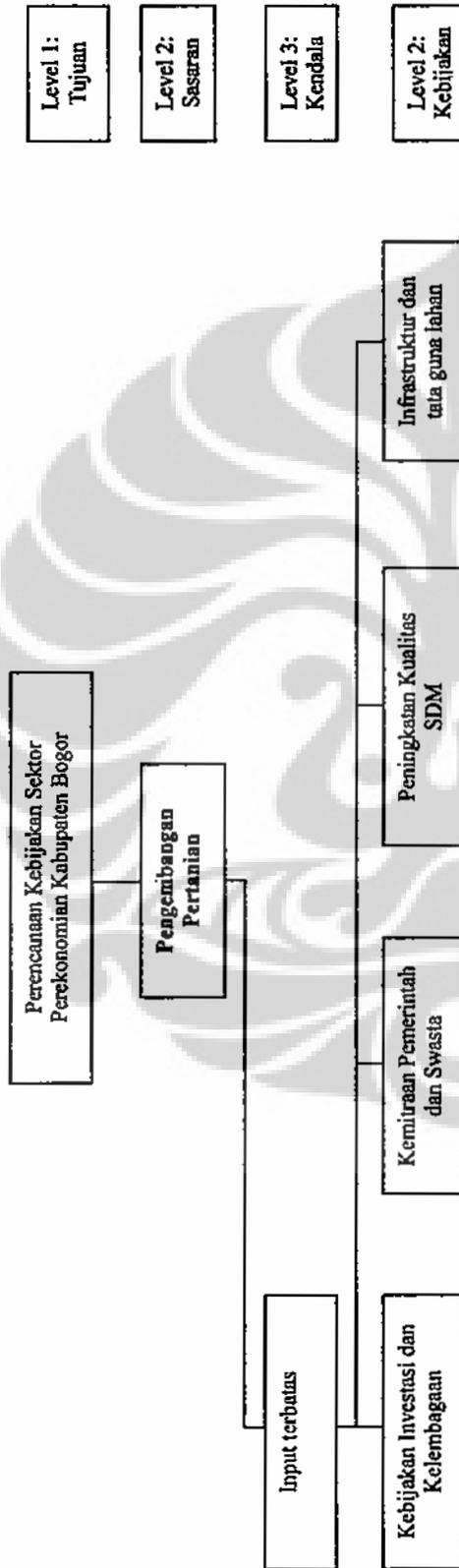
Pertanyaan 8:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Industri, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala *Rendahnya produktivitas*?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
40.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
41.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
42.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
43.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
44.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
45.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



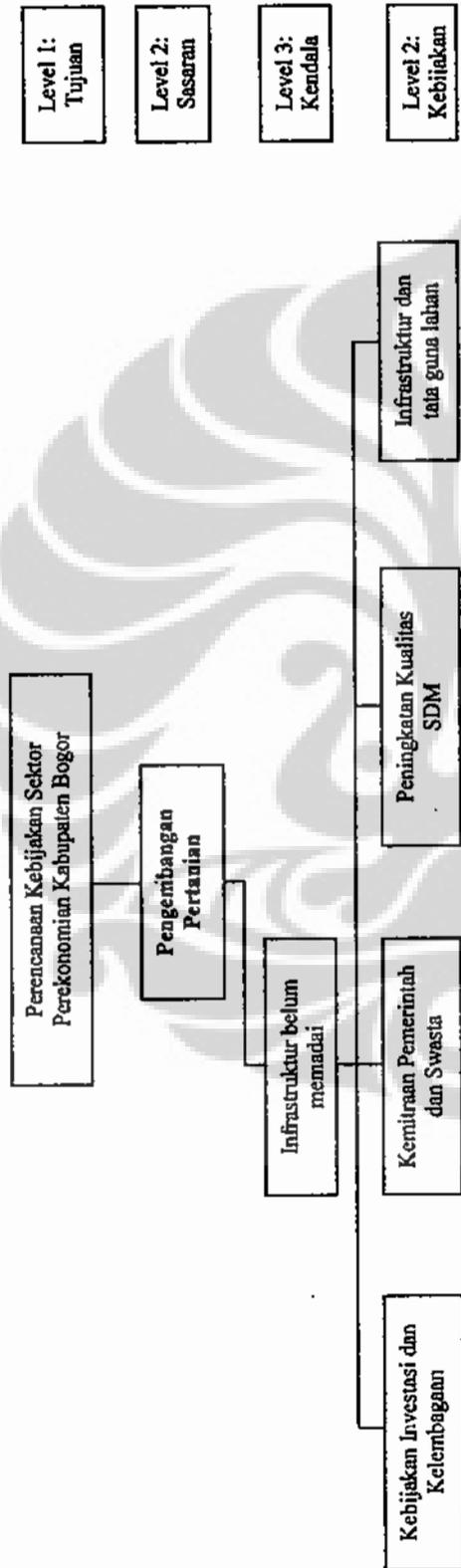
Pertanyaan 9:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Pertanian, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Input yang terbatas?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
46.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
47.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
48.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
49.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
50.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
51.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1 = sama penting, 3 = sedikit lebih penting, 5 = lebih penting, 7 = sangat lebih penting, 9 = mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



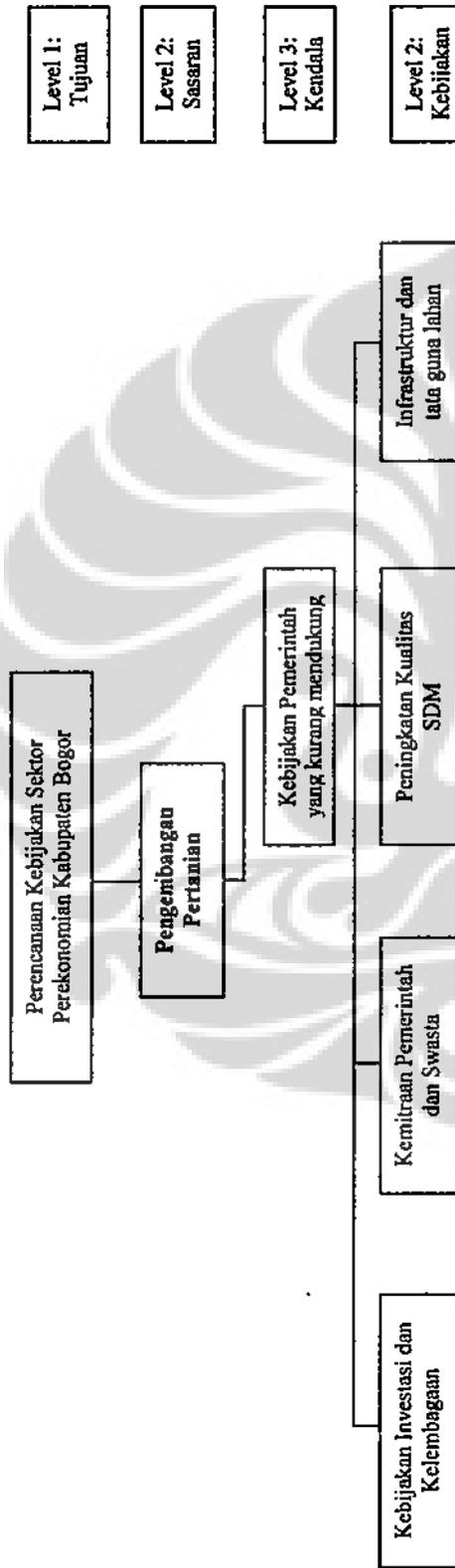
Pertanyaan 10:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Pertanian, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Infrastruktur belum memadai ?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
52.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
53.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
54.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
55.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
56.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
57.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



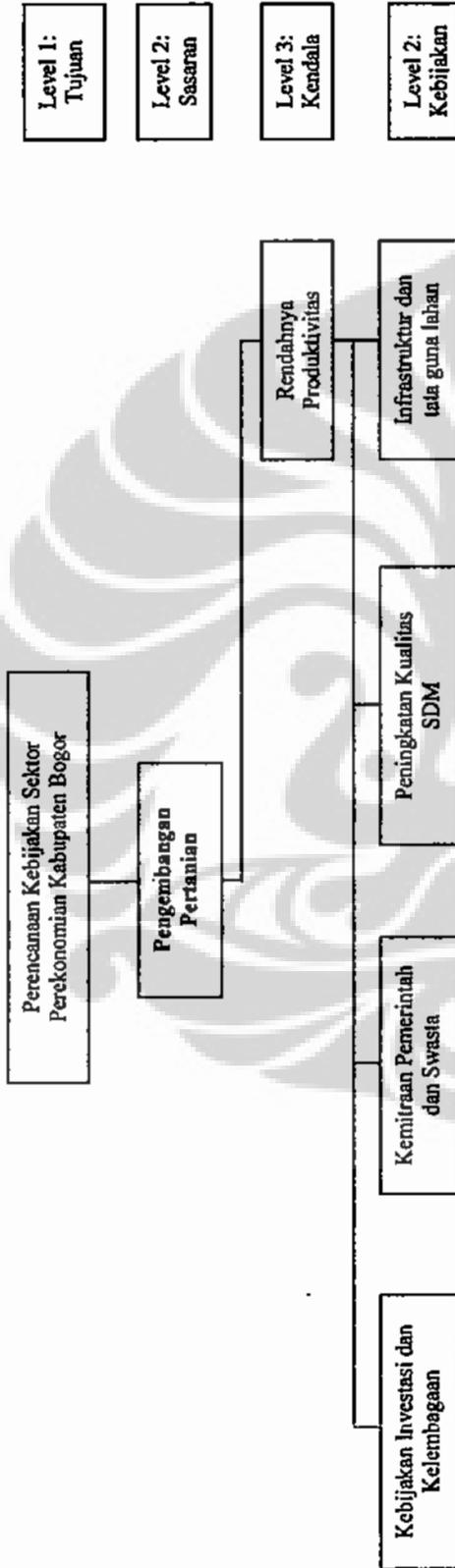
Pertanyaan 11:

Menurut Bapak/Ibu dalam Pengembangan Pertanian, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala *Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung*?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
58.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
59.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
60.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
61.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
62.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
63.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



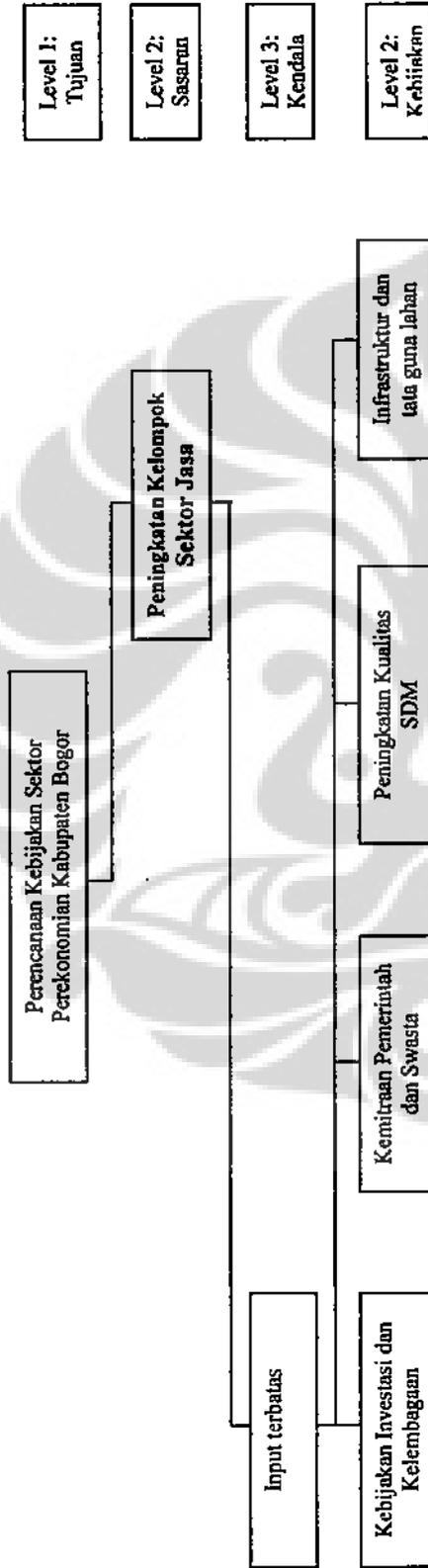
Pertanyaan 12:

Menurut Bapak/Ibu Pengembangan Pertanian, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Rendahnya produktivitas?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
64.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
65.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
66.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
67.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
68.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
69.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



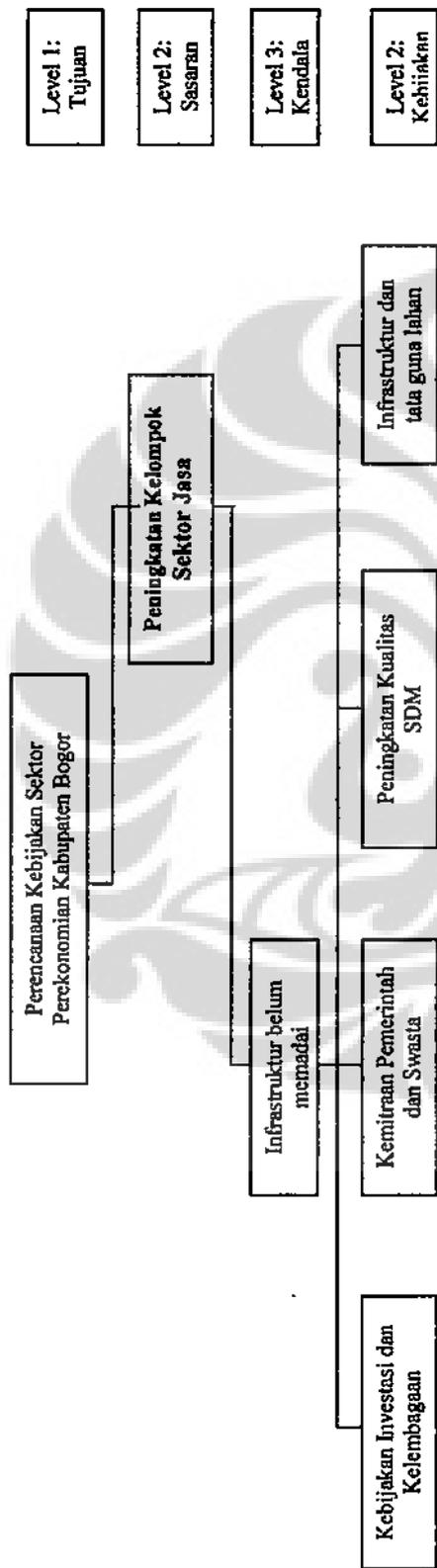
Pertanyaan 13:

Menurut Bapak/Ibu dalam Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Input yang terbatas?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
70.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
71.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
72.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
73.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
74.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
75.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1 = sama penting, 3 = sedikit lebih penting, 5 = lebih penting, 7 = sangat lebih penting, 9 = mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



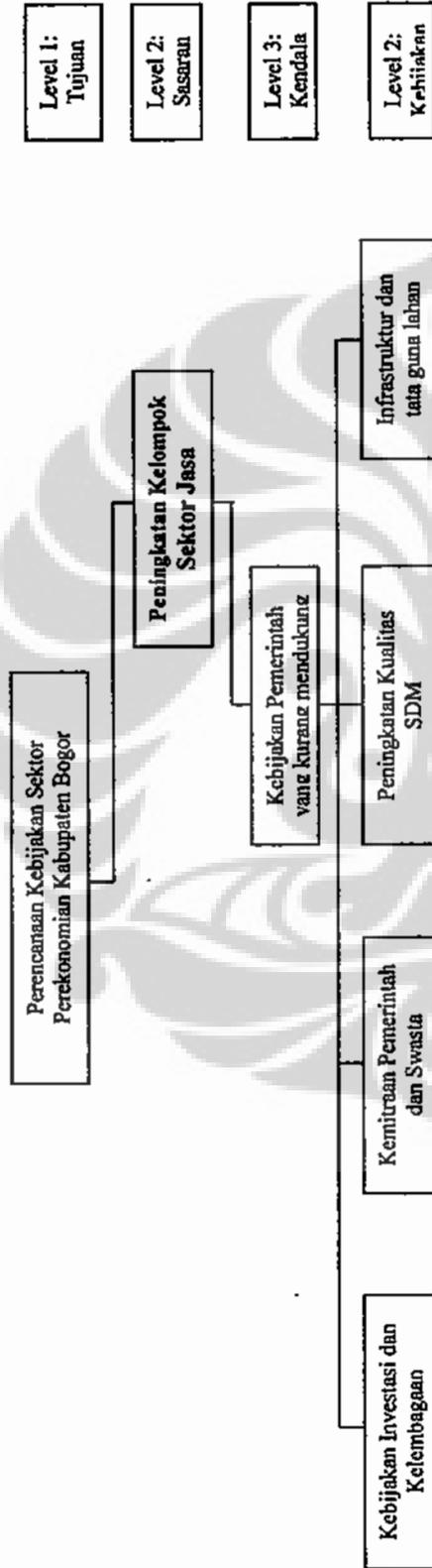
Pertanyaan 14:

Menurut Bapak/Ibu dalam Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, Kebijakan manakah yang paling penting diprioritaskan untuk mengatasi kendala Infrastruktur belum memadai ?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
76.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
77.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
78.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
79.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
80.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
81.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



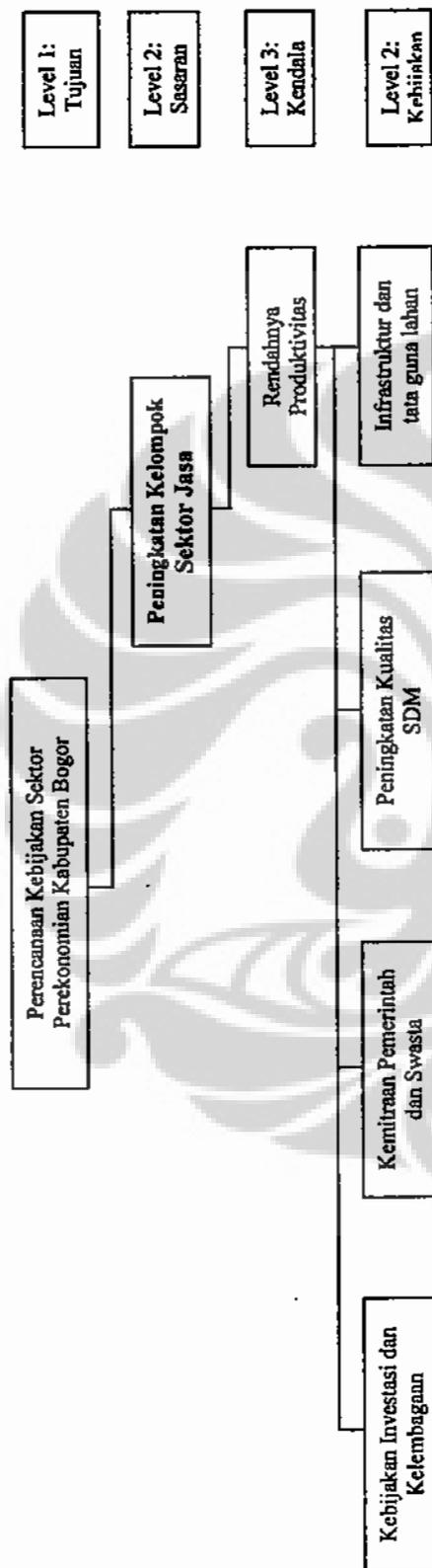
Pertanyaan 15:

Menurut Bapak/Ibu dalam Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
82.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
83.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
84.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
85.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
86.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
87.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

(Lanjutan Lamp. 1)



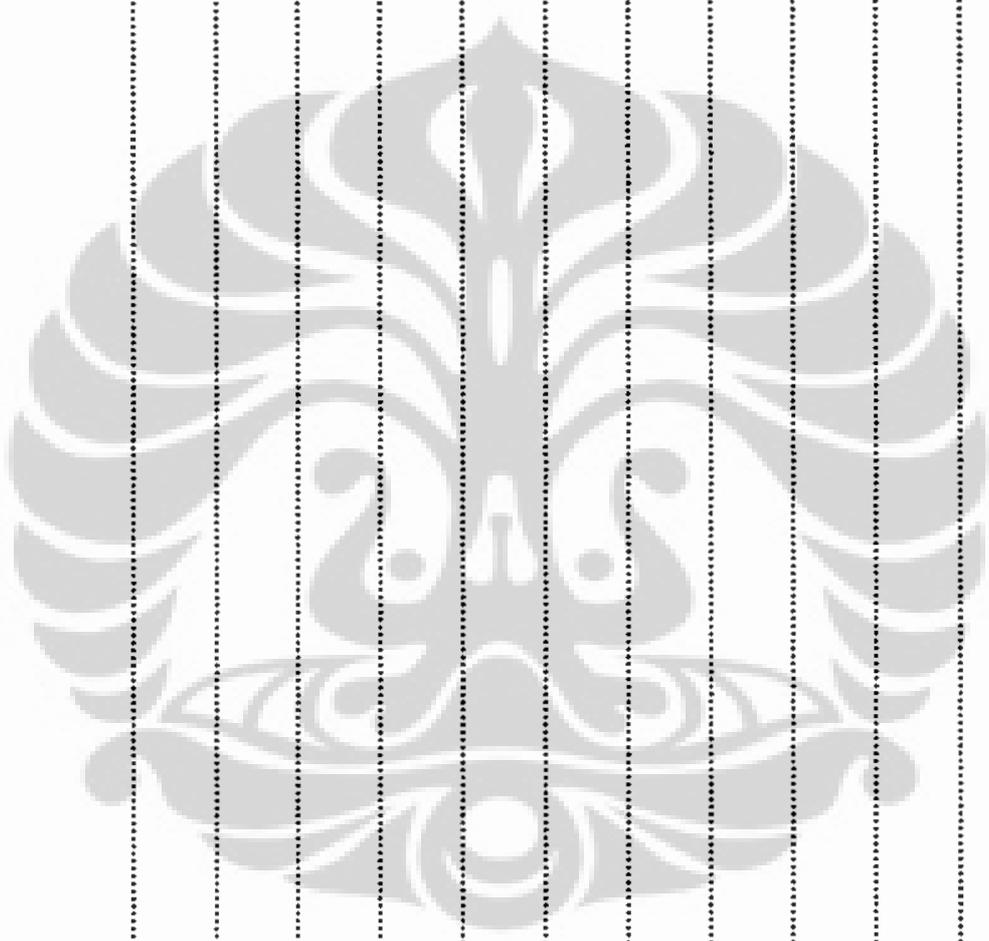
Pertanyaan 16:

Menurut Bapak/Ibu dalam Peningkatan Kelompok Sektor Jasa, Kebijakan manakah yang *paling penting* diprioritaskan untuk mengatasi kendala Rendahnya produktivitas?

No.	Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 2
88.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Kemitraan Pemerintah dan Swasta
89.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Peningkatan Kualitas SDM
90.	Kebijakan Investasi dan Penguatan Kelembagaan										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
91.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Peningkatan Kualitas SDM
92.	Kemitraan Pemerintah dan Swasta										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan
93.	Peningkatan Kualitas SDM										Infrastruktur dan Tata Guna Lahan

Ket. (1= sama penting, 3= sedikit lebih penting, 5= lebih penting, 7= sangat lebih penting, 9= mutlak lebih penting)

SARAN DAN MASUKAN:



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pertanyaan Wawancara Mendalam :

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai iklim investasi di Kabupaten Bogor? Apa saja hambatan dalam berinvestasi di Kabupaten Bogor?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah strategi dalam mengatasi masalah tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah sektor unggulan di dalam perekonomian di Kabupaten Bogor? Apa alasan sektor tersebut menjadi sektor unggulan?

Tabel Hasil Pengisian Kuesioner AHP oleh Responden Ahli

Faktor 1	Faktor 2	Responden						Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	
Perencanaan Kebijakan Sektor Perekonomian								
Pengembangan Industri	Pengembangan Pertanian	0.14	5.00	1.00	0.33	0.20	1.00	0.60
Pengembangan Industri	Peningkatan Kel. Sektor Jasa	0.11	1.00	7.00	3.00	0.33	5.00	1.25
Pengembangan Pertanian	Peningkatan Kel. Sektor Jasa	0.33	0.20	7.00	5.00	3.00	5.00	1.81
Kendala Pengembangan Industri								
Input Terbatas	Infrastruktur Belum Memadai	5.00	0.33	0.20	0.20	0.20	3.00	0.58
Input Terbatas	Kebijakan Pemerintah	9.00	0.20	0.14	0.33	0.33	5.00	0.72
Input Terbatas	Rendahnya Produktivitas	7.00	3.00	0.33	0.14	1.00	0.33	0.83
Infrastruktur Belum Memadai	Kebijakan Pemerintah	7.00	0.33	0.33	3.00	5.00	3.00	1.81
Infrastruktur Belum Memadai	Rendahnya Produktivitas	3.00	5.00	3.00	0.33	5.00	0.20	1.57
Kebijakan Pemerintah	Rendahnya Produktivitas	0.33	7.00	5.00	0.20	5.00	0.14	1.09
Kendala Pengembangan Pertanian								
Input Terbatas	Infrastruktur Belum Memadai	0.20	0.20	0.33	5.00	3.00	5.00	1.00
Input Terbatas	Kebijakan Pemerintah	3.00	0.14	0.14	7.00	5.00	3.00	1.36
Input Terbatas	Rendahnya Produktivitas	0.14	0.33	0.20	3.00	7.00	0.33	0.64
Infrastruktur Belum Memadai	Kebijakan Pemerintah	7.00	0.33	0.20	3.00	3.00	0.33	1.06
Infrastruktur Belum Memadai	Rendahnya Produktivitas	0.33	3.00	0.33	0.33	5.00	0.14	0.66
Kebijakan Pemerintah	Rendahnya Produktivitas	0.11	7.00	3.00	0.20	5.00	0.20	0.88
Kendala Peningkatan Kel. Sektor Jasa								
Input Terbatas	Infrastruktur Belum Memadai	0.33	3.00	0.33	0.20	0.20	3.00	0.58
Input Terbatas	Kebijakan Pemerintah	3.00	5.00	0.20	3.00	0.20	5.00	1.44
Input Terbatas	Rendahnya Produktivitas	5.00	0.33	3.00	0.33	1.00	0.20	0.83
Infrastruktur Belum Memadai	Kebijakan Pemerintah	7.00	3.00	0.33	7.00	3.00	3.00	2.76
Infrastruktur Belum Memadai	Rendahnya Produktivitas	9.00	0.20	5.00	3.00	5.00	0.20	1.73
Kebijakan Pemerintah	Rendahnya Produktivitas	3.00	0.14	7.00	0.20	5.00	0.14	0.87

Tabel (Sambungan)

Faktor 1	Faktor 2	Responden						Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	
Pengembangan Industri								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Input Terbatas</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	3.00	1.00	7.00	0.33	5.00	3.00	2.17
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	0.20	3.00	5.00	0.20	0.20	0.33	0.58
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.33	3.00	3.00	0.20	5.00	1.00
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	0.11	3.00	0.33	0.33	0.14	0.20	0.32
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.14	0.33	0.20	5.00	0.14	3.00	0.52
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	0.20	0.33	7.00	1.00	7.00	1.46
Pengembangan Industri								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Infrastruktur Belum Memadai</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	0.33	1.00	5.00	3.00	5.00	1.00	1.71
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	3.00	3.00	7.00	7.00	3.00	5.00	4.33
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.14	0.33	3.00	5.00	1.00	0.20	0.72
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.56
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.33	0.33	3.00	0.33	0.33	0.48
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.11	0.20	0.20	0.33	0.20	0.20	0.20
Pengembangan Industri								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Kebijakan Pemerintah</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	5.00	5.00	3.00	5.00	1.00	5.00	3.51
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	9.00	3.00	7.00	7.00	3.00	3.00	4.78
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	7.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.10
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	3.00	0.33	5.00	3.00	3.00	0.20	1.44
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	3.00	3.00	0.33	3.00	1.00	1.20
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.20	5.00	0.33	0.20	0.33	5.00	0.69
Pengembangan Industri								
<i>Kebijakan mengatasi Rendahnya Produktivitas</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	3.00	0.33	5.00	5.00	5.00	0.33	1.86
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	0.20	0.14	3.00	0.33	0.20	0.14	0.31
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.20	7.00	3.00	1.00	0.20	0.81

Tabel (Sambungan)

Faktor 1	Faktor 2	Responden						Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	
Pengembangan Industri								
<i>Kebijakan mengatasi Rendahnya Produktivitas</i>								
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	0.11	0.20	0.33	0.14	0.20	0.20	0.19
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.20	0.33	3.00	0.33	0.20	0.33	0.41
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	5.00	5.00	5.00	1.00	5.00	3.51
Pengembangan Pertanian								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Input Terbatas</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.87
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	0.14	5.00	5.00	3.00	3.00	0.33	1.48
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	0.20	7.00	7.00	0.33	0.20	1.12
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	0.11	3.00	3.00	0.33	0.33	0.20	0.53
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.20	5.00	3.00	0.20	0.14	0.55
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	7.00	7.00	3.00	5.00	0.20	0.33	1.91
Pengembangan Pertanian								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Infrastruktur Belum Memadai</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	3.00	5.00	5.00	3.00	5.00	1.00	3.22
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	7.00	7.00	7.00	5.00	3.00	5.00	5.43
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	5.00	0.33	3.00	0.33	0.33	0.20	0.69
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	5.00	3.00	3.00	3.00	0.33	5.00	2.47
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	0.20	0.33	0.20	0.20	0.20	0.34
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.14	0.20	0.14	0.20	0.14	0.18
Pengembangan Pertanian								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Kebijakan Pemerintah</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	5.00	7.00	3.00	5.00	5.00	5.00	4.86
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	3.00	9.00	5.00	3.00	1.00	3.00	3.27
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	3.00	7.00	0.33	1.00	0.33	0.96
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	0.33	3.00	3.00	0.33	0.33	0.33	0.69
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.14	0.20	5.00	0.14	0.20	0.14	0.29
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.20	0.20	3.00	0.20	0.33	0.20	0.34

Tabel (Sambungan)

Faktor 1	Faktor 2	Responden						Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	
Pengembangan Pertanian								
<i>Kebijakan mengatasi Rendahnya Produktivitas</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	0.33	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.69
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	5.00	0.20	3.00	0.33	0.20	0.20	0.58
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	0.33	7.00	3.00	0.20	0.33	1.06
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	9.00	0.14	0.33	0.14	0.20	0.14	0.35
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	5.00	0.20	3.00	0.33	0.20	0.20	0.58
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	5.00	5.00	5.00	1.00	3.00	2.24
Peningkatan Kelompok Sektor Jasa								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Input Terbatas</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	0.20	0.14	5.00	0.33	5.00	3.00	0.95
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	0.11	0.20	7.00	0.33	1.00	0.20	0.47
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.33	3.00	1.00	0.33	0.33	0.58
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	0.33	3.00	3.00	1.00	0.20	0.14	0.66
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	5.00	0.33	3.00	0.20	0.20	0.92
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	5.00	5.00	0.20	3.00	1.00	3.00	1.89
Peningkatan Kelompok Sektor Jasa								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Infrastruktur Belum Memadai</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	0.33	3.00	5.00	0.33	5.00	0.33	1.19
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	3.00	5.00	7.00	3.00	3.00	5.00	4.10
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.20	0.33	3.00	0.20	0.33	0.20	0.37
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	5.00	3.00	3.00	5.00	0.33	5.00	2.69
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.20	0.33	0.33	0.20	0.33	0.28
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.11	0.14	0.20	0.20	0.20	0.14	0.16
Peningkatan Kelompok Sektor Jasa								
<i>Kebijakan mengatasi kendala Kebijakan Pemerintah</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.29
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	9.00	3.00	7.00	3.00	3.00	3.00	4.15

Tabel (Sambungan)

Faktor 1	Faktor 2	Responden						Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	
Perencanaan Kebijakan Sektor Perekonomian								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	5.00	3.00	7.00	3.00	7.00	4.33
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	3.00	0.20	3.00	0.33	0.33	0.33	0.64
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.33	0.33	3.00	0.33	3.00	0.69
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.20	3.00	0.20	5.00	1.00	5.00	1.20
Peningkatan Kelompok Sektor Jasa								
<i>Kebijakan mengatasi Rendahnya Produktivitas</i>								
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Kemitraaan Pemerintah-Swasta	0.33	3.00	7.00	3.00	5.00	3.00	2.61
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM	0.11	0.20	3.00	0.20	1.00	0.20	0.37
K. Investasi dan P. Kelembagaan	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.20	0.33	5.00	0.33	0.33	0.33	0.48
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Peningkatan Kualitas SDM	0.20	0.14	0.20	0.14	0.33	0.14	0.18
Kemitraaan Pemerintah-Swasta	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	0.33	0.20	0.33	0.33	0.20	0.20	0.26
Peningkatan Kualitas SDM	Infrastruktur & Tata Guna Lahan	3.00	3.00	3.00	3.00	0.33	3.00	2.08

Keterangan :

Responden 1 : Bapak Ir. Zairin, Kepala Bappeda Kabupaten Bogor

Responden 2 : Bapak Ir. Dedi Supriadi, MSc., Kabid Perekonomian Bappeda Kabupaten Bogor

Responden 3 : Ibu Ir. Emy Sriwahyuni, MSi, Kabid Penanaman Modal Badan Perizinan Terpadu

Responden 4 : Bapak Maryono, SE, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Bogor

Responden 5 : Bapak Didit Okta Pribadi, SP, MSi, P4W LPPM-IPB

Responden 6 : Bapak Mansyur M. Ilyas, SH, Sekretaris APINDO Kabupaten Bogor

Tabel Hasil Output Expert Choice

No.	Elemen	Prioritas
Sasaran Perencanaan Sektoral		
1	Pengembangan Pertanian	0.457
2	Pengembangan Industri	0.288
3	Peningkatan Jasa	0.255
Inconsistency = 0.00211		
Kendala		
1	Infrastruktur Kurang	0.301
2	Rendahnya Produktivitas	0.270
3	Input Terbatas	0.219
4	Kebijakan Pemerintah	0.210
Inconsistency = 0.01		
Kendala Pengembangan Industri		
1	Infrastruktur Kurang	0.360
2	Kebijakan Pemerintah	0.232
3	Rendahnya Produktivitas	0.221
4	Input Terbatas	0.187
Inconsistency = 0.00492		
Kendala Pengembangan Pertanian		
1	Rendahnya Produktivitas	0.318
2	Input Terbatas	0.239
3	Infrastruktur Kurang	0.224
4	Kebijakan Pemerintah	0.220
Inconsistency = 0.01		
Kendala Pengembangan Pertanian		
1	Infrastruktur Kurang	0.398
2	Rendahnya Produktivitas	0.224
3	Input Terbatas	0.216
4	Kebijakan Pemerintah	0.162
Inconsistency = 0.00761		
Kebijakan		
1	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.314
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.308
3	Peningkatan SDM	0.241
4	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.138
Inconsistency = 0.01		

Tabel (Sambungan)

No.	Elemen	Prioritas
Kebijakan Pengembangan Industri		
<i>dalam menangani Input Terbatas</i>		
1	Peningkatan SDM	0.386
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.247
3	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.245
4	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.122
Inconsistency = 0.00194		
Kebijakan Pengembangan Industri		
<i>dalam menangani Infrastruktur belum memadai</i>		
1	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.406
2	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.316
3	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.208
4	Peningkatan SDM	0.070
Inconsistency = 0.00716		
Kebijakan Pengembangan Industri		
<i>dalam menangani Kebijakan Pemerintah</i>		
1	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.574
2	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.167
3	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.147
4	Peningkatan SDM	0.112
Inconsistency = 0.00195		
Kebijakan Pengembangan Industri		
<i>dalam menangani Rendahnya Produktivitas</i>		
1	Peningkatan SDM	0.557
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.192
3	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.163
4	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.089
Inconsistency = 0.00784		
Kebijakan Pengembangan Pertanian		
<i>dalam menangani Input Terbatas</i>		
1	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.371
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.262
3	Peningkatan SDM	0.244
4	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.122
Inconsistency = 0.01		

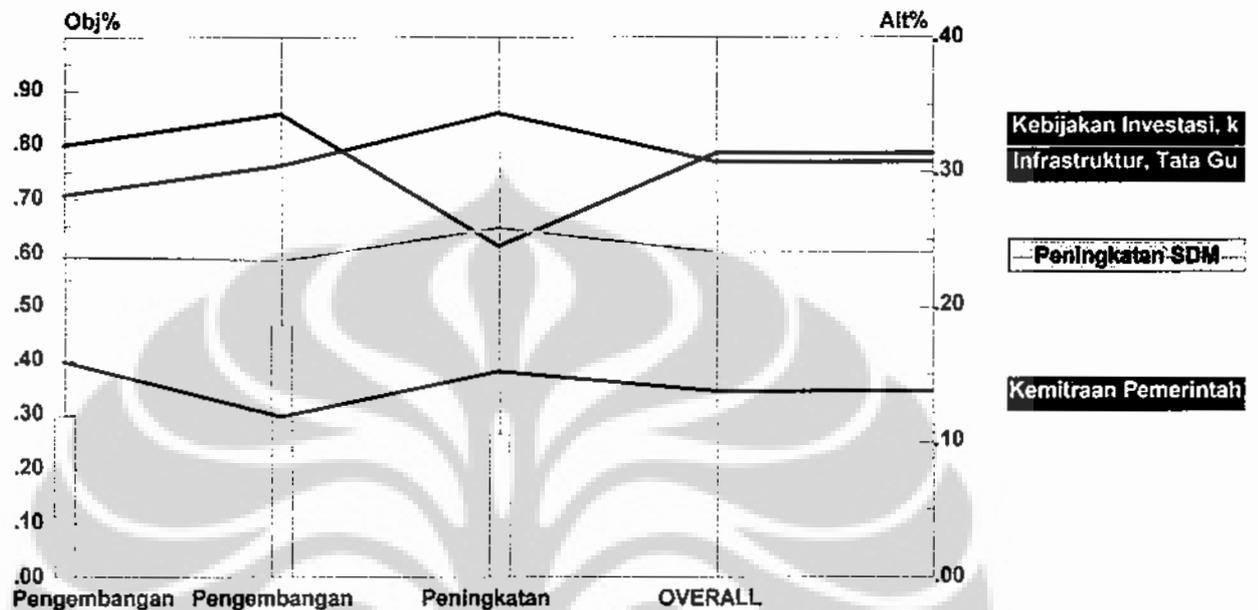
Tabel (Sambungan)

No.	Elemen	Prioritas
Kebijakan Pengembangan Pertanian		
<i>dalam menangani Infrastruktur belum memadai</i>		
1	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.428
2	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.366
3	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.140
4	Peningkatan SDM	0.067
Inconsistency = 0.01		
Kebijakan Pengembangan Pertanian		
<i>dalam menangani Kebijakan Pemerintah</i>		
1	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.407
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.372
3	Peningkatan SDM	0.128
4	Kemitraan pemerintah-Swasta	0.093
Inconsistency = 0.00492		
Kebijakan Pengembangan Pertanian		
<i>dalam menangani Rendahnya Produktivitas</i>		
1	Peningkatan SDM	0.413
2	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.258
3	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.209
4	Kemitraan pemerintah-Swasta	0.119
Inconsistency = 0.01		
Kebijakan Peningkatan Jasa		
<i>dalam menangani Input Terbatas</i>		
1	Peningkatan SDM	0.376
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.240
3	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.214
4	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.170
Inconsistency = 0.01		
Kebijakan Peningkatan Jasa		
<i>dalam menangani Infrastruktur belum memadai</i>		
1	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.537
2	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.224
3	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.172
4	Peningkatan SDM	0.068
Inconsistency = 0.01		

Tabel (Sambungan)

No.	Elemen	Prioritas
Kebijakan Peningkatan Jasa		
<i>dalam menangani Kebijakan Pemerintah</i>		
1	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.600
2	Peningkatan SDM	0.158
3	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.139
4	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.103
Inconsistency = 0.00237		
Kebijakan Peningkatan Jasa		
<i>dalam menangani Rendahnya Produktivitas</i>		
1	Peningkatan SDM	0.475
2	Infrastruktur, Tata Guna Lahan	0.284
3	Kebijakan Investasi, kelembagaan	0.167
4	Kemitraan Pemerintah-Swasta	0.074
Inconsistency = 0.01		

Grafik Hasil Sensitivitas



Objectives Names

Pengembangan	Pengembangan Industri (L: .288)
Pengembangan	Pengembangan Pertanian (L: .457)
Peningkatan	Peningkatan Jasa (L: .255)

Alternatives Names

Kebijakan In	Kebijakan Investasi, kelembagaan
Kemitraan Pe	Kemitraan Pemerintah-Swasta
Peningkatan	Peningkatan SDM
Infrastrukt	Infrastruktur, Tata Guna Lahan

**Tabel Nilai Shift Share PDRB Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat
Tahun 2001-2007**

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	504,538.97	-348,358.08	-145,754.58	10,426.31
a. Tanaman Bahan Makanan	286,904.75	-226,557.51	-99,635.93	-39,288.69
b. Tanaman Perkebunan	45,475.62	-24,591.98	-15,963.43	4,920.22
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	139,409.61	21,312.33	-138,921.03	21,800.91
d. Kehutanan	1,310.53	-2,566.91	2,334.02	1,077.64
e. Perikanan	31,438.45	-24,841.44	15,319.22	21,916.23
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	114,306.96	-191,636.65	77,944.77	615.08
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	70,690.59	-130,535.95	4,363.89	-55,481.46
c. Penggalian	43,616.36	-31,527.95	44,008.12	56,096.54
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,546,918.99	1,159,647.60	-808,278.03	4,898,288.56
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)	4,546,918.99	1,292,328.64	-940,959.08	4,898,288.56
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	255,144.20	-71,106.78	144,664.54	328,701.96
a. Listrik	250,955.04	-61,610.01	134,744.34	324,089.37
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	4,189.16	-1,604.95	2,028.38	4,612.59
5. BANGUNAN	217,793.08	232,869.07	-207,845.75	242,816.40
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,036,628.01	27,864.10	423,564.49	1,488,056.60
a. Perdagangan Besar & Eceran	831,110.80	167,856.80	237,270.80	1,236,238.41
b. Hotel	34,805.88	15,315.69	-271.78	49,849.79
c. Restoran	170,711.33	-170,143.66	201,400.73	201,968.40
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	181,836.75	84,387.66	4,435.59	270,660.00
a. Pengangkutan	136,494.09	-30,802.21	65,039.31	170,731.19
1. Angkutan Rel	1,435.97	-2,419.26	2,016.20	1,032.92
2. Angkutan Jalan Raya	116,483.51	-17,622.66	51,748.36	150,609.21
3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	18,574.61	-9,948.48	10,462.93	19,089.06
b. Komunikasi	45,342.66	127,469.29	-72,883.13	99,928.81
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	118,501.16	37,846.79	-8,958.14	147,389.82
a. Bank	16,723.70	33,819.91	-29,241.35	21,302.26
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	6,489.89	18,200.87	-12,545.28	12,145.48
c. Jasa Penunjang Keuangan				0.00
d. Sewa Bangunan	77,296.13	-24,713.33	44,195.49	96,778.29
e. Jasa Perusahaan	17,991.43	-14,812.47	13,984.83	17,163.79

Tabel (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
9. JASA-JASA	300,024.59	92,986.46	-93,005.97	300,005.07
a. Pemerintahan Umum	140,711.83	-14,936.80	-1,658.31	124,116.72
b. Swasta	159,312.75	151,770.09	-135,194.49	175,888.35
1. Sosial Kemasyarakatan	36,570.81	35,270.66	-19,300.99	52,540.47
2. Hiburan & Rekreasi	3,251.44	4,254.26	-3,924.04	3,581.66
3. Perorangan & Rumahtangga	119,490.51	112,222.79	-111,947.08	119,766.22
JUMLAH	7,275,692.71	1,024,500.17	-613,233.07	7,686,959.80



Lampiran 6

**Tabel Nilai Shift Share PDRB Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat
Tahun 1996-2000**

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	-329,717.35	12,421.00	-101,431.23	-418,727.59
a. Tanaman Bahan Makanan	-171,236.45	97,374.86	-68,400.88	-142,262.47
b. Tanaman Perkebunan	-23,596.20	-17,427.33	29,286.87	-11,736.67
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-115,173.15	-185,490.01	49,411.66	-251,251.50
d. Kehutanan	-571.43	513.74	566.22	508.53
e. Perikanan	-19,140.12	7,946.72	-2,792.08	-13,985.48
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-64,066.40	24,112.53	21,195.45	-18,758.42
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	-36,268.97	1,590,912.82	1,546,239.98	8,403.88
c. Penggalian	-27,797.43	-101,930.94	102,566.08	-27,162.29
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	-2,490,159.45	1,214,055.03	476,319.78	-799,784.64
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)	-2,490,159.45	1,124,904.39	565,470.42	-799,784.64
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	-87,658.82	120,479.14	193,397.70	226,218.02
a. Listrik	-86,013.30	129,204.81	180,305.23	223,496.74
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	-1,645.53	3,902.95	463.86	2,721.27
5. BANGUNAN	-199,752.78	-387,729.24	118,825.50	-468,656.53
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	-619,159.43	-264,630.87	418,797.17	-464,993.14
a. Perdagangan Besar & Eceran	-492,576.88	-182,849.29	327,954.59	-347,471.58
b. Hotel	-19,517.02	-21,533.60	30,594.75	-10,455.88
c. Restoran	-107,065.52	-68,390.84	68,390.69	-107,065.67
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-97,742.13	-46,202.76	114,296.57	-29,648.32
a. Pengangkutan	-79,962.23	-69,875.73	92,443.22	-57,394.74
1. Angkutan Rel	-871.93	-410.33	540.30	-741.96
2. Angkutan Jalan Raya	-68,020.16	-21,325.29	40,661.12	-48,684.34
3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	-11,070.14	-27,841.07	30,942.76	-7,968.45
b. Komunikasi	-17,779.90	40,931.06	4,595.27	27,746.43
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	-70,005.21	-57,806.79	78,979.40	-48,832.61
a. Bank	-10,571.83	-27,950.60	27,818.93	-10,703.50
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	-3,787.92	1,615.93	-549.24	-2,721.24
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00			0.00
d. Sewa Bangunan	-45,386.14	27,382.70	-12,019.08	-30,022.52
e. Jasa Perusahaan	-10,259.32	-5,030.56	9,904.52	-5,385.36

Tabel (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
9. JASA-JASA	-143,657.16	16,809.05	171,966.49	45,118.38
a. Pemerintahan Umum	-66,397.44	-75.39	94,295.28	27,822.46
b. Swasta	-77,259.72	23,488.87	71,066.78	17,295.93
1. Sosial Kemasyarakatan	-17,022.97	-725.64	26,395.05	8,646.43
2. Hiburan & Rekreasi	-1,543.29	826.77	1,296.74	580.22
3. Perorangan & Rumah tangga	-58,693.46	22,353.89	44,408.85	8,069.28
JUMLAH	-4,101,918.73	631,507.09	1,492,346.81	-1,978,064.83



Tabel. Nilai Shift Share PDRB Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	514,961.35	-213,824.99	-290,710.05	10,426.31
a. Tanaman Bahan Makanan	292,831.41	-140,087.01	-192,033.09	-39,288.69
b. Tanaman Perkebunan	46,415.02	-16,829.28	-24,665.53	4,920.22
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	142,289.43	-48,745.38	-71,743.13	21,800.91
d. Kehutanan	1,337.61	-1,389.25	1,129.28	1,077.64
e. Perikanan	32,087.88	445.45	-10,617.11	21,916.23
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	116,668.22	-110,595.70	-5,457.44	615.08
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	72,150.87	-11,897.56	-115,734.77	-55,481.46
c. Penggalian	44,517.36	19,699.24	-8,120.06	56,096.54
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,640,845.77	-153,493.78	410,936.57	4,898,288.56
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)	4,640,845.77	616,932.79	-359,490.00	4,898,288.56
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	260,414.77	92,834.10	-24,546.91	328,701.96
a. Listrik	256,139.08	46,333.68	21,616.62	324,089.37
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	4,275.69	-153.88	490.78	4,612.59
5. BANGUNAN	222,292.08	97,620.92	-77,096.60	242,816.40
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,058,041.88	260,417.86	169,596.86	1,488,056.60
a. Perdagangan Besar & Eceran	848,279.25	236,616.90	151,342.25	1,236,238.41
b. Hotel	35,524.87	5,125.07	9,199.85	49,849.79
c. Restoran	174,237.75	14,093.60	13,637.05	201,968.40
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	185,593.00	338,780.67	-253,713.66	270,660.00
a. Pengangkutan	139,313.68	38,802.89	-7,385.38	170,731.19
1. Angkutan Rel	1,465.64	-1,976.17	1,543.45	1,032.92
2. Angkutan Jalan Raya	118,889.74	-6,012.92	37,732.39	150,609.21
3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	18,958.31	4,634.51	-4,503.76	19,089.06
b. Komunikasi	46,279.31	257,667.36	-204,017.86	99,928.81
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	120,949.07	42,353.07	-15,912.32	147,389.82
a. Bank	17,069.17	-1,660.99	5,894.08	21,302.26
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	6,623.96	5,249.76	271.77	12,145.48
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	78,892.86	59,141.51	-41,256.08	96,778.29
e. Jasa Perusahaan	18,363.09	14,275.47	-15,474.76	17,163.79

Tabel. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
9. JASA-JASA	306,222.26	-3,749.05	-2,468.15	300,005.07
a. Pemerintahan Umum	143,618.55	-83,981.02	64,479.19	124,116.72
b. Swasta	162,603.71	100,508.39	-87,223.75	175,888.35
1. Sosial Kemasyarakatan	37,326.26	18,676.88	-3,462.67	52,540.47
2. Hiburan & Rekreasi	3,318.60	1,642.70	-1,379.64	3,581.66
3. Perorangan & Rumah tangga	121,958.86	82,971.32	-85,163.95	119,766.22
JUMLAH	7,425,988.40	350,343.10	-89,371.70	7,686,959.80



**Tabel. Nilai Shift Share PDRB Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/ Nasional
Tahun 1996-2000**

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	-86,426.02	159,064.89	-491,366.46	-418,727.59
a. Tanaman Bahan Makanan	-44,884.76	68,722.68	-166,100.40	-142,262.47
b. Tanaman Perkebunan	-6,185.07	10,602.35	-16,153.95	-11,736.67
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-30,189.36	24,032.14	-245,094.28	-251,251.50
d. Kehutanan	-149.78	123.88	534.43	508.53
e. Perikanan	-5,017.04	25,310.51	-34,278.95	-13,985.48
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-16,793.18	22,675.98	-24,641.21	-18,758.42
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	-9,506.88	124,212.85	-106,302.09	8,403.88
c. Penggalian	-7,286.30	-33,725.49	13,849.50	-27,162.29
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	-652,724.40	1,007,030.89	-1,154,091.12	-799,784.64
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)	-652,724.40	939,279.86	-1,086,340.10	-799,784.64
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	-22,977.27	178,177.33	71,017.96	226,218.02
a. Listrik	-22,545.94	183,569.92	62,472.76	223,496.74
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	-431.33	3,508.28	-355.67	2,721.27
5. BANGUNAN	-52,359.50	-256,726.48	-159,570.54	-468,656.53
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	-162,295.02	-121,667.19	-181,030.93	-464,993.14
a. Perdagangan Besar & Eceran	-129,115.01	-113,642.63	-104,713.94	-347,471.58
b. Hotel	-5,115.83	5,882.33	-11,222.37	-10,455.88
c. Restoran	-28,064.18	-12,764.53	-66,236.96	-107,065.67
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-25,620.32	13,256.02	-17,284.02	-29,648.32
a. Pengangkutan	-20,959.82	-38,758.59	2,323.67	-57,394.74
1. Angkutan Rel	-228.55	1,557.43	-2,070.84	-741.96
2. Angkutan Jalan Raya	-17,829.55	-67,603.63	36,748.84	-48,684.34
3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Jasa Penunjang Angkutan	-2,901.72	5,430.61	-10,497.34	-7,968.45
b. Komunikasi	-4,660.49	51,814.02	-19,407.10	27,746.43
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	-18,349.87	-88,047.83	57,565.09	-48,832.61
a. Bank	-2,771.10	-19,857.54	11,925.15	-10,703.50
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	-992.90	-3.95	-1,724.39	-2,721.24
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	-11,896.68	-31,741.22	13,615.39	-30,022.52
e. Jasa Perusahaan	-2,689.19	-1,352.58	-1,343.59	-5,385.36

Tabel. (Sambungan)

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
9. JASA-JASA	-37,655.63	67,881.87	14,892.15	45,118.38
a. Pemerintahan Umum	-17,404.20	5,633.53	39,593.13	27,822.46
b. Swasta	-20,251.44	77,193.51	-39,646.15	17,295.93
1. Sosial Kemasyarakatan	-4,462.09	11,391.53	1,716.99	8,646.43
2. Hiburan & Rekreasi	-404.53	-755.31	1,740.05	580.22
3. Perorangan & Rumahtangga	-15,384.82	82,337.98	-58,883.88	8,069.28
JUMLAH	-1,075,201.21	981,645.47	-1,884,509.09	-1,978,064.83



Tabel. Nilai Shift Share Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 1996-2000

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	30,694.19	-23,035.45	52,452.75	60,111.48
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,101.20	-3,693.75	16,093.89	13,501.35
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	28,227.06	33,750.63	-56,201.08	5,776.61
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,045.00	-4,241.43	-1,551.02	-4,747.45
5. BANGUNAN	11,830.57	-30,087.77	-3,218.30	-21,475.51
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	33,532.98	58,334.28	-57,552.90	34,314.36
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8,508.30	23,632.91	-5,037.51	27,103.71
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRSH	661.46	-1,399.32	858.67	120.81
9. JASA-JASA	24,621.50	-29,964.56	3,744.87	-1,598.19
JUMLAH	140,222.27	23,295.53	-50,410.63	113,107.18

Tabel. Nilai Shift Share Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	431,265.99	-464,582.85	-17,833.14	-51,150.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	21,827.83	0.00	-13,089.83	8,738.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	288,725.73	-266,520.85	44,700.12	66,905.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,622.63	-339.27	1,679.63	2,963.00
5. BANGUNAN	80,295.17	-79,222.41	4,168.25	5,241.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	296,683.48	-228,388.01	29,217.52	97,513.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	101,206.56	-88,576.10	9,502.55	22,133.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRSH	27,349.36	-24,615.23	11,108.88	13,843.00
9. JASA-JASA	218,246.35	-60,703.77	-27,686.58	129,856.00
JUMLAH	1,467,223.09	-1,212,948.49	41,767.40	296,042.00

Lampiran 10.

Tabel. Nilai Shift Share Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 1996-2000

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	17,095.55	10,567.92	32,448.01	60,111.48
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	613.33	-4,078.13	16,966.14	13,501.35
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	15,721.45	22,634.64	-32,579.48	5,776.61
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	582.03	-5,267.44	-62.03	-4,747.45
5. BANGUNAN	6,589.20	-13,532.69	-14,532.02	-21,475.51
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	18,676.65	25,438.17	-9,800.46	34,314.36
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,738.82	5,766.91	16,597.98	27,103.71
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRSH	368.41	1,103.68	-1,351.27	120.81
9. JASA-JASA	13,713.28	-48,215.02	32,903.55	-1,598.19
JUMLAH	78,098.71	-5,581.97	40,590.43	113,107.18

Tabel. Nilai Shift Share Penduduk Bekerja Kabupaten Bogor terhadap Indonesia/Nasional Tahun 2001-2007

LAPANGAN USAHA	R	Sp	Sd	G
1. PERTANIAN	37,915.80	-24,027.21	-65,038.59	-51,150.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,919.05	-1,030.37	7,849.33	8,738.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	25,384.03	-19,475.90	60,996.88	66,905.00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	142.66	202.08	2,618.26	2,963.00
5. BANGUNAN	7,059.35	18,850.68	-20,669.02	5,241.00
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	26,083.65	19,774.74	51,654.61	97,513.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8,897.82	21,177.81	-7,942.63	22,133.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRSH	2,404.49	3,360.67	8,077.84	13,843.00
9. JASA-JASA	19,187.66	-1,408.86	112,077.20	129,856.00
JUMLAH	128,994.50	17,423.64	149,623.86	296,042.00